



BAGIAN ANGGARAN 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA



Tahun
Anggaran
2016

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Jl. HR. Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan Jakarta Selatan

**Bagian Anggaran 013
Kementerian Hukum Dan HAM RI**



**Laporan Keuangan
*Audited***

**Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Tahun Anggaran 2016

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan
Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

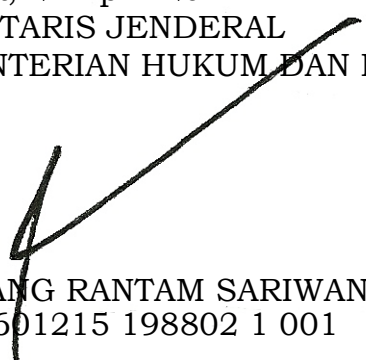
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 April 2017
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 19601215 198802 1 001



DAFTAR ISI



	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. DASAR HUKUM	7
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7
A.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7
A.2.2. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	8
A.2.3. ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	10
A.2.4. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	11
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
A.4. BASIS AKUNTANSI	14
A.5. DASAR PENGUKURAN	14
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	22
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	23
B.2. BELANJA	27
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	28
B.2.2. BELANJA BARANG	30
B.2.3. BELANJA MODAL	35
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	39
C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	39
C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	41
C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	43
C.4. BELANJA DIBAYAR DI MUKA	45
C.5. UANG MUKA BELANJA	46
C.6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	48
C.7. PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (NETTO)	49
C.8. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR))	56
C.9. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	58
C.10. PERSEDIAAN	61

	Hal
C.11. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI TP/TGR	63
C.12. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	64
C.13. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	65
C.14. TANAH	67
C.15. PERALATAN DAN MESIN	69
C.16. GEDUNG DAN BANGUNAN	74
C.17. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	77
C.18. ASET TETAP LAINNYA	80
C.19. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	82
C.20. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	84
C.21. ASET TAK BERWUJUD	85
C.22. ASET LAIN-LAIN	88
C.23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA	90
C.24. UANG MUKA DARI KPPN	90
C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	92
C.26. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	97
C.27. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	98
C.28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	99
C.29. EKUITAS	103
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	104
D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	104
D.2. BEBAN PEGAWAI	107
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	110
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	111
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	114
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	116
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	117
D.8. BEBAN BANTUAN SOSIAL	118
D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	119
D.10. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	120
D.11. BEBAN LAIN-LAIN	121
D.12. KEGIATAN NON OPERASIONAL	122
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	123
E.1. EKUITAS AWAL	123
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	123
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	123
E.3.1. PENYESUAIAN NILAI ASET	123
E.3.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	124
E.3.3. SELISIH REVALUASI ASET TETAP	125
E.3.4. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	125
E.3.5. LAIN-LAIN	126
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	130

	Hal
E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/ DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN.	130
E.4.2 TRANSFER MASUK/ TRANSFER KELUAR.	130
E.4.1 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG.	132
E.4.2 EKUITAS AKHIR.	132
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.	133
F.1. DATA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	133
F.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	133
F.3. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2016	133
F.4. PENGUNGKAPAN LAINNYA	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2016	13
Tabel 2.	Perhitungan Penyisihan Piutang	17
Tabel 3.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 4.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 5.	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2016	22
Tabel 6.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016	23
Tabel 7.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2015	24
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi PNBPNP per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	24
Tabel 9.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	25
Tabel 10.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa	25
Tabel 11.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda	26
Tabel 12.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain	26
Tabel 13.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum	27
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2016 dan 2015	27
Tabel 15.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	28
Tabel 16.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I	28
Tabel 17.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2016	29
Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015	30
Tabel 19.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	30
Tabel 20.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2016	31
Tabel 21.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2016	31
Tabel 22.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2016	32
Tabel 23.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2016	32
Tabel 24.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2016	33
Tabel 25.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2016	33
Tabel 26.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2016	34
Tabel 27.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2016	34
Tabel 28.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2016	35
Tabel 29.	Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016	35
Tabel 30.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2016	36
Tabel 31.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016	36
Tabel 32.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016	37

Tabel 33.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016	37
Tabel 34.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016	38
Tabel 35.	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	39
Tabel 36.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	40
Tabel 37.	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	42
Tabel 38.	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	42
Tabel 39.	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	43
Tabel 40.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Per 31 Desember 2016	44
Tabel 41.	Perbandingan Belanja Dibayar Di Muka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	45
Tabel 42.	Rincian Kas Belanja Dibayar Di Muka Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	46
Tabel 43.	Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	47
Tabel 44.	Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	48
Tabel 45.	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2016	49
Tabel 46.	Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	50
Tabel 47.	Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2016	50
Tabel 48.	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	57
Tabel 49.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	57
Tabel 50.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lancar Berdasarkan Satuan Kerja Eselon I Per 31 Desember 2016	59
Tabel 51.	Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	62
Tabel 52.	Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	63
Tabel 53.	Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	64
Tabel 54.	Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	65
Tabel 55.	Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016	66
Tabel 56.	Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	67
Tabel 57.	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	70
Tabel 58.	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	74



	Hal
Tabel 59. Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	78
Tabel 60. Perbandingan Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	80
Tabel 61. Perbandingan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	83
Tabel 62. Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	86
Tabel 63. Hasil Inventarisasi ATB Ditjen Imigrasi	88
Tabel 64. Perbandingan Nilai Aset Lain-lain Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015 Tagihan TP/TGR Berdasar Eselon I	89
Tabel 65. Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	91
Tabel 66. Rincian Uang Muka KPPN Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	91
Tabel 67. Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga TA 2016	93
Tabel 68. Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga berdasarkan Eselon I TA 2016	93
Tabel 69. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	94
Tabel 70. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016	94
Tabel 71. Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	98
Tabel 72. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja	98
Tabel 73. Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	99
Tabel 74. Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015	100
Tabel 75. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016	124
Tabel 76. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2016	125
Tabel 77. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi per 31 Desember 2016	125
Tabel 78. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Aset per 31 Desember 2016	126
Tabel 79. Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2016	127
Tabel 80. Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	130
Tabel 81. Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2016	131
Tabel 82. Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2016	131



**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021) 5253004 ext 204, Fax (021) 5252975

Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tahun Anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.



Jakarta, 27 April 2017
Inspektur Jenderal,

Aidir Amin Daud
NIP. 19581120 198810 1 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2017

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Yasonna H. Laoly



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Brutto) sebesar **Rp3.375.862.202.663,00** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Netto) sebesar **Rp3.375.662.350.209,00** atau mencapai **92,19%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp3.661.450.428.918,00**.

Realisasi Belanja Negara (Brutto) per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp10.653.384.657.712,00** dan Realisasi Belanja Negara (Netto) sebesar **Rp10.628.597.302.154,00** atau mencapai **91,38%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp11.631.089.854.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar **Rp23.490.566.138.220,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp705.436.094.053,00**; Aset Tetap (Netto) sebesar **Rp22.592.275.117.345,00**;

Piutang Jangka Panjang (Netto) sebesar **Rp13.551.408.556,00**; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar **Rp179.303.518.266,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp402.046.760.296,00** dan **Rp23.088.519.377.924,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp3.165.273.844.117,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp9.128.095.097.986,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp5.962.821.253.869,00)**. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp108.983.848.892,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp5.853.837.404.977,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar **Rp22.206.545.171.185,00** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp5.853.837.404.977,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **(Rp504.878.381.742,00)** dan Transaksi Antar Entitas



sebesar **Rp7.240.689.993.458,00** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2016 adalah senilai **Rp23.088.519.377.924,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016		%	31 DES 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.661.450.428.918,00	3.375.662.350.209,00	92,19	4.225.609.990.797,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.661.450.428.918,00	3.375.662.350.209,00	92,19	4.225.609.990.797,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	4.620.687.583.000,00	4.564.697.512.607,00	98,80	4.430.817.899.824,00
Belanja Barang	B.2.2	4.039.106.350.000,00	3.557.509.568.239,00	88,08	3.379.462.945.512,00
Bunga		-	-	-	-
Subsidi		-	-	-	-
Hibah		-	-	-	-
Bantuan Sosial		-	-	-	-
Belanja Lain-lain		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		8.659.793.933.000,00	8.122.207.080.846,00	93,80	7.810.280.845.336,00
OPERASI					
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Tanah	B.2.3	3.376.103.000,00	3.235.678.600,00	95,84	10.712.552.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	1.769.599.451.000,00	1.386.628.128.200,00	78,36	653.906.386.079,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.3	1.172.911.733.000,00	1.092.664.206.975,00	93,16	717.554.364.389,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.3	5.716.593.000,00	5.188.407.700,00	90,76	5.632.124.246,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	B.2.3	-	-	-	60.350.400.566,00
Belanja Aset Lainnya	B.2.3	20.244.061.000,00	18.673.799.833,00	92,24	-
JUMLAH BELANJA MODAL		2.971.847.941.000,00	2.506.390.221.308,00	84,34	1.448.155.827.680,00
JUMLAH BELANJA		11.631.641.874.000,00	10.628.597.302.154,00	91,38	9.258.436.673.016,00



II. NERACA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 DES 2016	31 DES 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	3.367.711.321,00	3.954.305.055,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	3.760.180.498,00	8.158.498.587,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	7.881.592.718,00	1.986.166.659,00
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.4	8.072.548.940,00	7.978.520.140,00
Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	C.5	148.130.443.000,00	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	60.336.607,00	39.515.770,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.7	403.072.920.313,00	428.848.797.907,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.8	578.001.038,00	603.419.117,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.9	-370.945.590.980,00	-353.090.152.503,00
Persediaan	C.10	501.457.950.598,00	521.360.073.588,00
Jumlah Aset Lancar		705.436.094.053,00	619.839.144.320,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	838.633.567,00	1.040.822.031,00
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12	12.792.500.000,00	14.370.800.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-79.725.011,00	-159.782.721,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		13.551.408.556,00	15.251.839.310,00
ASET TETAP			
Tanah	C.14	12.573.351.222.603,00	12.511.223.438.259,00
Peralatan dan Mesin	C.15	4.851.425.471.800,00	3.696.443.831.458,00
Gedung dan Bangunan	C.16	9.529.676.487.148,00	8.335.166.890.978,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	94.381.556.994,00	219.702.777.946,00
Aset Tetap Lainnya	C.18	73.266.156.399,00	77.467.890.093,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	423.520.044.331,00	440.414.987.596,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-4.953.345.821.930,00	-4.021.974.585.960,00
Jumlah Aset Tetap		22.592.275.117.345,00	21.258.445.230.370,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	461.681.674.908,00	446.864.487.703,00
Aset Lain-Lain	C.22	232.274.117.943,00	248.012.198.366,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-514.652.274.585,00	-215.060.760.151,00
Jumlah Aset Lainnya		179.303.518.266,00	479.815.925.918,00
JUMLAH ASET		23.490.566.138.220,00	22.373.352.139.918,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	3.358.841.527,00	3.954.305.055,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	175.408.091.116,00	87.090.356.870,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26	176.160.000,00	762.237.850,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	9.157.661,00	36.973.247,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	223.094.509.992,00	74.963.095.711,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		402.046.760.296,00	166.806.968.733,00
JUMLAH KEWAJIBAN		402.046.760.296,00	166.806.968.733,00
EKUITAS			
Ekuitas		23.088.519.377.924,00	22.206.545.171.185,00
JUMLAH EKUITAS		23.088.519.377.924,00	22.206.545.171.185,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.490.566.138.220,00	22.373.352.139.918,00



III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

	CATATAN	30 DES 2016	31 DES 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.165.273.844.117,00	4.264.580.144.852,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.165.273.844.117,00	4.264.580.144.852,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.567.804.535.642,00	4.434.070.015.484,00
Beban Persediaan	D.3	157.923.416.543,00	255.316.182.398,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.339.521.711.965,00	2.023.941.933.253,00
Beban Pemeliharaan	D.5	441.849.879.018,00	420.917.650.883,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	468.275.243.929,00	327.740.781.725,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	298.779.690.183,00	515.658.479.217,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	122.603.050,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	836.164.403.465,00	634.430.458.635,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	17.776.217.241,00	258.700.396.723,00
Beban Lain-Lain	D.10	0,00	4.692.970,00
JUMLAH BEBAN		9.128.095.097.986,00	8.870.903.194.338,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.962.821.253.869,00	-4.606.323.049.486,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-13.836.292.306,00	-7.307.875.263,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	122.820.141.198,00	7.411.549.140,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		108.983.848.892,00	103.673.877,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-5.853.837.404.977,00	-4.606.219.375.609,00
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		-5.853.837.404.977,00	-4.606.219.375.609,00



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 DES 2016	31 DES 2015
EKUITAS AWAL	E.1	22.206.545.171.185,00	21.341.605.273.417,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-5.853.837.404.977,00	-4.606.219.375.609,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	7.785.578.129,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	22.991.058.641,00	2.658.772.361,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	57.174.605.085,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-583.305.722.198,00	37.141.471.862,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-1.738.323.270,00	15.570.406.180,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.240.689.993.458,00	5.408.003.044.845,00
EKUITAS AKHIR		23.088.519.377.924,00	22.206.545.171.185,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	A. PENJELASAN UMUM
<i>Dasar Hukum</i>	A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
<i>Profil dan Rencana Strategis</i>	A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	A.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi



	tanggungjawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; 9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	a. Visi Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: “Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (<i>core bussines</i>) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
	b. Misi Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan



	HAM; e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. c. Nilai Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: 1. Profesional Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2. Akuntabel. Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 3. Sinergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas. 4. Transparan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 5. Inovatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. d. Tujuan Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian
--	---



	adalah: - Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana; - Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; - Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum; - Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; - Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional; - Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.
	A.2.3. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
	1. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Sekretariat Jenderal membawahi 6 (enam) biro, yaitu: - Biro Perencanaan; - Biro Kepegawaian; - Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; - Biro Keuangan; - Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan - Biro Umum.
	2. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
	3. Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang bersifat teknis serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; - Direktorat Jenderal Pemasarakatan; - Direktorat Jenderal Imigrasi; - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.



	4. Badan Badan merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM); dan - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM).
	5. Kantor Wilayah Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di propinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah membawahkan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.
	6. Unit Pelaksana Teknis UPT adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun Anggaran 2015 Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas akuntansi. UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari: - Kantor Imigrasi; - Rumah Detensi Imigrasi; - Lembaga Pemasyarakatan; - Balai Pemasyarakatan; - Rumah Tahanan Negara; - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan - Balai Harta Peninggalan (di lima Kantor Wilayah).
	A.2.4. Restrukturisasi Program dan Kegiatan
	Pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan (RPK). RPK merupakan implementasi dari upaya penataan kembali Program dan Kegiatan sebagaimana rekomendasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Penataan kembali Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada seluruh Unit Eselon I selaku pemangku Program untuk dapat memiliki Satuan Kerja di tingkat



	Wilayah <i>in line</i> secara penganggaran. Dampaknya adalah: - Setiap Unit Eselon I memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah berupa satker Kantor Wilayah; - Satuan Kerja di daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal berpindah menjadi Satuan Kerja Unit Eselon I terkait. Dalam proses penganggarannya maka Satuan Kerja Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas keuangan dan akuntansi, sehingga Kantor Wilayah menjadi 10 (sepuluh) entitas yaitu pemangku anggaran: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Ditjen Administrasi Hukum Umum; 3. Ditjen Pemasarakatan; 4. Ditjen Imigrasi; 5. Ditjen Kekayaan Intelektual; 6. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan; 7. Ditjen Hak Asasi Manusia; 8. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 9. Balitbang HAM; 10. BPSDM. Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap entitas Kantor Wilayah pemangku anggaran Sekretariat Jenderal tidak mengalami perubahan kode Satuan Kerja, sedangkan sembilan entitas baru memiliki kode Satuan Kerja baru. Untuk 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis daerah dan 18 (delapan belas) Perwakilan Luar Negeri seluruhnya mengalami perubahan kode Satuan Kerja karena berpindah Program dari semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal menjadi bernaung di bawah Unit Eselon I terkait. Perubahan kode Eselon I dan kode Satuan Kerja tersebut memenuhi syarat sebagai UPT yang harus dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.05/2012 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga. Proses likuidasi dilaksanakan dengan menyusun Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi menggunakan Aplikasi SAIBA. Adapun jumlah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
--	--



	Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2016					
	Unit Eselon I	Satker Pusat	Satker Kanwil	Satker LN	Satker UPT	TOTAL
	Sekretariat Jenderal	2	33	0	0	35
	Inspektorat Jenderal	1	0	0	0	1
	Ditjen AHU	1	33	0	5	39
	Ditjen Pemasarakatan	1	33	0	613	647
	Ditjen Imigrasi	1	33	18	138	190
	Ditjen Kekayaan Intelektual	1	33	0	0	34
	Ditjen PP	1	33	0	0	34
	Ditjen HAM	1	33	0	0	34
	BPHN	1	33	0	0	34
	Balitbang	1	33	0	0	34
	BPSDM	3	33	0	0	36
	TOTAL	14	330	18	756	1.118
	Terdapat penambahan 5 satuan kerja baru dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang berjumlah 1.113 (seribu seratus tiga belas) satuan kerja. Pada tanggal 26 Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.01 31 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman pelaksanaan perubahan terkait RPK.					
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Eselon I, Kantor Wilayah, serta Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)					



	dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tingkat Kementerian, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
<i>Basis Akuntansi</i>	A.4. BASIS AKUNTANSI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
<i>Pendapatan-LRA</i>	1. Pendapatan- LRA • Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). • Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah Nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan-LO</i>	2. Pendapatan- LO • Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: ○ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan ○ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. ○ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah Nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Belanja</i>	3. Belanja • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan



	belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban	4. Beban • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset	5. Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Aset Lancar	a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: ○ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ○ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. • Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas

	piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang <table><tr><th>Kualitas Piutang</th><th>Uraian</th><th>Penyisihan</th></tr><tr><td>Lancar</td><td>Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>Kurang Lancar</td><td>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan</td><td>10%</td></tr><tr><td>Diragukan</td><td>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan</td><td>50%</td></tr><tr><td rowspan="2">Macet</td><td>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</td><td rowspan="2">100%</td></tr><tr><td>Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</td></tr></table>	Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%	Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%	Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%	Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan															
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%															
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%															
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%															
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%															
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN																
	• Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: ○ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ○ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ○ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.																
Aset Tetap	b. Aset Tetap Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. • Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum																



	kapitalisasi sebagai berikut: - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
<i>Penyusutan Aset Tetap</i>	c. Penyusutan Aset Tetap Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
	- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: - Tanah; - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai



	dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. • Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. • Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap <table><tr><th>Kelompok Aset Tetap</th><th>Masa Manfaat</th></tr><tr><td>Peralatan dan Mesin</td><td>2 s.d. 20 tahun</td></tr><tr><td>Gedung dan Bangunan</td><td>10 s.d. 50 tahun</td></tr><tr><td>Jalan, Jaringan dan Irigasi</td><td>5 s.d 40 tahun</td></tr><tr><td>Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)</td><td>4 tahun</td></tr></table>	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun	Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun	Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat										
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun										
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun										
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun										
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun										
Piutang Jangka Panjang	d. Piutang Jangka Panjang • Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. • TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. • TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. • TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap										



	pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
Aset Lainnya	e. Aset Lainnya • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. • Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. • Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. • Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



	Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud <table><tr><th>Kelompok Aset Tak Berwujud</th><th>Masa Manfaat (tahun)</th></tr><tr><td>Software Komputer</td><td>4</td></tr><tr><td>Franchise</td><td>5</td></tr><tr><td>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</td><td>10</td></tr><tr><td>Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.</td><td>20</td></tr><tr><td>Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan</td><td>25</td></tr><tr><td>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.</td><td>50</td></tr><tr><td>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I</td><td>70</td></tr></table> Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Software Komputer	4	Franchise	5	Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20	Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25	Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50	Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)																
Software Komputer	4																
Franchise	5																
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10																
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20																
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25																
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50																
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70																
Kewajiban	6. Kewajiban - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.																



Ekuitas	7. Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.																																
Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali	8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai 31 Desember 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis <i>cash toward accrual</i> direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.																																
	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, penerimaan dana APBN-P dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: Tabel 5. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2016 <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">2016</th></tr><tr><th>ANGGARAN AWAL</th><th>ANGGARAN SETELAH REVISI</th></tr><tr><td>Pendapatan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pendapatan PNPB</td><td>3,375,662,350,209.00</td><td>3,661,450,428,918.00</td></tr><tr><td>Jumlah Pendapatan</td><td>3,375,662,350,209.00</td><td>3,661,450,428,918.00</td></tr><tr><td>Belanja</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>4,564,697,512,607.00</td><td>4,620,687,583,000.00</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td>3,557,509,568,239.00</td><td>4,039,106,350,000.00</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>2,506,390,221,308.00</td><td>2,971,847,941,000.00</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Sosial</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Belanja</td><td>10,628,597,302,154.00</td><td>11,631,641,874,000.00</td></tr></table>	Uraian	2016		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	Pendapatan			Pendapatan PNPB	3,375,662,350,209.00	3,661,450,428,918.00	Jumlah Pendapatan	3,375,662,350,209.00	3,661,450,428,918.00	Belanja			Belanja Pegawai	4,564,697,512,607.00	4,620,687,583,000.00	Belanja Barang	3,557,509,568,239.00	4,039,106,350,000.00	Belanja Modal	2,506,390,221,308.00	2,971,847,941,000.00	Belanja Bantuan Sosial			Jumlah Belanja	10,628,597,302,154.00	11,631,641,874,000.00
Uraian	2016																																
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI																															
Pendapatan																																	
Pendapatan PNPB	3,375,662,350,209.00	3,661,450,428,918.00																															
Jumlah Pendapatan	3,375,662,350,209.00	3,661,450,428,918.00																															
Belanja																																	
Belanja Pegawai	4,564,697,512,607.00	4,620,687,583,000.00																															
Belanja Barang	3,557,509,568,239.00	4,039,106,350,000.00																															
Belanja Modal	2,506,390,221,308.00	2,971,847,941,000.00																															
Belanja Bantuan Sosial																																	
Jumlah Belanja	10,628,597,302,154.00	11,631,641,874,000.00																															



Realisasi Pendapatan (Netto) Rp3.375.662.350.209,00	B.1.PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (Brutto) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.661.450.428.918,00 dan (Netto) sebesar Rp3.375.662.350.209,00 atau mencapai 92,20% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.661.450.428.918,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis pendapatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain: a. Pendapatan jasa berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi); perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual); penerimaan jasa Fidusia (Ditjen Administrasi Hukum Umum); b. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditinggali oleh PNS; c. Pendapatan lain-lain berasal dari penggantian paspor rusak yang disebabkan oleh kelalaian manusia (Ditjen Imigrasi); d. Pendapatan dari hasil karya napi; e. Pendapatan bunga lainnya merupakan pendapatan giro bank.																																			
	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel berikut: Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 <table><tr><th>MAP</th><th>Uraian</th><th>Estimasi (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>4231</td><td>Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan</td><td>5.699.550.184,00</td><td>13.855.543.338,00</td><td>243,10</td></tr><tr><td>4232</td><td>Pendapatan Jasa</td><td>3.653.726.120.234,00</td><td>3.328.281.589.121,00</td><td>91,09</td></tr><tr><td>4237</td><td>Pendapatan Iuran dan Denda</td><td>-</td><td>3.115.206.957,00</td><td>-</td></tr><tr><td>4239</td><td>Pendapatan Lain-Lain</td><td>15.268.500,00</td><td>30.410.010.793,00</td><td>199.168,29</td></tr><tr><td>4241</td><td>Pendapatan Jasa Layanan Umum</td><td>2.009.490.000,00</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>3.661.450.428.918,00</td><td>3.375.662.350.209,00</td><td>92,19</td></tr></table>	MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	5.699.550.184,00	13.855.543.338,00	243,10	4232	Pendapatan Jasa	3.653.726.120.234,00	3.328.281.589.121,00	91,09	4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	3.115.206.957,00	-	4239	Pendapatan Lain-Lain	15.268.500,00	30.410.010.793,00	199.168,29	4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.009.490.000,00	-	-	Jumlah		3.661.450.428.918,00	3.375.662.350.209,00	92,19
MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%																																
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	5.699.550.184,00	13.855.543.338,00	243,10																																
4232	Pendapatan Jasa	3.653.726.120.234,00	3.328.281.589.121,00	91,09																																
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	3.115.206.957,00	-																																
4239	Pendapatan Lain-Lain	15.268.500,00	30.410.010.793,00	199.168,29																																
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.009.490.000,00	-	-																																
Jumlah		3.661.450.428.918,00	3.375.662.350.209,00	92,19																																
	Adapun estimasi dan realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:																																			



Tabel 7.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapsatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2015

MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	359.527.566,00	14.066.657.985,00	3.912,54
4232	Pendapatan Jasa	4.252.176.616.000,00	4.151.481.544.768,00	97,63
4233	Pendapatan Bunga	-	196.005,00	-
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	694.000,00	-
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	-	2.020.000,00	-
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	1.678.446.172,00	-
4239	Pendapatan Lain-Lain	8.326.050,00	58.380.431.867,00	701.178,01
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	30.000.000,00	-	-
Jumlah		4.252.574.469.616,00	4.225.609.990.797,00	99,37

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015:

Tabel 8.
Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
3.375.662.350.209,00	4.225.609.990.797,00	(849.947.640.588,00)	79,89

Berdasarkan Tabel 9 di atas, realisasi PNBPN per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp849.947.640.588,00 atau 79,89% dibandingkan per 31 Desember 2015.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan				
MAK	Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	1.200.000,00	185.422.600,00	15.451,88
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	100.000.000,00	2.528.717.281,00	2.528,72
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	63.451.000,00	297.604.946,00	469,03
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	14.900.000,00	69.921.150,00	469,27
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	149.758.000,00	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.900.000,00	2.064.116.886,00	9.876,16
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.189.410.184,00	6.947.855.231,00	165,84
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	403.969.000,00	21.274.300,00	5,27
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	905.720.000,00	1.590.872.944,00	175,65
Jumlah		5.699.550.184,00	13.855.543.338,00	243,10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:				
Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa				
MAK	Pendapatan Jasa	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	-	21.106.400,00	-
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	2.571.427.611.000,00	1.952.356.539.019,00	75,93
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	1.070.164.439.000,00	1.367.820.762.152,00	127,81
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	-	400.000,00	-
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Kementerian	8.601.300.000,00	2.694.495.291,00	31,33
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	19.421.000,00	1.227.779.170,00	6.321,92
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	-	2.789.550.000,00	-
423272	Pendapatan Yang Berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	-	323.986.012,00	-
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	3.513.349.234,00	1.046.971.077,00	29,80
Jumlah		3.653.726.120.234,00	3.328.281.589.121,00	91,09



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda

MAK	Pendapatan Iuran dan Denda	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	3.107.506.677,00	-
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	-	7.700.280,00	-
Jumlah		-	3.115.206.957,00	-

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

MAK	Pendapatan Lain-Lain	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423921	Non Bendahara Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	151,450,656.00	-
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	5,179,500.00	503,746,034.00	9,725.77
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1,355,188,163.00	-
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	10,000,000.00	4,764,272,676.00	47,642.73
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	10,547,752,819.00	-
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain- Lain TAYL	89,000.00	-	-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	25,584,566.00	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	13,062,015,879.00	-
Jumlah		15,268,500.00	30,410,010,793.00	199,168.29

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:



</



	Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja				
	Jenis Belanja	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%	
	Belanja Pegawai	4.620.687.583.000,00	4.564.697.512.607,00	98,79	
	Belanja Barang	4.039.106.350.000,00	3.557.509.568.239,00	88,08	
	Belanja Modal	2.971.847.941.000,00	2.506.390.221.308,00	84,34	
	TOTAL	11.631.641.874.000,00	10.628.597.302.154,00	91,38	
	Berikut Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 menurut Organisasi (Unit Eselon I):				
	Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I				
	No.	ESELON 1	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
	1	SETJEN	2.554.997.139.000,00	2.525.758.812.853,00	98,86
	2	ITJEN	36.787.404.000,00	35.592.016.672,00	96,75
	3	DITJEN AHU	738.609.180.000,00	571.729.769.339,00	77,41
	4	DITJEN PAS	5.526.377.962.000,00	5.047.440.904.189,00	91,34
	5	DITJEN IMIGRASI	2.251.231.790.000,00	1.984.478.101.675,00	88,15
	6	DITJEN HKI	179.029.987.000,00	145.617.498.541,00	81,34
7	DITJEN PP	56.690.728.000,00	46.899.513.602,00	82,73	
8	DITJEN HAM	39.862.552.000,00	38.333.055.013,00	96,16	
9	B P H N	104.198.311.000,00	97.007.291.593,00	93,10	
10	BALITBANG HAM	30.557.685.000,00	29.311.948.449,00	95,92	
11	B P S D M	113.299.136.000,00	106.428.390.228,00	93,94	
	JUMLAH	11.631.641.874.000,00	10.628.597.302.154,00	91,38	
Belanja Pegawai Rp4.564.697.512.607,00	B.2.1. Belanja Pegawai				
	Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.564.697.512.607,00 atau 98,79% dari pagu sebesar Rp4.620.687.583.000,00.				
	Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum				



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.					
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:						
Tabel 17.						
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2016						
Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,843,597,815,606.00	1,830,682,578,343.00	210,173,498.00	1,830,472,404,845.00	99.29
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52,468,800.00	31,494,158.00	942,840.00	30,551,318.00	58.23
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	127,659,803,606.00	124,421,328,858.00	36,860,519.00	124,384,468,339.00	97.43
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,216,101,501.00	35,897,810,221.00	6,017,826.00	35,891,792,395.00	96.44
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	65,899,405,000.00	63,637,805,278.00	68,396,605.00	63,569,408,673.00	96.46
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	93,806,358,732.00	91,026,607,158.00	101,286,172.00	90,925,320,986.00	96.93
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,140,616,888.00	18,100,636,941.00	610,640.00	18,100,026,301.00	89.87
511126	Belanja Tunj. Beras	106,946,296,443.00	103,607,087,460.00	4,517,252.00	103,602,570,208.00	96.87
511129	Belanja Uang Makan PNS	349,806,292,424.00	330,726,416,809.00	70,565,486.00	330,655,851,323.00	94.53
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil PNS	438,675,000.00	381,575,000.00	-	381,575,000.00	86.98
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	5,658,600,000.00	5,579,910,000.00	4,430,000.00	5,575,480,000.00	98.53
511145	Belanja Tunj. Penghidupan LN utk Home Staf PNS	147,432,000.00	139,319,488.00	-	139,319,488.00	94.50
511147	Belanja Tunj. Lain-Lain trmasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	177,176,000.00	15,657,000.00	-	15,657,000.00	8.84
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	28,835,343,000.00	25,011,955,000.00	272,164,239.00	24,739,790,761.00	85.80
511192	Belanja Tunj. Lain-Lain trmsuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	26,570,000.00	-	-	-	-
512211	Belanja Uang Lembur	28,186,190,000.00	24,971,126,060.00	5,802,550.00	24,965,323,510.00	88.57
512411	Belanja Peg. Tunj Khusus/Keg	1,911,533,108,000.00	1,911,247,972,460.00	-	1,911,247,972,460.00	99.99
512412	Belanja Peg. Trnasito	559,330,000.00	-	-	-	-
Jumlah		4,620,687,583,000.00	4,565,479,280,234.00	781,767,627.00	4,564,697,512,607.00	98.79
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel berikut:						



	Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015			
	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
	4.564.697.512.607,00	4.430.817.899.824,00	133.879.612.783,00	3,02
	Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp133.879.612.783,00 atau sebesar 3,02% dibandingkan 31 Desember 2015.			
Belanja Barang Rp3.557.509.568.239,00	B.2.2. Belanja Barang			
	Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.557.509.568.239,00 atau 88,08% dari pagu sebesar Rp4.039.106.350.000,00. Realisasi belanja barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.379.462.945.512,00 atau mencapai 72,39% dari anggarannya sebesar Rp4.668.629.650.400,00. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel berikut:			
	Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015			
	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
	3.557.509.568.239,00	3.379.462.945.512,00	178.046.622.727,00	5,27
	Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp178.046.622.727,00 atau sebesar 5,27% dibandingkan 31 Desember 2015.			
	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel berikut:			



Tabel 20.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.291.448.191.935,00	1.251.320.590.988,00	520.023.840,00	1.250.800.567.148,00	96,85
5212	Belanja Barang Non Operasional	550.856.678.656,00	442.735.574.309,00	549.229.513,00	442.186.344.796,00	80,27
5218	Belanja Barang Persediaan	418.491.912.362,00	401.555.342.736,00	330.000,00	401.555.012.736,00	95,95
5221	Belanja Jasa	681.884.936.980,00	570.909.946.810,00	727.597.201,00	570.182.349.609,00	83,62
5231	Belanja Pemeliharaan	464.217.440.723,00	422.662.977.755,00	78.117.966,00	422.584.859.789,00	91,03
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	529.866.590.000,00	430.330.236.599,00	11.987.647.135,00	418.342.589.464,00	78,95
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	102.298.399.344,00	60.390.920.797,00	8.575.231.950,00	51.815.688.847,00	50,65
5261	Belanja utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	42.200.000,00	42.155.850,00	-	42.155.850,00	99,90
Jumlah		4.039.106.350.000,00	3.579.947.745.844,00	22.438.177.605,00	3.557.509.568.239,00	88,08

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Kantor	212.746.181.757,00	201.405.298.727,00	13.949.000,00	201.391.349.727,00	94,66
521112	Belanja Pengadaan BaMal	913.026.552.000,00	897.209.493.128,00	403.863.795,00	896.805.629.333,00	98,22
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	41.727.657.492,00	38.440.351.723,00	3.682.445,00	38.436.669.278,00	92,11
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.241.512.000,00	8.217.044.085,00	-	8.217.044.085,00	88,91
521115	Belanja Honor Operasional Satker	65.474.980.020,00	62.003.470.488,00	95.518.000,00	61.907.952.488,00	94,55
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.231.308.666,00	44.044.932.837,00	3.010.600,00	44.041.922.237,00	89,46
Jumlah		1.291.448.191.935,00	1.251.320.590.988,00	520.023.840,00	1.250.800.567.148,00	96,85

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 22.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	223.301.716.000,00	179.793.485.517,00	91.868.863,00	179.701.616.654,00	80,47
521213	Belanja Honor Output	48.090.184.000,00	39.198.533.049,00	104.191.375,00	39.094.341.674,00	81,29
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan LN	73.043.000,00	24.851.226,00	-	24.851.226,00	34,02
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	6.000.000,00	-	-	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional	279.385.735.656,00	223.718.704.517,00	353.169.275,00	223.365.535.242,00	79,95
Jumlah		550.856.678.656,00	442.735.574.309,00	549.229.513,00	442.186.344.796,00	80,27

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	122.900.143.362,00	115.458.547.065,00	330.000,00	115.458.217.065,00	93,94
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	379.658.000,00	337.948.720,00	-	337.948.720,00	89,01
521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	4.898.570.000,00	3.895.613.710,00	-	3.895.613.710,00	79,53
521822	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses	10.899.674.000,00	10.775.377.630,00	-	10.775.377.630,00	98,86
521831	Belanja Barang Persediaan utk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	373.964.000,00	355.558.150,00	-	355.558.150,00	95,08
521832	Belanja Barang Persediaan Persediaan Lainnya	279.039.903.000,00	270.732.297.461,00	-	270.732.297.461,00	97,02
Jumlah		418.491.912.362,00	401.555.342.736,00	330.000,00	401.555.012.736,00	95,95



Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	143,791,744,808.00	127,747,874,889.00	58,991,834.00	127,688,883,055.00	88.80
522112	Belanja Langganan Telepon	11,947,896,928.00	7,273,286,695.00	-	7,273,286,695.00	60.88
522113	Belanja Langganan Air	17,526,114,000.00	13,941,689,880.00	-	13,941,689,880.00	79.55
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	18,079,882,000.00	15,653,855,692.00	-	15,653,855,692.00	86.58
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	6,292,479,694.00	4,767,268,328.00	279,120.00	4,766,989,208.00	75.76
522131	Belanja Jasa Konsultan	138,678,100,000.00	128,515,061,246.00	-	128,515,061,246.00	92.67
522141	Belanja Sewa	194,394,043,550.00	160,039,413,803.00	84,269,097.00	159,955,144,706.00	82.28
522151	Belanja Jasa Profesi	74,807,397,000.00	57,927,242,393.00	570,173,750.00	57,357,068,643.00	76.67
522191	Belanja Jasa Lainnya	76,367,279,000.00	55,044,253,884.00	13,883,400.00	55,030,370,484.00	72.06
Jumlah		681,884,936,980.00	570,909,946,810.00	727,597,201.00	570,182,349,609.00	83.62

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230.084.443.450,00	223.989.917.698,00	19.625.966,00	223.970.291.732,00	97,34
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.615.042.000,00	4.265.334.805,00	-	4.265.334.805,00	92,42
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.162.566.000,00	2.093.039.249,00	10.925.000,00	2.082.114.249,00	96,28
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	212.090.700.273,00	179.310.600.745,00	47.567.000,00	179.263.033.745,00	84,52
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	1.225.076.000,00	732.979.819,00	-	732.979.819,00	59,83



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.708.387.000,00	3.293.225.630,00	-	3.293.225.630,00	88,80
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.683.026.000,00	7.909.109.892,00	-	7.909.109.892,00	91,09
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	30.000.000,00	29.689.000,00	-	29.689.000,00	98,96
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	469.086.000,00	402.460.607,00	-	402.460.607,00	85,80
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	11.982.000,00	9.565.000,00	-	9.565.000,00	79,83
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	40.088.000,00	40.045.200,00	-	40.045.200,00	99,89
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.097.044.000,00	587.010.110,00	-	587.010.110,00	53,51
Jumlah		464.217.440.723,00	422.662.977.755,00	78.117.966,00	422.584.859.789,00	91,03

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	314,903,631,000.00	261,024,298,700.00	7,208,431,972.00	253,815,866,728.00	80.60
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,978,712,000.00	43,232,223,879.00	55,779,700.00	43,176,444,179.00	75.78
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	61,026,602,000.00	49,336,232,778.00	836,602,958.00	48,499,629,820.00	79.47
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,957,645,000.00	76,737,481,242.00	3,886,832,505.00	72,850,648,737.00	75.14
Jumlah		529,866,590,000.00	430,330,236,599.00	11,987,647,135.00	418,342,589,464.00	78.95

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	74,460,502,000.00	44,348,029,768.00	7,827,544,270.00	36,520,485,498.00	49.05
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	100.00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	27,792,897,344.00	15,997,891,029.00	747,687,680.00	15,250,203,349.00	54.87
Jumlah		102,298,399,344.00	60,390,920,797.00	8,575,231,950.00	51,815,688,847.00	50.65



Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Brutto (Rp)	Pengembalian	Realisasi Netto (Rp)	%
526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan utk Diserahkan kepada Masyarakat	42.200.000	42.155.850	0	42.155.850	99,9
TOTAL		42.200.000	42.155.850	0	42.155.850	99,9

Belanja Modal
Rp2.506.390.221.308,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.506.390.221.308,00 atau 84,34% dari pagu Rp2.971.847.941.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 29.
Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	3,376,103,000.00	3,235,678,600.00	-	3,235,678,600.00	95.84
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,769,599,451,000.00	1,386,628,128,200.00	-	1,386,628,128,200.00	78.36
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,172,911,733,000.00	1,094,231,617,301.00	1,567,410,326.00	1,092,664,206,975.00	93.16
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,716,593,000.00	5,188,407,700.00	-	5,188,407,700.00	90.76
5361	Belanja Modal Lainnya	20,244,061,000.00	18,673,799,833.00	-	18,673,799,833.00	92.24
Jumlah		2,971,847,941,000.00	2,507,957,631,634.00	1,567,410,326.00	2,506,390,221,308.00	84.34

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut:



Tabel 30.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	7,000,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	50.00
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	3,356,603,000.00	3,221,313,000.00	-	3,221,313,000.00	95.97
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	12,500,000.00	10,865,600.00	-	10,865,600.00	86.92
Jumlah		3,376,103,000.00	3,235,678,600.00	-	3,235,678,600.00	95.84

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,532,614,807,000.00	1,150,531,534,872.00	-	1,150,531,534,872.00	75.07
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola teknis	97,660,000.00	87,220,000.00	-	87,220,000.00	89.31
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	54,160,000.00	-	-	-	-
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	17,450,000.00	-	-	-	-
532121	Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	236,815,374,000.00	236,009,373,328.00	-	236,009,373,328.00	99.66
Jumlah		1,769,599,451,000.00	1,386,628,128,200.00	-	1,386,628,128,200.00	78.36



Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	932.934.091.000,00	882.571.315.990,00	1.541.482.091,00	881.029.833.899,00	94,44
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	45.977.000,00	8.714.000,00	-	8.714.000,00	18,95
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	488.629.000,00	198.557.487,00	-	198.557.487,00	40,64
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	1.342.115.000,00	960.500.000,00	-	960.500.000,00	71,57
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	55.337.476.000,00	48.438.681.763,00	24.219.000,00	48.414.462.763,00	87,49
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	-	-	-	-
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	51.500.000,00	39.960.750,00	-	39.960.750,00	77,59
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	182.681.945.000,00	162.013.887.311,00	1.709.235,00	162.012.178.076,00	88,69
Jumlah		1.172.911.733.000,00	1.094.231.617.301,00	1.567.410.326,00	1.092.664.206.975,00	93,16

Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
534121	Belanja Modal Irigasi	45.000.000,00	43.680.000,00	-	43.680.000,00	97,07
534131	Belanja Modal Jaringan	5.107.093.000,00	4.594.141.905,00	-	4.594.141.905,00	89,96
53461	Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	564.500.000,00	550.585.795,00	-	550.585.795,00	97,54
Jumlah		5.716.593.000,00	5.188.407.700,00	-	5.188.407.700,00	90,76



Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34.
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016

Kode	Rincian Belanja	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	19,948,812,000.00	18,384,915,833.00	-	18,384,915,833.00	92.16
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	295,249,000.00	288,884,000.00	-	288,884,000.00	97.84
Jumlah		20,244,061,000.00	18,673,799,833.00	-	18,673,799,833.00	92.24



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp3.367.711.321,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.367.711.321,00 dan Rp3.954.305.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	619.801.845,00	98.305.187,00
Rekening Bank	2.747.909.476,00	3.855.999.868,00
Jumlah	3.367.711.321,00	3.954.305.055,00

Tabel 35.

Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Unit Eselon I	Rincian Saldo di Kas BP	
		2016	2015
1	Sekretariat Jenderal	220.906.551,00	1.887.115.988,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen AHU	111,00	185.874.876,00
4	Ditjen Pemasarakatan	506.537.014,00	196.079.050,00
5	Ditjen Imigrasi	2.632.297.645,00	1.425.508.653,00
6	Ditjen KI	0,00	3.550.000,00
7	Ditjen PP	0,00	10.788.000,00
8	Ditjen HAM	6.470.000,00	0,00
9	B P H N	0,00	40.497.380,00
10	Balitbang HAM	0,00	0,00
11	B P S D M	1.500.000,00	204.891.108,00
TOTAL		3.367.711.321,00	3.954.305.055,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 36.
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Kanwil Setjen Manado	117,650.00	Sisa UP TA. 2016
		30,924,851.00	Sisa TUP TA.2016
2	Pusat data dan Teknologi Informasi	189,864,050.00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	220,906,551.00	
	Ditjen AHU		
3	Kanwil AHU Papua	111.00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	111.00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
4	Rutan Medan	128,028,000.00	Sisa TUP TA.2016
5	Bapas Kendari	646.00	Sisa UP TA. 2016
6	Bapas Semarang	1,514,900.00	Sisa TUP TA.2016
7	Rutan Labuhan Deli	63,988,000.00	Sisa TUP TA.2016
8	Lapas Pematang Siantar	58,910,000.00	Sisa TUP TA.2016
9	Cabang Rutan Gunung Tua	32,019,757.00	Sisa UP TA. 2016
		450,000.00	Sisa TUP TA.2016
10	Lapas Pontianak	50,000,000.00	Sisa UP TA. 2016
		90,000,000.00	Sisa TUP TA.2016
11	Rutan Raba/Bima	871.00	Sisa UP TA. 2016
12	Rutan Bajawa	8,424,381.00	Sisa UP TA. 2016
13	Rutan Maumere	8,172,000.00	Sisa TUP TA.2016
14	Kanwil Pas Manado	16,439,000.00	Sisa UP TA. 2016
15	Kanwil Pas Palu	15,463,000.00	Sisa UP TA. 2016
16	Lapas Wanita Palembang	2,032,200.00	Sisa TUP TA.2016
17	Rutan Putussibau	490,000.00	Sisa UP TA. 2016
18	Rupbasan Surabaya	5,541,000.00	Sisa TUP TA.2016
19	Rupbasan Jayapura	5,849,000.00	Sisa TUP TA.2016
20	Lapas Narkotika Cirebon	8,056,400.00	Sisa UP TA. 2016
		7,444,500.00	Sisa TUP TA.2016
21	Rupbasan Pangkal Pinang	2,179,359.00	Sisa TUP TA.2016
22	Lapas Anak Mataram	1,534,000.00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	506,537,014.00	
	Ditjen Imigrasi		
23	Kantor Imigrasi Cirebon	1,600,000.00	Sisa UP TA. 2016
24	Kantor Imigrasi Pontianak	9,780,000.00	Sisa UP TA. 2016
25	Perwakilan Imigrasi Di Singapura	2,688.00	Sisa UP TA. 2016
26	Perwakilan Imigrasi Di Kuala Lumpur	369,483,954.00	Sisa UP TA. 2016
27	Perwakilan Imigrasi Di Penang	23,431,175.00	Sisa UP TA. 2016
28	Perwakilan Imigrasi Di Bangkok	42,331,299.00	Sisa UP TA. 2016
		(1,119,191.00)	Sisa TUP TA.2016
29	Perwakilan Imigrasi Di Hongkong	5,478,260.00	Sisa UP TA. 2016
30	Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	34,283,784.00	Sisa UP TA. 2016
		57,020.00	Sisa TUP TA.2016
31	Perwakilan Imigrasi Di Davao	609,344,769.00	Sisa UP TA. 2016
32	Perwakilan Imigrasi Di Den Haag	44,041,730.00	Sisa UP TA. 2016
33	Perwakilan Imigrasi Di Berlin	92,152,956.00	Sisa UP TA. 2016
34	Perwakilan Imigrasi Di Sidney	52,920,642.00	Sisa UP TA. 2016
35	Perwakilan Imigrasi Di Kuching	(240,657,211.00)	Sisa UP TA. 2016
		252,120,000.00	Sisa TUP TA.2016
36	Perwakilan Imigrasi Di Tawao	304,529,278.00	Sisa UP TA. 2016
		758,409.00	Sisa TUP TA.2016



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37	Perwakilan Imigrasi Di Los Angeles	273.048.811,00	Sisa UP TA. 2016
38	Kantor Imigrasi Ambon	3.836.000,00	Sisa TUP TA. 2016
39	Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	115.139.293,00	Sisa UP TA. 2016
		174.632.769,00	Sisa TUP TA. 2016
40	Perwakilan Imigrasi Di Beijing	230.250.180,00	Sisa UP TA. 2016
41	Perwakilan Imigrasi Di Johor Bahru	61.096.314,00	Sisa UP TA. 2016
42	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Imigrasi Timor Leste	48.128.558,00	Sisa UP TA. 2016
43	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	66.335,00	Sisa UP TA. 2016
44	Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di Rrc	125.559.823,00	Sisa UP TA. 2016
	SUBTOTAL	2.632.297.645,00	
	Ditjen HAM		
45	Kanwil Ditjen HAM Sulawesi Barat	6.470.000,00	Sisa TUP TA. 2016
	SUBTOTAL	6.470.000,00	
	BPSDM		
46	Kanwil BPSDM Manado	1.500.000,00	Sisa UP TA. 2016
	SUBTOTAL	1.500.000,00	
	TOTAL	3.367.711.321,00	

Terkait Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang minus pada satker Perwakilan Imigrasi di Kuching sebesar Rp247.072.132,00 dan Perwakilan Imigrasi di Bangkok sebesar Rp1.119.191,00 merupakan pengembalian sisa UP/TUP yang lebih akibat adanya selisih perhitungan kurs nilai mata uang pada saat tanggal penyetoran. Bagi seluruh satker yang terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran telah melakukan penyetoran Sisa UP/TUP senilai sebagaimana tersebut diatas pada bulan Januari 2017.

*Kas di
 Bendahara
 Penerimaan
 Rp3.760.180.498,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp3.760.180.498,00 dan Rp8.158.498.587,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	2.400.000,00	0,00
Rekening Bank	3.757.780.498,00	8.158.498.587,00
Jumlah	3.760.180.498,00	8.158.498.587,00



Tabel 37.
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Kas di Bend. Penerimaan	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	250.000,00	55.270.108,00
Ditjen Pemasyarakatan	2.400.000,00	0,00
Ditjen Imigrasi	148.885.000,00	6.108.167.700,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	3.608.645.498,00	1.995.060.779,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00
TOTAL	3.760.180.498,00	8.158.498.587,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel 38.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Satuan kerja
Per 31 Desember 2016

No	Kanwil/Eselon I	Saldo (Rp)	Keterangan
1.	Satker Ditjen AHU	250.000,00	PNBP pelayanan jasa hukum untuk pelayanan permintaan surat keterangan wasiat yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2016
2	Lapas Muara Tebo	2.400.000,00	Pendapatan sewa untuk kantin yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal 31 Desember 2016, atas penerimaan ini telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2017 dengan NTPN 5BBPC55MOF98B4D0
3	Satker Ditjen Imigrasi	148.885.000,00	Pendapatan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) tahun 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetor ke kas negara.
4.	Satker Ditjen KI	3.608.645.498,00	Merupakan saldo bank atas transaksi Pelayanan Hukum di DJKI yang belum disetorkan per 31 Desember 2016.
TOTAL		3.760.180.498,00	

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.608.645.498,00 pada satker unit pusat Ditjen KI sampai dengan 31 Maret 2017 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.569.180.500,00. Sehingga masih terdapat sisa saldo kas yang belum disetorkan sebesar Rp2.039.464.998,00.



Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp7.881.592.7
18,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.881.592.718,00 dan Rp1.986.166.659,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2016 dan 2015*

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	79.214.312,00	87.359.590,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	6.759.003.889,00	0,00
Kas Lainnya dari Hibah	1.043.374.517,00	1.898.807.069,00
Jumlah	7.881.592.718,00	1.986.166.659,00

Tabel 39.
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Kas Lainnya dan Setara Kas	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	66.304.208,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	6.759.003.889,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	1.119.543.829,00	1.902.362.451,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	17.500.000,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	3.045.000,00	0,00
TOTAL	7.881.592.718,00	1.986.166.659,00

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada satuan kerja disajikan dalam lampiran.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 40.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016

No	Kanwil/Eselon I	Saldo (Rp)	Keterangan
	Ditjen AHU		
1	BHP Jakarta	1.743.842.843,00	Merupakan dana Uang Pihak Ketiga berupa Uang Kepailitan yang belum dibagikan kepada masing-masing debitur.
2	BHP Medan	444.227.043,00	
3	BHP Semarang	2.507.132.644,00	
4	BHP Surabaya	2.063.801.359,00	
	SUBTOTAL	6.759.003.889,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
5	Lapas Narkotika Yogyakarta	2.657.000,00	Pengembalian belanja pegawai yang disetorkan pada tanggal 03 Januari 2017.
6	Rutan Banyumas	435.901,00	Pendapatan bunga jasa bank yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
7	Lapas Permisan	6.112.661,00	Sisa pengembalian tunjangan kinerja TA 2016 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2016
8	Cabang Rutan Beureun	66.963.750,00	Sisa pengembalian tunjangan kinerja TA 2016 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2016
9	Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan	92.073.597,00	Pengembalian sisa hibah uang yang belum disahkan karena revisi DIPA untuk mencatat sisa hibah untuk dibuat SP4HL tidak dapat dilakukan tanpa perjanjian hibah.
10	Lapas Narkotika Kelas III Samarinda	951.300.920,00	Sisa hibah uang dari Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2012. Sisa dana hibah ini belum dapat digunakan kembali karena nomor register dan perjanjian hibah berumur hanya 1 tahun, sementara untuk pengajuan revisi DIPA agar dana tersebut dapat digunakan kembali membutuhkan perjanjian hibah yang memayungi secara hukum penggunaan hibah tersebut.
	SUBTOTAL	1.119.543.829,00	
	BPSDM		
11	Akademi Ilmu Pemasyarakatan	3.045.000,00	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2016
	SUBTOTAL	3.045.000,00	
	TOTAL	7.881.592.718,00	

Terdapat kas dan setara kas lainnya di BHP Ditjen AHU yang merupakan dana pihak ketiga sebesar Rp53.882.960.647,00. Dana pihak ketiga tersebut antara lain berupa harta benda orang yang sukar dicari yang baru dapat disetorkan ke negara setelah 33 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai kas dan setara kas lainnya. Adapun rincian satuan kerja yang memiliki dana pihak ketiga sebagai berikut :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kanwil/Eselon I	Saldo (Rp)	Keterangan
	Ditjen AHU		
1	BHP Jakarta	31.409.111.689,00	Merupakan dana pihak ketiga yang antara lain berupa harta benda orang yang sukar dicari yang baru dapat disetorkan ke negara setelah 33 tahun
2	BHP Medan	1.607.130.247,00	
3	BHP Semarang	2.469.320.002,00	
4	BHP Ujung Pandang	282.510.171,00	
5	BHP Surabaya	18.114.888.538,00	
	SUBTOTAL	53.882.960.647,00	

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp8.072.548.940,00

C. 4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp8.072.548.940,00 dan Rp7.978.520.140,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
TA 2016 dan 2015*

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	1.425.342.852,00	3.129.770.900,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	6.647.206.088,00	4.848.749.240,00
Jumlah	8.072.548.940,00	7.978.520.140,00

Tabel 41.
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	83.424.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	1.425.342.852,00	3.046.346.900,00
Ditjen Pemasarakatan	293.800.538,00	291.666.666,00
Ditjen Imigrasi	6.353.405.550,00	4.557.082.574,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00
TOTAL	8.072.548.940,00	7.978.520.140,00



Tabel 42.
Rincian Kas Belanja Dibayar Di Muka berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2016

No	Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	
		2016	Keterangan
	Ditjen AHU		
1	BHP Surabaya	7.445.467,00	Terdapat pengeluaran belanja barang dibayar dimuka berupa Sewa kendaraan operasional yang masa kontraknya berakhir pada TA. 2017
2	Kanwil Surabaya	29.178.293,00	
3	Kanwil Pekanbaru	45.338.754,00	
4	Kanwil Palembang	14.110.800,00	
5	Kanwil Lampung	161.742.240,00	
6	Kanwil Jambi	24.552.000,00	
7	Kanwil Banten	70.812.000,00	
8	Kanwil Bangka Belitung	27.530.667,00	
9	Kanwil Gorontalo	24.777.083,00	
10	Kanwil Sulawesi	2.116.400,00	
11	Kantor Pusat Ditjen AHU	1.017.739.148,00	
	SUBTOTAL	1.425.342.852,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
12	Rupbasan Jakarta Selatan	293.800.538,00	Pengeluaran Belanja Barang dibayar dimuka berupa sewa kantor yang masa kontraknya melebihi TA.2016
	SUBTOTAL	293.800.538,00	
	Ditjen Imigrasi		
13	Kanwil Jakarta Selatan	4.353.405.550,00	Pengeluaran Belanja Barang dibayar dimuka berupa sewa kantor yang masa kontraknya melebihi TA.2016
14	Kanwil Jakarta Utara	2.000.000.000,00	
	SUBTOTAL	6.353.405.550,00	
	TOTAL	8.072.548.940,00	

Uang Muka
Belanja
Rp148.130.443
.000,00

C. 5 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp148.130.443.000,00 dan Rp0,00. Uang muka belanja merupakan pemberian uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban atas dasar suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja Belanja
TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Uang Muka Belanja Modal	148.130.443.000,00	0,00
Jumlah	148.130.443.000,00	0,00

Tabel 43.
Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	148.130.443.000,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00
TOTAL	148.130.443.000,00	0,00

Uang muka belanja modal sebesar Rp148.130.443.000,00 terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan atas pekerjaan pengadaan barang (peralatan dan mesin) yang sampai dengan akhir pelaporan barang-barang tersebut belum didistribusikan ke satker penerima. Adapun rincian pekerjaan pengadaan barang yang belum didistribusikan sebagai berikut :

No	Paket Pengadaan	Saldo (Rp)	Keterangan
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Senjata Bubuk Merica	39.245.837.200,00	Seluruh barang belum didistribusikan ke satker penerima
2	Senjata Gas Air Mata	38.868.824.800,00	Seluruh barang belum didistribusikan ke satker penerima
3	Screening 3D System	61.328.421.000,00	Terdapat 27 unit barang yang belum didistribusikan ke satker penerima.
4	Alat pendeteksi Narkoba Handled	8.687.360.000,00	Terdapat 8 unit barang yang belum didistribusikan ke satker penerima
	SUBTOTAL	148.130.443.000,00	

Selain itu, terdapat pengadaan Alat Pemindai Besar sebanyak 29 unit senilai Rp156.355.904.100,00 dari total pengadaan sebesar Rp323.494.974.000,00 sampai dengan 31 Desember 2016 juga belum didistribusikan ke satker



pengguna, sehingga total Uang Muka Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp304.486.347.100,00. Kemenkumham tidak melakukan koreksi karena sistem pencatatan telah ditutup pada tanggal 27 April 2017 (saat Nota Kesepakatan Angka Asersi Final ditandatangani).

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp60.336.607,
00

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp60.336.607,00 dan Rp39.515.770,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2016 dan 2015*

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	59.618.112,00	35.994.969,00
Pendapatan Jasa	718.495,00	3.520.801,00
Jumlah	60.336.607,00	39.515.770,00

Tabel 44.

Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	24.336.607,00	1.565.449,00
Ditjen Imigrasi	36.000.000,00	3.000.000,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	34.950.321,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00
TOTAL	60.336.607,00	39.515.770,00

Rincian atas Transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2016 dapat disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 45.
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2016

No	Unit Eselon I	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
		2016	Keterangan
	Ditjen Pemasarakatan		
1	Rutan Surabaya	718.495,00	Pendapatan yang masih harus diterima berupa jasa hasil bimbingan kerja narapidana atas pembuatan roti dan jasa laundry.
2	Lapas Kalisosok	23.618.112,00	Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa atas usaha laundry.
	SUBTOTAL	24.336.607,00	
	Ditjen Imigrasi		
3	Kanim Soekarno-Hatta	36.000.000,00	Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa gedung.
	SUBTOTAL	36.000.000,00	
	TOTAL	60.336.607,00	

Piutang PNB
Rp403.072.920.313,00

C.7 Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp403.072.920.313,00 dan Rp428.848.797.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Piutang PNB	402.752.534.778,00	428.487.128.241,00
Piutang Lainnya	320.385.535,00	361.669.666,00
Jumlah	403.072.920.313,00	428.848.797.907,00

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain berasal dari :

1. Pengembalian Kelebihan pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Makanan TA 2016 yang belum disetorkan kembali ke kas negara oleh pihak ketiga / rekanan pemerintah penyedia bahan makanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
2. Pengakuan PNB lainnya dari hasil temuan BPK atau Inspektorat Jenderal atas kerugian negara pada transaksi pengadaan barang dan pekerjaan.
3. Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Makan pegawai yang belum disetorkan kembali ke kas negara oleh pegawai ybs sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
4. Piutang PNB atas pencairan garansi bank dari pekerjaan yang belum



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

selesai.

5. Piutang atas layanan hukum Ditjen KI berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH), Piutang Pembatalan Paten atas Permintaan Sendiri (PAPS) dan Piutang Paten Keterlambatan.
6. Piutang PNBPN atas sewa tanah yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga.

Tabel 46.
Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015

Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	3.393.716.165,00	1.836.800.300,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	3.869.882.791,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	1.980.000.918,00	2.021.019.508,00
Ditjen Imigrasi	12.397.492.896,00	2.411.791.035,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	381.315.464.128,00	422.407.283.649,00
Ditjen PP	61.363.415,00	116.903.415,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	55.000.000,00	55.000.000,00
TOTAL	403.072.920.313,00	428.848.797.907,00

Rincian atas Transaksi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2016 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 47.
Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2016

Unit Eselon I	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	2016	Keterangan
Sekretariat Jenderal		
Kantor Pusat SETJEN	3.094.300.000,00	Piutang PNBPN berupa sewa tanah oleh PT. Paramitha
Kanwil Jabar	140.756.610,00	
Kanwil Jambi	32.440.750,00	
Kanwil Bengkulu	104.689.276,00	
Kanwil Papua Barat	21.529.529,00	
SUBTOTAL	3.393.716.165,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen AHU		
Kantor Pusat Ditjen AHU	3.869.882.791,00	Piutang PNPB hak dan perijinan dari 258 notaris sebesar Rp382.671.605,00 dan Piutang PNPB atas pencairan garansi bank dari pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp3.487.211.186,00.
SUBTOTAL	3.869.882.791,00	
Ditjen Pemasyarakatan		
Lembaga Pemasyarakatan Karawang	30.286.002,00	CV. Rosadia Petaho
Balai Pemasyarakatan Kendari	20.933.477,00	Cv. Seruling Emas
Balai Pemasyarakatan Jayapura	7.525.000,00	Robert Kutanggas
Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	281.404.958,00	PT. Manda Putra Nusantara
Lapas Sumedang	3.382.202,00	CV. Hikmah
Lapas Tasikmalaya	3.046.952,00	CV. Hikmah
Lembaga Pemasyarakatan Kuningan	1.458.822,00	CV. Daya Teknik
Lapas Majalengka	1.484.771,00	CV. Daya Teknik
Lembaga Pemasyarakatan Bogor	2.344.057,00	CV. Sahabat
Lembaga Pemasyarakatan Subang	4.233.371,00	CV. Wiaratama
Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro	939.182,00	Piutang Pengembalian Bama
Rumah Tahanan Negara Situbondo	986.075,00	Piutang Pengembalian Bama
Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan	1.833.065,00	Piutang Pengembalian Bama
Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh	5.519.114,00	Sulistiyono, Bc.IP
Rumah Tahanan Negara Raha	45.754.028,00	Rutan Raha
Rumah Tahanan Negara Kolaka	1.996.150,00	CV. Anda Perdana
Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki	23.940.000,00	CV. Edelin Konsultan
Lembaga Pemasyarakatan Wamena	81.921.363,00	Piutang Pengembalian Bama
Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	239.379.514,00	Piutang Pengembalian Bama
Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	PT. Pentagon Terang Asli Rp80.660.000,00, CV. Sukma Lestari Rp8.650.000,00 dan CV. Wimar aya Rp5.000.000,00.
Rumah Tahanan Negara Unaaha	9.271.752,00	CV. ARI LAKSANA
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa	20.866.603,00	Piutang Pengembalian Bama
Rumah Tahanan Negara Bandung	64.861.656,00	Piutang Pengembalian Bama



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Tahanan Negara Kendari	40.428.717,00	CV. Renkar Raya dan CV Mario Raya Sultra
Rumah Penyimpanan Benda Sitan Negara Jayapura	20.795.000,00	Piutang Pengembalian Bama
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	62.537.960,00	CV. Pangan Indo Rp7.449.300,00 dan PT. Sampurna Daya Utama Rp55.088.660,00 ,
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	423.615.678,00	Piutang Pengembalian Bama
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandung	77.245.100,00	PT. Delima Kreasi Nusa
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	45.714.541,00	Piutang Pengembalian Bama
Rumah Tahanan Kelas IIb Garut	2.682.633,00	CV. Wijaya Kusumah
Lapas Kelas III Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	80.582.086,00	PT. Adhitya Ridho Gumilang
Lapas Kelas III Bekasi Propinsi Jawa Barat	1.452.433,00	PT. Betania Prima
Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung Propinsi Lampung	206.453.383,00	Piutang Pengembalian Bama
Lapas Anak Kelas III Bandung Propinsi Jawa Barat	1.162.212,00	Piutang Pengembalian Bama
Rutan Kelas IIb Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	56.569.241,00	PT. Metro Bhakti Dinamika Konsultan
Lapas Manado	12.202.500,00	Piutang sewa kantin
Lapas Anak Kelas III Batam	881.320,00	Piutang Pengembalian Bama
SUBTOTAL	1.980.000.918,00	
Ditjen Imigrasi		
Kanim Surabaya	392.366.244,00	
Kanim Pekanbaru	11.000.000,00	PT. Rizki Maulana Consultant
Kanim Ngurah Rai	3.410.000.000,00	
Kantor Pusat Ditjen Imigrasi	8.584.126.652,00	Rp896.500.000,00 oleh PT. Gagasan Adi Nusa, Rp822.661.500,00 oleh PT. Indomukti Nusantara dan sebesar Rp80.000.090,00 oleh PT. Central Auto Comperindo. Sedangkan sebesar Rp6.784.965.062,00 merupakan pencairan Bank Garansi atas pekerjaan yang belum selesai.
SUBTOTAL	12.397.492.896,00	
Ditjen Kekayaan Intelektual		
Kantor Pusat Ditjen KI	381.315.464.128,00	Piutang Atas Layanan Hukum Ditjen KI seperti Merk, Paten dll. (Piutang BDH 98%, dengan Kualitas Macet)
SUBTOTAL	381.315.464.128,00	
Ditjen PP		
Kantor Pusat Ditjen PP	61.363.415,00	Piutang pengembalian belanja
SUBTOTAL	61.363.415,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BPSDM		
Kantor Pusat BPSDM	55.000.000,00	Piutang PNBPN berupa kontrak sewa antara ALTRI dengan BPSDM
SUBTOTAL	55.000.000,00	
TOTAL	403.072.920.313,00	

Terkait data piutang PNBPN Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjawab Rekomendasi Audit BPK terkait penatausahaan piutang bidang paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah membentuk Tim Internal untuk melakukan Validasi dan Evaluasi Piutang PNBPN Paten dalam rangka pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Piutang PNBPN (SIAPP).

Setelah dilakukannya validasi dan evaluasi piutang PNBPN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah terjadi perubahan nilai pada Piutang BDH dan Piutang PAPS yang berakibat pada pergeseran saldo awal yang dapat kami jelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo awal piutang PNBPN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp422.407.283.649,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian saldo Awal

Uraian	TH 2016
BDH	335.302.138.899,00
PAPS	38.450.161.000,00
Keterlambatan	48.654.983.750,00
Jumlah	422.407.283.649,00

2. Setelah validasi dan evaluasi data Piutang PNBPN Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pergeseran Saldo Awal pada 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp423.091.588.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian saldo Awal Setelah Validasi

Uraian	TH 2016
BDH	335.553.454.126,00
PAPS	38.883.151.000,00
Keterlambatan	48.654.983.750,00
Jumlah	423.091.588.876,00

3. Pergeseran saldo awal dikarenakan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang yang disebabkan oleh :
 - a. Mutasi Tambah disebabkan oleh :
 - a.1. Ralat Nominal;
 - a.2. Adanya data yang belum diserahkan saat penatausahaan manual.
 - b. Mutasi Kurang disebabkan oleh :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b.1. Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan;
 - b.2. Ralat Nominal Paten;
 - b.3. Pelunasan.
4. Rincian mutasi Piutang Paten BDH dan PAPS setelah dilakukan validasi dan evaluasi data piutang PNBPN adalah sebagai berikut :
- a. Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH)

Rincian Mutasi Saldo Awal Piutang BDH

No	ID	Jenis Mutasi	Nominal
1	ID000012784	mutasi nominal kurang	(7.920.000,00)
2	IDP000025378	mutasi nominal kurang	(29.887.500,00)
3	ID000000100	mutasi nominal kurang	(13.280.000,00)
4	IDP000018447	mutasi nominal kurang	(17.110.000,00)
5	IDP000013026	mutasi nominal tambah	6.656.250,00
6	IDP000020829	mutasi nominal tambah	20.520.000,00
7	IDP000018921	mutasi nominal tambah	16.080.000,00
8	IDP000018918	mutasi nominal tambah	14.820.000,00
9	IDP000018932	mutasi nominal tambah	60.395.000,00
10	IDP000019081	mutasi nominal tambah	9.990.000,00
11	IDP000019466	mutasi nominal tambah	17.340.000,00
12	IDP000019562	mutasi nominal tambah	12.210.000,00
13	IDP000020010	mutasi nominal tambah	17.340.000,00
14	IDP000020021	mutasi nominal tambah	12.600.000,00
15	IDP000014404	mutasi nominal tambah	19.400.000,00
16	IDP000011240	mutasi nominal tambah	114.888.750,00
17	IDP000019992	mutasi nominal kurang	(2.727.273,00)
Jumlah Mutasi			251.315.227,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Piutang Paten Pembatalan Paten Atas Permintaan Sendiri (PAPS).

Rincian Mutasi Saldo Awal Piutang PAPS

No	ID	Jenis Mutasi	Nominal	No	ID	Jenis Mutasi	Nominal
1	5130	mutasi tambah	6.150.000,00	28	33525	mutasi tambah	5.250.000,00
2	10478	mutasi tambah	36.305.000,00	29	35626	mutasi tambah	4.050.000,00
3	13092	mutasi tambah	3.000.000,00	30	23209	mutasi tambah	9.500.000,00
4	15737	mutasi tambah	4.357.500,00	31	33213	mutasi tambah	6.000.000,00
5	14270	mutasi tambah	15.975.000,00	32	19607	mutasi tambah	16.000.000,00
6	7408	mutasi tambah	6.500.000,00	33	23566	mutasi tambah	21.562.500,00
7	34097	mutasi tambah	3.200.000,00	34	23681	mutasi tambah	23.800.000,00
8	22366	mutasi tambah	7.500.000,00	35	24499	mutasi tambah	20.062.500,00
9	28712	mutasi tambah	6.000.000,00	36	24929	mutasi tambah	22.807.500,00
10	27079	mutasi tambah	20.900.000,00	37	37688	mutasi tambah	3.900.000,00
11	19330	mutasi tambah	90.225.000,00	38	35380	mutasi tambah	5.200.000,00
12	23279	mutasi tambah	20.718.750,00	39	23011	mutasi tambah	7.500.000,00
13	31994	mutasi tambah	7.600.000,00	40	31932	mutasi tambah	10.027.500,00
14	19591	mutasi tambah	14.350.000,00	41	10428	mutasi tambah	17.243.750,00
15	22458	mutasi tambah	14.000.000,00	42	17847	mutasi tambah	7.077.500,00
16	26170	mutasi tambah	27.987.500,00	43	15943	mutasi tambah	4.400.000,00
17	35932	mutasi tambah	9.000.000,00	44	22834	mutasi kurang	(43.370.000,00)
18	35992	mutasi tambah	3.000.000,00	45	24624	mutasi kurang	(16.567.500,00)
19	35052	mutasi tambah	4.000.000,00	46	14361	mutasi kurang	(18.500.000,00)
20	34942	mutasi tambah	3.300.000,00	47	15355	mutasi kurang	(17.500.000,00)
21	21747	mutasi tambah	34.700.000,00	48	33394	mutasi kurang	(8.000.000,00)
22	30814	mutasi tambah	28.500.000,00	49	23254	mutasi kurang	(5.750.000,00)
23	35351	mutasi tambah	9.250.000,00	50	30789	mutasi kurang	(4.200.000,00)
24	30618	mutasi tambah	8.750.000,00	51	25299	mutasi kurang	(22.610.000,00)
25	13019	mutasi tambah	7.500.000,00	52	20756	mutasi kurang	(23.381.250,00)
26	33237	mutasi tambah	4.800.000,00	53	17497	mutasi tambah	6.918.750,00
27	34229	mutasi tambah	4.000.000,00	Jumlah			432.990.000,00

Piutang Paten PNBPN per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp381.315.464.128,00 dan Rp422.407.283.649,00. Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPN TA 2016 dan 2015

Uraian	TH 2016
Batal Demi Hukum	329.465.186.007,00
Pembatalan Atas Permintaan Sendiri	41.120.955.496,00
Keterlambatan	10.729.322.625,00
Jumlah	381.315.464.128,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian mutasi Piutang Paten disajikan sebagai berikut:

a. Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH)

PIUTANG BDH (Januari - Desember)			
Uraian		Jumlah Debitur	Jumlah
Saldo Awal		11641	335.553.454.126,00
Tambah	Penambahan	1302	31.566.995.000,00
Jumlah		1302	31.566.995.000,00
kurang	Koreksi Piutang	5	77.330.000,00
	Pelunasan	1302	36.268.328.119,00
	Pindah Status	42	1.309.605.000,00
Jumlah		1349	37.655.263.119,00
Jumlah Piutang BDH		11594	329.465.186.007,00

Total piutang Batal Demi Hukum (BDH) 31 Desember 2016 adalah Rp329.465.186.007,00 dan Lunas Rp36.268.328.119,00 yang merupakan akumulasi jumlah piutang sampai dengan 31 Desember 2016.

b. Piutang Paten Pembatalan Atas Permintaan Sendiri (PAPS)

PIUTANG PAPS (Januari - Desember)			
Uraian		Jumlah Debitur	Jumlah
Saldo Awal		1929	38.883.151.000,00
Tambah	Penambahan	363	11.423.077.500,00
	Koreksi Piutang	1	9.000.000,00
Jumlah		364	11.432.077.500,00
kurang	Koreksi Piutang	9	122.890.000,00
	Pelunasan	606	9.071.383.004,00
Jumlah		615	9.194.273.004,00
Jumlah Piutang PAPS		1.678	41.120.955.496,00

Total piutang Pembatalan atas Permintaan Sendiri (PAPS) 31 Desember 2016 adalah Rp41.120.955.496,00 dan Lunas Rp9.071.383.004,00 yang merupakan akumulasi jumlah piutang sampai dengan 31 Desember 2016.

c. Piutang paten Keterlambatan

PIUTANG KETERLAMBATAN (Januari - Desember)			
Uraian		Jumlah Debitur	Jumlah
Saldo Awal		2316	48.654.983.750,00
Tambah	Penambahan	697	10.729.322.625,00
Jumlah		697	10.729.322.625,00
kurang	Pengurangan	2316	48.654.983.750,00
Jumlah		2316	48.654.983.750,00
Jumlah Keterlambatan		697	10.729.322.625,00

Total piutang Keterlambatan 31 Desember 2016 adalah Rp10.729.322.625,00 yang merupakan akumulasi jumlah piutang sampai dengan 31 Desember 2016.

Bagian Lancar
 TP/TGR
 Rp578.001.038
 ,00

C.8 Bagian Lancar TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp578.001.038,00 dan Rp603.419.117,00. Bagian Lancar Tagihan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

No	Nama	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bagian Lancar TP	143.557.359,00	159.569.426,00
2	Bagian Lancar TGR	434.443.679,00	443.849.691,00
Jumlah		578.001.038,00	603.419.117,00

Tabel 48.

**Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	350.518.487,00	443.528.787,00
Inspektorat Jenderal		0,00
Ditjen AHU	20.870.841,00	6.949.996,00
Ditjen Pemasarakatan	91.379.370,00	54.438.370,00
Ditjen Imigrasi	104.708.327,00	77.100.000,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	1.587.493,00	6.350.004,00
Ditjen PP	8.936.520,00	8.936.520,00
Ditjen HAM	-	0
BPHN	-	6.115.440,00
Balitbang	-	0,00
BPSDM	-	0,00
TOTAL	578.001.038,00	603.419.117,00

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing satuan kerja disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 49.

**Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016**

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	2016	Debitur
Sekretariat Jenderal		
Kanwil SETJEN Jakarta	7.650.000,00	
Kanwil SETJEN Surabaya	24.500.000,00	Djoko Ariaros
Kanwil SETJEN Pekanbaru	12.000.000,00	Wan Darwis Achmayu
Kanwil SETJEN Palembang	27.199.998,00	Amirullah
Kanwil SETJEN Tanjung Karang	8.434.591,00	Bonthiny
Kanwil SETJEN Bengkulu	27.199.998,00	Amirullah
Kanwil SETJEN Ambon	615.500,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Satker SETJEN	242.918.400,00	Lucky dan Staf Wamenkumham
SUBTOTAL	350.518.487,00	
Ditjen AHU		
Satker Ditjen AHU	470.841,00	M. Slamet (TGR berupa kehilangan kendaraan roda dua)
	20.400.000,00	Nurjaman (TGR berupa kehilangan kendaraan roda empat)
SUBTOTAL	20.870.841,00	
Ditjen Pemasyarakatan		
Balai Pemasyarakatan Jayapura	1.000.000,00	Lenora Baransano
Rumah Tahanan Negara Kebumen	3.909.000,00	Suhartono
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	Sugiarto basir
Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	3.000.000,00	Hermanus Sadhu
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	28.332.000,00	Woro Sri Wulan
Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	Husen Sepa, S.Sos
Rupbasan Probolinggo	11.000.000,00	Harjianto
Lapas Kelas III Bekasi Propinsi Jawa Barat	1.700.000,00	Cahyaningsih Agustine
Lapas Manado	2.000.000,00	
SUBTOTAL	91.379.370,00	
Ditjen Imigrasi		
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	5.700.000,00	Nana Suryana
Kantor Imigrasi Jember	8.250.000,00	Jaka Perkasa
Kantor Imigrasi Kupang	13.200.000,00	I Gusti NK Susila (TGR berupa penggunaan dana PNBK)
Direktorat Jenderal Imigrasi	9.850.000,00	Ikram Taha (TGR berupa kehilangan kendaraan roda dua)
Kantor Imigrasi Ternate	24.000.000,00	Aisa Arsad
Kantor Imigrasi Tangerang	6.000.000,00	Saraswati (TGR berupa penggunaan dana PNBK)
Kantor Imigrasi Jakarta Utara	4.500.000,00	Husni El Fuad
	3.208.327,00	Margani
Rumah Detensi Imigrasi Semarang	30.000.000,00	Darwanto, SH
SUBTOTAL	104.708.327,00	
Ditjen Kekayaan Intelektual		
Satker Ditjen KI	1.587.493,00	Dwi Ratih Wulandari (TGR berupa kehilangan kendaraan roda dua)
SUBTOTAL	1.587.493,00	
Ditjen PP		
Satker Ditjen PP	8.936.520,00	Pegawai non bendahara sebanyak 28 pegawai
SUBTOTAL	8.936.520,00	
TOTAL	578.001.038,00	

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang

Lancar

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp370.945.590.980,00 dan Rp353.090.152.503,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp370.945.590 kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2016

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	29.027.968.098,00	0,50%	145.138.840,00
Kurang Lancar	3.511.735.000,00	10%	351.173.500,00
Diragukan	120.174.107,00	50%	60.187.054,00
Macet	370.386.143.108,00	100%	370.386.143.108,00
	26.900.000,00		-
Jumlah	403.072.920.313,00		370.942.642.502,00
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	577.385.538,00	0,50%	2.886.928,00
Kurang Lancar	615.500,00	10%	61.550,00
Diragukan	0,00	50%	-
Macet	0,00	100%	-
Jumlah	578.001.038,00		2.948.478,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	403.650.921.351,00		370.945.590.980,00

Tabel 50.

**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Lancar Berdasarkan Satuan Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2016**

Unit Eselon I	Piutang Lancar			
	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
Sekretariat Jenderal				
Kanwil SETJEN Jakarta	7.650.000,00	0,5%	38.250,00	Lancar
Kanwil SETJEN Surabaya	24.500.000,00	0,5%	122.500,00	Lancar
Kanwil SETJEN Pekanbaru	12.000.000,00	0,5%	60.000,00	Lancar
Kanwil SETJEN Palembang	27.199.998,00	0,5%	136.000,00	Lancar
Kanwil SETJEN Tanjung Karang	8.434.591,00	0,5%	42.173,00	Lancar
Kanwil SETJEN Bengkulu	131.889.274,00	0,5%	659.446,00	Lancar
Kanwil SETJEN Ambon	615.500,00	10,0%	61.550,00	Kurang Lancar
Kanwil SETJEN Jabar	140.756.610,00	0,5%	703.783,00	Lancar
Kanwil SETJEN Papua Barat	21.529.529,00	0,5%	107.648,00	Lancar
Kanwil SETJEN Jambi	32.440.750,00	0,5%	162.204,00	Lancar
Satker SETJEN	3.337.218.400,00	0,5%	16.686.092,00	Lancar
SUBTOTAL	3.744.234.652,00		18.779.646,00	
Ditjen AHU				
Satker Ditjen AHU	20.870.841,00	0,5%	104.354,00	Lancar
	382.671.605,00	100,0%	382.671.605,00	Macet
	3.487.211.186,00	0,5%	17.436.056,00	Lancar
SUBTOTAL	3.890.753.632,00		400.212.015,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen Pemasyarakatan				
Lembaga Pemasyarakatan Karawang	30.286.002,00	0,5%	151.430,00	Lancar
Balai Pemasyarakatan Kendari	20.933.477,00	0,5%	104.667,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	281.404.958,00	0,5%	1.407.025,00	Lancar
Lapas Sumedang	3.382.202,00	0,5%	16.911,00	Lancar
Lapas Tasikmalaya	3.046.952,00	0,5%	15.235,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Kuningan	1.458.822,00	0,5%	7.294,00	Lancar
Lapas Majalengka	1.484.771,00	0,5%	7.424,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Bogor	2.344.057,00	0,5%	11.720,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Subang	4.233.371,00	0,5%	21.167,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro	939.182,00	0,5%	4.696,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Situbondo	986.075,00	0,5%	4.930,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan	1.833.065,00	0,5%	9.165,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh	5.519.114,00	0,5%	27.596,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Raha	45.754.028,00	0,5%	228.770,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Kolaka	1.996.150,00	0,5%	9.981,00	Lancar
Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki	23.940.000,00	0,5%	119.700,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Wamena	47.747.256,00	0,5%	237.736,00	Lancar
	34.174.107,00	50,0%	17.187.054,00	Diragukan
Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	239.379.514,00	0,5%	1.196.898,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	0,5%	471.550,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Unaaha	9.271.752,00	0,5%	46.359,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa	20.866.603,00	0,5%	104.333,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Bandung	64.861.656,00	0,5%	324.308,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Kendari	40.428.717,00	0,5%	202.144,00	Lancar
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jayapura	20.795.000,00	0,5%	103.975,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	62.537.960,00	0,5%	312.690,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	423.615.678,00	0,5%	2.118.079,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandung	77.245.100,00	0,5%	386.226,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	45.714.541,00	0,5%	228.573,00	Lancar
Rumah Tahanan Kelas IIb Garut	2.682.633,00	0,5%	13.413,00	Lancar
Lapas Kelas III Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	80.582.086,00	0,5%	402.910,00	Lancar
Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung Propinsi Lampung	206.453.383,00	0,5%	1.032.267,00	Lancar
Lapas Anak Kelas III Bandung Propinsi Jawa Barat	1.162.212,00	0,5%	5.811,00	Lancar
Rutan Kelas IIb Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	56.569.241,00	0,5%	282.846,00	Lancar
Lapas Manado	14.202.500,00	0,5%	71.013,00	Lancar
Lapas Anak Kelas III Batam	881.320,00	0,5%	4.406,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Balai Pemasyarakatan Jayapura	8.525.000,00	0,5%	42.625,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Kebumen	3.909.000,00	0,5%	19.545,00	Lancar
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	0,5%	90.000,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	3.000.000,00	0,5%	15.000,00	Lancar
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	28.332.000,00	0,5%	141.660,00	Lancar
Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	0,5%	112.192,00	Lancar
Rupbasan Probolinggo	11.000.000,00	0,5%	55.000,00	Lancar
Lapas Kelas III Bekasi Propinsi Jawa Barat	3.152.433,00	0,5%	15.762,00	Lancar
SUBTOTAL	2.071.380.288,00		27.372.086,00	
Ditjen Imigrasi				
Kantor Imigrasi Surabaya	392.366.244,00	0,5%	1.961.831,00	Lancar
Kantor Imigrasi Pekanbaru	11.000.000,00	0,5%	55.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Ngurah Rai	3.410.000.000,00	10,0%	341.000.000,00	Kurang Lancar
Kantor Pusat Ditjen Imigrasi	1.799.161.590,00	0,5%	8.995.808,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	5.700.000,00	0,5%	28.500,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jember	8.250.000,00	0,5%	41.250,00	Lancar
Kantor Imigrasi Kupang	13.200.000,00	0,5%	66.000,00	Lancar
Direktorat Jenderal Imigrasi	9.850.000,00	0,5%	49.250,00	Lancar
	6.784.965.062,00	0,5%	33.924.825,00	Lancar
Kantor Imigrasi Ternate	24.000.000,00	0,5%	120.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Tangerang	6.000.000,00	0,5%	30.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jakarta Utara	7.708.327,00	0,5%	38.542,00	Lancar
Rumah Detensi Imigrasi Semarang	30.000.000,00	0,5%	150.000,00	Lancar
SUBTOTAL	12.502.201.223,00		386.461.006,00	
Ditjen Kekayaan Intelektual				
Satker Ditjen KI	11.097.357.625,00	0,5%	55.486.788,00	Lancar
	101.735.000,00	10,0%	10.173.500,00	Kurang Lancar
	86.000.000,00	50,0%	43.000.000,00	Diragukan
	370.003.471.503,00	100,0%	370.003.471.503,00	Macet
	1.587.493,00	0,5%	7.937,00	
	26.900.000,00	0,0%	0,00	
SUBTOTAL	381.317.051.621,00		370.112.139.728,00	
Ditjen PP				
Satker Ditjen PP	70.299.935,00	0,5%	351.500,00	Lancar
SUBTOTAL	70.299.935,00		351.500,00	
BPSDM				
Satker BPSDM	55.000.000,00	0,5%	275.000,00	Lancar
SUBTOTAL	55.000.000,00		275.000,00	
TOTAL	403.650.921.351,00		370.945.590.981,00	

Persediaan
Rp501.457.950
.598,00

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp501.457.950.598,00. dan Rp521.360.073.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Persediaan	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	87,524,914,647.00	72,461,277,551.00
Amunisi	5,905,686,301.00	5,921,075,770.00
Bahan Untuk Pemeliharaan	4,473,931,580.00	6,807,921,158.00
Suku Cadang	1,061,451,657.00	753,322,416.00
Pita Cukai, Materai dan Leges	91,361,281.00	87,614,815.00
Hewan dan Tanaman untuk dijual	8,404,586,892.00	46,859,212.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual	2,928,857,463.00	43,596,986.00
Aset Tetap Lainnya untuk dijual	1,109,007,789.00	1,588,053,494.00
Aset Lain-lain untuk diserahkan	1,303,637,399.00	58,244,662.00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	343,312,704,008.00	417,475,425,338.00
Bahan Baku	1,025,115,810.00	754,799,536.00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	36,685,360,606.00	9,318,334,329.00
Persediaan Lainnya	7,631,335,165.00	6,043,548,321.00
Jumlah	501,457,950,598.00	521,360,073,588.00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp1.905.302.366,00, yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp1.293.081.549,00 dan kondisi usang senilai Rp612.220.817,00 (sesuai data dalam aplikasi SIMAK BMNPB13).

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 51.

Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Persediaan	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	6.570.404.738,00	9.146.363.281,00
Inspektorat Jenderal	232.782.026,00	51.331.665,00
Ditjen AHU	2.820.359.892,00	2.459.128.504,00
Ditjen Pemasarakatan	77.567.658.933,00	37.718.947.167,00
Ditjen Imigrasi	405.284.792.051,00	467.983.118.041,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	6.704.777.757,00	1.841.288.653,00
Ditjen PP	1.068.540.854,00	1.239.611.151,00
Ditjen HAM	382.329.125,00	542.774.070,00
BPHN	173.536.165,00	74.549.946,00
Balitbang	45.774.595,00	50.614.268,00
BPSDM	606.994.462,00	252.346.842,00
TOTAL	501.457.950.598,00	521.360.073.588,00



Tagihan
Tuntutan
Perbendahara
an/ Tuntutan
Ganti Rugi
Rp838.633.567
,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp838.633.567,00 dan Rp1.040.822.031,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel 52.

**Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	254,862,674.00	521,158,012.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	76,500,000.00	470,841.00
Ditjen Pemasarakatan	100,659,484.00	78,254,619.00
Ditjen Imigrasi	406,611,409.00	436,112,571.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0.00	1,587,493.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	0.00	3,238,495.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	0.00	0.00
TOTAL	838,633,567.00	1,040,822,031.00

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing satuan kerja eselon I disajikan pada Tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 53.
Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016

Unit Eselon I	Tagihan TP/TGR	
	2016	Debitur
Sekretariat Jenderal		
Kanwil SETJEN Jakarta	5,100,000.00	
Kanwil SETJEN Pekanbaru	10,607,339.00	Wan Darwis Achmayu
Kanwil SETJEN Palembang	81,600,004.00	Amirullah
Kanwil SETJEN Tanjung Karang	2,108,653.00	Bonthiny
Kanwil SETJEN Bengkulu	81,600,004.00	Amirullah
Kanwil SETJEN Ambon	265,500.00	
Satker SETJEN	73,581,174.00	Lucky dan Staf Wamenkumham
SUBTOTAL	254,862,674.00	
Ditjen AHU		
	76,500,000.00	Nurjaman (TGR berupa kehilangan kendaraan roda empat)
SUBTOTAL	76,500,000.00	
Ditjen Pemasyarakatan		
Balai Pemasyarakatan Jayapura	3,340,365.00	Lenora Baransano
Rumah Tahanan Negara Kebumen	2,606,000.00	Suhartono
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	47,528,119.00	Sugiarto basir
Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	500,000.00	Hermanus Sadhu
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	42,502,000.00	Woro Sri Wulan
Lapas Manado	4,183,000.00	
SUBTOTAL	100,659,484.00	
Ditjen Imigrasi		
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	5,700,000.00	Nana Suryana
Kantor Imigrasi Jember	8,250,000.00	Jaka Perkasa
Kantor Imigrasi Kupang	54,505,000.00	I Gusti NK Susila (TGR berupa penggunaan dana PNPB)
Direktorat Jenderal Imigrasi	4,104,169.00	Ikram Taha (TGR berupa kehilangan kendaraan roda dua)
Kantor Imigrasi Ternate	281,209,240.00	Aisa Arsad
Kantor Imigrasi Tangerang	19,795,000.00	Saraswati (TGR berupa penggunaan dana PNPB)
Kantor Imigrasi Batu Licin	6,548,000.00	
Kantor Imigrasi Entikong	11,500,000.00	
Rumah Detensi Imigrasi Semarang	15,000,000.00	Darwanto, SH
SUBTOTAL	406,611,409.00	
TOTAL	838,633,567.00	

Piutang
Jangka
Panjang

C.12 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp12.792.500.000,00 dan Rp14.370.800.000,00.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lainnya
Rp12.792.500.
000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya ini atas transaksi perjanjian kontrak sewa lahan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT.Paramita selama 20 Tahun, yang dicatatkan disini merupakan piutang Tahun 2017 s.d 2024. Perbandingan Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 54.

**Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Unit Eselon I	Piutang Jangka Panjang Lainnya	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	12.792.500.000,00	14.370.800.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00
TOTAL	12.792.500.000,00	14.370.800.000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.792.500.000,00 merupakan Piutang atas sewa PT. Paramitha kepada Sekretariat Jenderal.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp79.725.011,
00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp79.725.011,00 dan Rp159.782.721.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih –
Piutang Jangka Panjang TA 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	827.133.567,00	0,5%	4.262.511,00
Kurang Lancar	-	10,0%	-
Diragukan	-	50,0%	-
Macet	11.500.000,00	100,0%	11.500.000,00
Jumlah	838.633.567,00		15.762.511,00
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	12.792.500.000,00	0,5%	63.962.500,00
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	12.792.500.000,00		63.962.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13.631.133.567,00		79.725.011,00

Tabel 55.
Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016

Unit Eselon I	Piutang Lancar			
	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
Sekretariat Jenderal				
Kanwil SETJEN Jakarta	5.100.000,00	0,5%	25.500,00	Lancar
Kanwil SETJEN Pekanbaru	10.607.339,00	0,5%	53.037,00	Lancar
Kanwil SETJEN Palembang	81.600.004,00	0,5%	408.000,00	Lancar
Kanwil SETJEN Tanjung Karawang	2.108.653,00	0,5%	42.163,00	Lancar
Kanwil SETJEN Bengkulu	81.600.004,00	0,5%	408.000,00	Lancar
Kanwil SETJEN Ambon	265.500,00	0,5%	96.550,00	Lancar
Satker SETJEN	12.866.081.174,00	0,5%	64.330.406,00	Lancar
SUBTOTAL	13.047.362.674,00		65.363.656,00	
Ditjen AHU				
Satker Ditjen AHU	76.500.000,00	0,5%	382.500,00	Lancar
SUBTOTAL	76.500.000,00	0,5%	382.500,00	
Ditjen Pemasyarakatan				
Balai Pemasyarakatan Jayapura	3.340.365,00	0,5%	16.702,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Kebumen	2.606.000,00	0,5%	13.030,00	Lancar
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	47.528.119,00	0,5%	237.641,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	500.000,00	0,5%	2.500,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	42.502.000,00	0,5%	212.510,00	Lancar
Lapas Manado	4.183.000,00	0,5%	20.915,00	Lancar
SUBTOTAL	100.659.484,00		503.298,00	
Ditjen Imigrasi				
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	5.700.000,00	0,5%	28.500,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jember	8.250.000,00	0,5%	41.250,00	Lancar
Kantor Imigrasi Kupang	54.505.000,00	0,5%	272.525,00	Lancar
Direktorat Jenderal Imigrasi	4.104.169,00	0,5%	20.521,00	Lancar
Kantor Imigrasi Ternate	281.209.240,00	0,5%	1.406.046,00	Lancar
Kantor Imigrasi Tangerang	19.795.000,00	0,5%	98.975,00	Lancar
Kantor Imigrasi Batu Licin	6.548.000,00	0,5%	32.740,00	Lancar
Kantor Imigrasi Entikong	11.500.000,00	100,0%	11.500.000,00	Macet
Rumah Detensi Imigrasi Semarang	15.000.000,00	0,5%	75.000,00	Lancar
SUBTOTAL	406.611.409,00		13.475.557,00	
TOTAL	13.631.133.567,00		79.725.011,00	

Tanah

Rp12.573.351.
 222.603,00

C.14 Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.573.351.222.603,00. dan Rp12.511.223.438.259,00.

Rincian perbandingan nilai Aset Tanah berdasarkan Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut :

Tabel 56.
Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Tanah	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	5,341,170,650,755.00	5,343,364,939,658.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	68,766,767,000.00	69,155,017,000.00
Ditjen Pemasyarakatan	5,598,796,428,801.00	5,571,316,587,072.00
Ditjen Imigrasi	1,330,362,535,640.00	1,293,132,054,122.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0.00	0.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	62,977,940,407.00	62,977,940,407.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	171,276,900,000.00	171,276,900,000.00
TOTAL	12,573,351,222,603.00	12,511,223,438,259.00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	12.511.223.438.259,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	7.607.779.280,00
Pembelian	3.500.000,00
Transfer Masuk	6.478.286.297,00
Hibah Masuk	2.492.877.225,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	488.175.000,00
Reklasifikasi Masuk	91.906.177.097,00
Perolehan Lainnya	41.779.000.000,00
Pengembangan Nilai Aset	1.796.318.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.759.575.134,00
Pengembangan Melalui KDP	2.512.506.590,00
Total Mutasi Tambah :	159.824.194.623,00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.186.277.923,00
Penghapusan	3.079.410.000,00
Transfer Keluar	7.198.286.297,00
Reklasifikasi Keluar	35.810.484.047,00
Koreksi Pencatatan	50.421.952.012,00
Total Mutasi Kurang :	97.696.410.279,00
Saldo per 31 Desember 2016	12.573.351.222.603,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	12.573.351.222.603,00

Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan saldo awal sebesar Rp7.607.779.280,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.897.430.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp3.298.816.420,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.411.532.860,00.
- Pembelian sebesar Rp3.500.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Takengon, Aceh dimana nilai tersebut merupakan biaya pengurusan sertifikat terhadap tanah yang akan dihibahkan oleh Pemda Takengon.
- Transfer Masuk sebesar Rp6.478.286.297,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi masing-masing adalah sebesar Rp4.685.866.297,00 dan Rp1.792.420.000,00.
- Hibah Masuk sebesar Rp2.492.877.225,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp286.037.225,00 pada satker Kanwil Kalimantan Barat perolehan hibah dari Pemkab Kapuas Hulu yang telah mendapatkan register dan pengesahan hibah, Ditjen PAS sebesar Rp774.540.000,00 pada satker Cabang Rutan Bagan Siapi-api perolehan hibah dari Bupati Rokan Hilir, Riau, Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.432.300.000,00 pada satker Kanim Kediri perolehan hibah dari Pemkab Kediri.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp488.175.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Aceh.



- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp91.906.177.097,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp4.439.607.297,00, Ditjen PAS sebesar Rp84.806.019.550,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.660.550.250,00.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp41.779.000.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Bogor yang merupakan perolehan alih status pengguna sesuai SK Menteri Keuangan Nomor 28/KM.6/2015.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.796.318.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Takengon, Aceh.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp4.759.575.134,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp2.512.506.590,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.340.166.392,00, Ditjen PAS sebesar Rp317.980.290,00 pada satker Lapas Bekasi, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp854.359.908,00 pada satker Kanim Semarang.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar Rp1.186.277.923,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp737.557.823,00, Ditjen PAS sebesar Rp123.766.600,00 pada satker Rutan Salatiga, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp324.953.500,00 pada satker Kanim Bekasi dan Kanim Tasikmalaya.
- Penghapusan sebesar Rp3.079.410.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Yogyakarta berupa penghapusan tanah kantor dan tanah rumah negara dengan keputusan penghapusan nomor SEK-04.PL.05.01 Tahun 2016.
- Transfer Keluar sebesar Rp7.198.286.297,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp3.210.291.297,00, Ditjen PAS sebesar Rp2.423.575.000,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.564.420.000,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp35.810.484.047,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp4.439.607.297,00 Ditjen PAS sebesar Rp29.190.660.750,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.180.216.000,00.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp50.421.952.012,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp2.258.248.400,00, Ditjen AHU sebesar Rp388.250.000,00 Ditjen PAS sebesar Rp39.424.953.612,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp8.350.500.000,00.

Peralatan dan
Mesin
Rp4.851.425.4
71.800,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.851.425.471.800,00 dan Rp3.696.443.831.458,00.

Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2016



adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Peralatan dan Mesin	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	493,197,539,059.00	461,029,997,207.00
Inspektorat Jenderal	18,346,803,187.00	13,216,541,009.00
Ditjen AHU	227,333,872,530.00	237,400,766,135.00
Ditjen Pemasyarakatan	1,817,234,882,724.00	1,135,507,763,322.00
Ditjen Imigrasi	2,071,290,674,709.00	1,647,632,248,071.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	107,536,318,646.00	90,138,609,617.00
Ditjen PP	26,279,522,759.00	25,791,504,080.00
Ditjen HAM	13,745,325,940.00	13,396,215,240.00
BPHN	16,516,817,758.00	20,768,485,169.00
Balitbang	12,545,425,951.00	10,590,049,367.00
BPSDM	47,398,288,537.00	40,971,652,241.00
TOTAL	4,851,425,471,800.00	3,696,443,831,458.00

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	3,696,443,831,458.00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	10,450,218,269.00
Pembelian	567,730,392,524.00
Transfer Masuk	456,224,085,962.00
Hibah Masuk	8,779,515,753.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	633,427,505,217.00
Reklasifikasi Masuk	725,227,456,943.00
Perolehan Lainnya	1,432,272,034.00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	21,554,065,062.00
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	28,460,950.00
Pengembangan Nilai Aset	10,530,566,034.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	9,622,416,069.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	11,545,436,455.00
Total Mutasi Tambah :	2,456,552,391,272.00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	557,216,189,779.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	2,775,229,323.00
Penghapusan	2,945,730,126.00
Transfer Keluar	467,604,196,966.00
Reklasifikasi Keluar	154,686,858,826.00
Koreksi Pencatatan	35,358,554,772.00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	156,838,642.00
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	4,783,500.00
Penghentian Aset dari Penggunaan	80,822,368,996.00
Total Mutasi Kurang :	1,301,570,750,930.00
Saldo per 31 Desember 2016	4,851,425,471,800.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	2,949,784,752,610.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1,901,640,719,190.00

Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan saldo awal sebesar Rp10.450.218.269,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp629.247.300,00, Ditjen AHU sebesar Rp1.000.000,00 pada BHP Semarang berupa pencatatan 1 unit printer Canon perolehan tahun 2008, Ditjen PAS sebesar Rp6.405.890.964,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.864.905.005,00, dan Ditjen PP sebesar Rp549.175.000,00.
- Pembelian sebesar Rp567.730.392.524,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp9.012.719.461,00, Itjen sebesar Rp1.652.888.928,00, Ditjen AHU sebesar Rp27.868.378.331,00, Ditjen PAS sebesar Rp84.907.522.909,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp421.376.332.344,00, Ditjen KI sebesar Rp18.619.798.251,00, Ditjen HAM sebesar Rp351.985.500,00, BPHN sebesar Rp289.627.000,00, Balitbang HAM sebesar Rp504.988.500,00, dan BPSDM sebesar Rp3.146.151.300,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp456.224.085.962,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp82.379.879.928,00, Itjen sebesar Rp6.241.388.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp23.970.711.200,00,



- Ditjen PAS sebesar Rp37.587.024.195,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp297.846.379.234,00, Ditjen KI sebesar Rp362.663.636,00, Ditjen PP sebesar Rp570.340.694,00, Ditjen HAM sebesar Rp1.648.948.975,00, BPHN sebesar Rp279.263.000,00, Balitbang HAM sebesar Rp1.727.699.084,00, dan BPSDM sebesar Rp3.609.788.016,00.
- Hibah Masuk sebesar Rp8.779.515.753,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp539.675.000,00 pada satker Kanwil Jawa Barat berupa dua unit mobil dari Pemprov Jawa Barat dan Ditjen PAS sebesar Rp8.239.840.753,00 yang terdapat pada satker Ditjen Pemasyarakatan, Bapas Semarang, Lapas Cipinang, Lapas Madiun, Lapas Tanjung Pandan, Lapas Boalemo, Lapas Lhokseumawe, Lapas Narkotika Palembang, Lapas Banceuy, Lapas Narkotika Bandung dan Rutan Kota Agung.
 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp633.427.505.217,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp785.250.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp175.367.500,00, Ditjen PAS sebesar Rp613.820.309.191,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp18.646.578.526,00.
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp725.227.456.943,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp9.031.074.548,00, Itjen sebesar Rp44.847.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp917.042.174,00, Ditjen PAS sebesar Rp627.188.666.403,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp88.041.046.818,00, Ditjen HAM sebesar Rp4.000.000,00, dan BPHN sebesar Rp780.000,00.
 - Perolehan Lainnya sebesar Rp1.432.272.034,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS.
 - Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp21.554.065.062,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp185.133.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp18.494.283.664,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.195.501.214,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.679.147.184,00.
 - Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra sebesar Rp28.460.950,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Cilacap dan Lapas Samarinda.
 - Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp10.530.566.034,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Ditjen PAS sebesar Rp2.472.259.331,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp7.042.706.703,00, dan Ditjen KI sebesar Rp1.015.600.000,00.
 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp9.622.416.069,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp522.733.215,00, Ditjen PAS sebesar Rp3.933.801.183,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.066.381.671,00, dan BPHN sebesar Rp99.500.000,00.
 - Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+) sebesar Rp11.545.436.455,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.359.411.711,00, Ditjen AHU sebesar Rp174.956.000,00, Ditjen PAS



sebesar Rp313.586.160,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp9.664.243.584,00, dan Ditjen PP sebesar Rp33.239.000,00.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar Rp557.216.189.779,00 diantaranya terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi masing-masing sebesar Rp557.047.388.345,00 dan Rp168.801.434,00.
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-) sebesar Rp2.775.229.323,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp552.351.522,00, Ditjen AHU sebesar Rp15.026.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp105.089.677,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.102.762.124,00.
- Penghapusan sebesar Rp2.945.730.126,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp505.665.353,00, Ditjen AHU sebesar Rp218.812.960,00, Ditjen PAS sebesar Rp809.347.576,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.389.688.237,00, dan BPHN sebesar Rp22.216.000,00.
- Transfer Keluar sebesar Rp467.604.196.966,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp30.447.946.567,00, Ditjen AHU sebesar Rp80.054.479.575,00, Ditjen PAS sebesar Rp32.154.574.861,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp320.478.965.725,00, Ditjen KI sebesar Rp2.109.513.608,00, Ditjen PP sebesar Rp605.422.015,00, Ditjen HAM sebesar Rp661.874.555,00, dan BPHN sebesar Rp1.091.420.060,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp154.686.858.826,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp9.018.056.213,00, Itjen sebesar Rp44.847.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp917.242.174,00, Ditjen PAS sebesar Rp58.614.262.921,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp84.047.362.518,00, Ditjen HAM sebesar Rp4.000.000,00, dan BPHN sebesar Rp2.041.088.000,00.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp35.358.554.772,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp18.456.565.724,00, Ditjen AHU sebesar Rp16.144.001,00, Ditjen PAS sebesar Rp15.135.839.270,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.752.655.777,00.
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar Rp156.838.642,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS.
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola sebesar Rp4.783.500,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Sijunjung dan Rutan Ambon.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp80.822.368.996,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp13.299.646.932,00, Itjen sebesar Rp2.764.014.750,00, Ditjen AHU sebesar Rp446.927.764,00, Ditjen PAS sebesar Rp41.769.891.093,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp18.629.058.616,00, Ditjen KI sebesar Rp490.839.250,00, Ditjen PP sebesar Rp59.314.000,00, Ditjen HAM sebesar Rp989.949.220,00, BPHN sebesar Rp1.766.113.351,00, Balitbang HAM sebesar Rp277.311.000,00, dan BPSDM sebesar Rp329.303.020,00.



Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.851.425.471.800,00 masih termasuk Alat Pemindai Besar sebanyak 29 unit senilai Rp156.355.904.100,00 yang baru diterima satker pengguna pada tahun 2017. Kemenkumham tidak dapat melakukan koreksi pada Laporan Keuangan *Audited* karena sistem pencatatan telah ditutup pada tanggal 27 April 2017 (saat Nota Kesepakatan Angka Aseri Final ditandatangani).

Gedung dan
Bangunan
Rp9.529.676.4
87.148,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp9.529.676.487.148,00 dan Rp8.335.166.890.978,00.

Rincian nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58.

Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2016 dan 2015

Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	1.023.422.688.973,00	1.021.664.016.034,00
Inspektorat Jenderal	1.326.884.427,00	1.326.884.427,00
Ditjen AHU	81.027.585.076,00	73.987.251.126,00
Ditjen Pemasarakatan	6.496.052.575.909,00	5.435.644.384.433,00
Ditjen Imigrasi	1.693.642.809.670,00	1.580.801.968.152,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	47.757.641.734,00	43.382.185.407,00
Ditjen PP	24.625.472.805,00	24.110.506.420,00
Ditjen HAM	9.145.202.860,00	8.974.529.170,00
BPHN	34.609.501.161,00	34.338.014.276,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	118.066.124.533,00	110.937.151.533,00
TOTAL	9.529.676.487.148,00	8.335.166.890.978,00

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	8,335,166,890,978.00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	9,362,139,675.00
Pembelian	734,467,041.00
Transfer Masuk	149,270,608,929.00
Hibah Masuk	559,090,000.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	841,086,575,736.00
Reklasifikasi Masuk	260,594,368,035.00
Perolehan Lainnya	1,302,650,583.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	967,552,000.00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2,282,821,000.00
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	48,462,358.00
Pengembangan Nilai Aset	31,846,342,072.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	255,863,715,256.00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	162,148,488.00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2,130,554,797.00
Pengembangan Melalui KDP	210,645,504,435.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	9,235,275,295.00
Total Mutasi Tambah :	1,776,092,275,700.00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	32,952,921,764.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	4,528,389,272.00
Penghapusan	4,528,377,020.00
Transfer Keluar	149,257,273,930.00
Reklasifikasi Keluar	291,752,435,832.00
Koreksi Pencatatan	86,335,400,190.00
Penghentian Aset dari Penggunaan	12,227,881,522.00
Total Mutasi Kurang :	581,582,679,530.00
Saldo per 31 Desember 2016	9,529,676,487,148.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	1,944,583,132,600.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	7,585,093,354,548.00

Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan saldo awal sebesar Rp9.362.139.675,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp2.177.214.576,00, Ditjen AHU sebesar Rp1.589.137.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp5.377.149.098,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp218.639.001,00.
- Pembelian sebesar Rp734.467.041,00 terdapat pada unit eselon1 Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi masing-masing sebesar Rp45.000.000,00 dan Rp689.467.041,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp149.270.608.929,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp372.851.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp112.169.948.422,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp29.986.261.507,00, dan BPSPDM sebesar Rp6.741.548.000,00.
- Hibah Masuk sebesar Rp559.090.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Narkotika Bandung perolehan dari PT. Fajar Basthi dan DPC Ormas BBC Cab Bale Endah.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp841.086.575.736,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar



- Rp72.957.062.930,00, Ditjen PAS sebesar Rp736.216.235.404,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp31.913.277.402,00.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp260.594.368.035,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp45.172.977.191,00, Ditjen PAS sebesar Rp194.604.844.363,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp20.816.546.481,00.
 - Perolehan Lainnya sebesar Rp1.302.650.583,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi masing-masing sebesar Rp738.060.628,00 dan Rp564.589.955,00.
 - Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp967.552.000,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp329.228.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp374.963.000,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp263.361.000,00.
 - Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp2.282.821.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen dan Ditjen PAS masing-masing sebesar Rp2.058.749.000,00 dan Rp224.072.000,00.
 - Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra sebesar Rp48.462.358,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Pemuda Plantungan, Jawa Tengah.
 - Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp31.846.342.072,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp3.212.291.291,00, Ditjen AHU sebesar Rp2.780.426.800,00, Ditjen PAS sebesar Rp3.919.400.547,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp19.351.873.100,00, Ditjen KI sebesar Rp1.784.901.644,00, Ditjen HAM sebesar Rp170.673.690,00, BPHN sebesar Rp239.350.000,00, dan BPSPDM sebesar Rp387.425.000,00.
 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp255.863.715.256,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp20.638.533.864,00, Ditjen AHU sebesar Rp9.231.666.382,00, Ditjen PAS sebesar Rp207.439.541.208,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp18.323.624.917,00, Ditjen PP sebesar Rp198.212.000,00, dan BPHN sebesar Rp32.136.885,00.
 - Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp162.148.488,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Pare-Pare.
 - Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp2.130.554.797,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.256.563.402,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp557.237.010,00, dan Ditjen PP sebesar Rp316.754.385,00.
 - Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp210.645.504.435,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp38.479.684.305,00, Ditjen AHU sebesar Rp2.142.447.150,00, Ditjen PAS sebesar Rp119.580.268.464,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp42.573.837.573,00, dan Ditjen KI sebesar Rp7.869.266.943,00.
 - Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+) sebesar Rp9.235.275.295,00 terdapat di unit eselon 1 Setjen pada satker Lapas Palu (satker likuidasi).



Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar Rp32.952.921.764,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp20.548.043.555,00, Ditjen PAS sebesar Rp9.357.296.634,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.047.581.575,00.
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-) sebesar Rp4.528.389.272,00 terdapat di unit eselon 1 Setjen pada satker Lapas Palu (satker likuidasi).
- Penghapusan sebesar Rp4.528.377.020,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi masing-masing sebesar Rp4.379.956.020,00 dan Rp148.421.000,00.
- Transfer Keluar sebesar Rp149.257.273.930,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp111.147.137.922,00, Ditjen AHU sebesar Rp226.108.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp7.907.766.500,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp24.697.549.248,00, dan Ditjen KI sebesar Rp5.278.712.260,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp291.752.435.832,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp52.344.009.445,00, Ditjen AHU sebesar Rp8.477.235.382,00, Ditjen PAS sebesar Rp210.239.031.721,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp20.692.159.284,00.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp86.335.400.190,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp5.551.727.721,00, Ditjen PAS sebesar Rp77.694.801.919,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.086.220.550,00.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp12.227.881.522,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp9.800.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp11.309.991.222,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp908.090.300,00.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp94.381.556.
994,00*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp94.381.556.994,00 dan Rp219.702.777.946,00.

Rincian nilai Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 59.
Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	15,923,725,740.00	26,060,907,189.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	187,518,809.00	1,302,145,709.00
Ditjen Pemasyarakatan	46,474,747,775.00	147,445,885,557.00
Ditjen Imigrasi	27,923,329,939.00	40,943,919,760.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0.00	0.00
Ditjen PP	968,500,000.00	968,500,000.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	0.00	77,685,000.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	2,903,734,731.00	2,903,734,731.00
TOTAL	94,381,556,994.00	219,702,777,946.00

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meliputi :

Saldo per 31 Desember 2015	219,702,777,946.00
Mutasi tambah :	
Pembelian	122,063,800.00
Transfer Masuk	8,316,319,691.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	4,745,133,147.00
Reklasifikasi Masuk	13,032,822,643.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	37,415,000.00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	325,726,000.00
Pengembangan Nilai Aset	550,585,795.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3,784,166.00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	29,731,350.00
Pengembangan Melalui KDP	2,765,814,500.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	320,000.00
Total Mutasi Tambah :	29,929,716,092.00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	261,400,983.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	1,049,728,635.00
Transfer Keluar	8,316,319,691.00
Reklasifikasi Keluar	24,829,871,888.00
Koreksi Pencatatan	120,461,215,079.00
Penghentian Aset dari Penggunaan	332,400,768.00
Total Mutasi Kurang :	155,250,937,044.00
Saldo per 31 Desember 2016	94,381,556,994.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	52,144,621,418.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	42,236,935,576.00



Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Pembelian sebesar Rp122.063.800,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Madiun dan Kanim Kotabumi masing-masing sebesar Rp78.383.800,00 dan Rp43.680.000,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp8.316.319.691,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp168.557.400,00, Ditjen PAS sebesar Rp7.804.990.779,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp342.771.512,00.
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp4.745.133.147,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.751.444.467,00, Ditjen PAS sebesar Rp2.915.288.680,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp78.400.000,00.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp13.032.822.643,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp4.374.102.300,00, Ditjen PAS sebesar Rp8.619.221.593,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp39.498.750,00.
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp37.415.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Bengkulu.
- Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp325.726.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Narkotika Tanjung Pinang.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp550.585.795,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Tangerang, Kanim Entikong dan Kanim Kotabumi.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp3.784.166,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Narkotika Cirebon.
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp29.731.350,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanim Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp2.765.814.500,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Pekalongan dan Lapas Banjar Baru.
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+) sebesar Rp320.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Rutan Lubuk Sikaping, Sumatera Barat.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar Rp261.400.983,00 terdapat pada unit eselon 1 BPHN dan Ditjen PAS pada satker Lapas Narkotika Cirebon.
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-) sebesar Rp1.049.728.635,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Jambi.
- Transfer Keluar sebesar Rp8.316.319.691,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp7.799.877.979,00, Ditjen AHU sebesar Rp211.121.900,00, Ditjen PAS sebesar Rp5.112.800,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp300.207.012,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp24.829.871.888,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.725.578.241,00, Ditjen AHU



sebesar Rp251.201.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp19.174.737.626,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.678.355.021,00.

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp120.461.215.079,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp5.800.906.826,00, Ditjen AHU sebesar Rp642.230.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp103.890.245.786,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp10.095.695.582,00, dan BPHN sebesar Rp32.136.885,00.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp332.400.768,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp92.608.935,00, Ditjen AHU sebesar Rp10.074.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp120.334.420,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp109.383.413,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp73.266.156.399,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp73.266.156.399,00 dan Rp77.467.890.093,00. Rincian nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 60.

**Perbandingan Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Unit	Aset Tetap Lainnya	
Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	38,988,756,397.00	38,540,962,517.00
Inspektorat Jenderal	26,057,824.00	26,057,824.00
Ditjen AHU	23,382,711.00	583,671,871.00
Ditjen Pemasarakatan	12,218,717,162.00	18,677,083,714.00
Ditjen Imigrasi	13,505,137,270.00	12,239,321,397.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	614,588,325.00	598,847,325.00
Ditjen PP	413,755,982.00	605,638,982.00
Ditjen HAM	448,484,963.00	387,998,863.00
BPHN	1,533,318,759.00	2,066,755,434.00
Balitbang	1,846,846,239.00	221,593,149.00
BPSDM	3,647,110,767.00	3,519,959,017.00
TOTAL	73,266,156,399.00	77,467,890,093.00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	77.467.890.093,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	79.771.500,00
Pembelian	5.777.156.385,00
Transfer Masuk	1.926.347.282,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	870.070.592,00
Reklasifikasi Masuk	276.030.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	152.500.000,00
Pengembangan Nilai Aset	252.413.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	122.999,00
Total Mutasi Tambah :	9.334.411.758,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	300.000,00
Transfer Keluar	3.865.157.030,00
Reklasifikasi Keluar	5.903.635.596,00
Koreksi Pencatatan	3.311.545.235,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	455.507.591,00
Total Mutasi Kurang :	13.536.145.452,00
Saldo per 31 Desember 2016	73.266.156.399,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	6.833.315.302,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	66.432.841.097,00

Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp79.771.500,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp50.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp72.904.000,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp6.817.500,00.
- Pembelian sebesar Rp5.777.156.385,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.132.448.385,00, Itjen sebesar Rp49.423.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp162.151.660,00, Ditjen PAS sebesar Rp784.111.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.337.646.293,00, Ditjen KI sebesar Rp15.741.000,00, Ditjen HAM sebesar Rp60.486.100,00, BPHN sebesar Rp307.889.857,00, Balitbang HAM sebesar Rp828.309.090,00, dan BPSDM sebesar Rp98.950.000,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp1.926.347.282,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.016.957.582,00, Ditjen PAS sebesar Rp22.561.950,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp61.682.000,00, Balitbang HAM sebesar Rp796.944.000,00, dan BPSDM sebesar Rp28.201.750,00.
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp870.070.592,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi masing-masing sebesar Rp484.727.000,00 dan Rp385.343.592,00.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp276.030.000,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp14.835.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp199.000.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp55.195.000,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp7.000.000,00.



- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp152.500.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Kanwil Gorontalo Divisi Imigrasi.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp252.413.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Ditjen Imigrasi, Kanim Bekasi, dan Kanim Tanjung Redeb.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp122.999,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Kalimantan Barat.

Mutasi Kurang

- Penghapusan sebesar Rp300.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Garut.
- Transfer Keluar sebesar Rp3.865.157.030,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp1.304.675.086,00, Itjen sebesar Rp49.423.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp1.346.167.820,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp131.681.592,00, Ditjen PP sebesar Rp191.883.000,00, dan BPHN sebesar Rp841.326.532,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp5.903.635.596,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp4.235.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp5.273.466.596,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp625.934.000,00.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.311.545.235,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp363.500.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp60.000.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.728.906.771,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.159.318.464,00.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp455.507.591,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp44.210.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp391.065.135,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp20.652.456,00.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp423.520.044
.331,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp423.520.044.331,00 dan Rp440.414.987.596,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian nilai KDP berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :



Tabel 61.
Perbandingan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit	Kontruksi Dalam Pengerjaan	
Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	27,496,778,071.00	149,445,736,737.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	126,304,198,561.00	7,245,750,250.00
Ditjen Pemasyarakatan	189,363,160,913.00	227,809,789,529.00
Ditjen Imigrasi	80,235,941,786.00	51,943,559,539.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	119,965,000.00	3,970,151,541.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	0.00	0.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	0.00	0.00
TOTAL	423,520,044,331.00	440,414,987,596.00

Rincian Mutasi KDP tersebut meliputi :

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	440,414,987,596.00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal KDP	18,149,850.00
Perolehan/Penambahan KDP	126,616,642,330.00
Pengembangan KDP	1,813,590,150,435.00
Koreksi Nilai KDP	6,627,203.00
Transfer Masuk KDP	4,676,426,000.00
Total Mutasi Tambah :	1,944,907,995,818.00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Nilai KDP	5,356,150,892.00
Penghapusan KDP	18,149,850.00
Transfer Keluar KDP	30,752,155,022.00
Reklas KDP menjadi Barang Jadi	1,925,676,483,319.00
Total Mutasi Kurang :	1,961,802,939,083.00
Saldo per 31 Desember 2016	423,520,044,331.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	423,520,044,331.00

Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal KDP sebesar Rp18.149.850,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Kalimantan Tengah.
- Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp126.616.642.330,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar



Rp3.467.822.300,00, Ditjen AHU sebesar Rp193.507.700,00, Ditjen PAS sebesar Rp111.770.997.386,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp11.064.349.944,00, dan Ditjen KI sebesar Rp119.965.000,00.

- Pengembangan KDP sebesar Rp1.813.590.150.435,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp25.388.743.500,00, Ditjen AHU sebesar Rp125.207.033.447,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.526.140.357.149,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp132.954.900.937,00, dan Ditjen KI sebesar Rp3.899.115.402,00.
- Koreksi Nilai KDP (+) sebesar Rp6.627.203,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Lapas Purwokerto.
- Transfer Masuk KDP sebesar Rp4.676.426.000,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen dan Ditjen PAS masing-masing sebesar Rp1.633.137.000,00 dan Rp3.043.289.000,00.

Mutasi Kurang

- Koreksi Nilai KDP (-) sebesar Rp5.356.150.892,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Ditjen AHU sebesar Rp3.487.211.186,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.865.939.706,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.000.000,00.
- Penghapusan KDP sebesar Rp18.149.850,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen pada satker Kanwil Kalimantan Tengah.
- Transfer Keluar KDP sebesar Rp30.752.155.022,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp29.324.754.022,00, Ditjen AHU sebesar Rp52.340.000,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.375.061.000,00.
- Reklas KDP Menjadi Barang Jadi sebesar Rp1.925.676.483.319,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp123.113.907.444,00, Ditjen AHU sebesar Rp2.802.541.650,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.677.541.959.648,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp114.348.807.634,00, dan Ditjen KI sebesar Rp7.869.266.943,00.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp4.953.345.821.
930,00

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp4.953.345.821.930,00 dan Rp4.021.974.585.960,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,851,425,471,800.00	2,949,784,752,610.00	1,901,640,719,190.00
2	Gedung dan Bangunan	9,529,676,487,148.00	1,944,583,132,600.00	7,585,093,354,548.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,381,556,994.00	52,144,621,418.00	42,236,935,576.00
4	Aset Tetap Lainnya	73,266,156,399.00	6,833,315,302.00	66,432,841,097.00
Akumulasi Penyusutan		14,548,749,672,341.00	4,953,345,821,930.00	9,595,403,850,411.00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp461.681.674.908,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp461.681.674.908,00 dan Rp446.864.487.703,00, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1	Software	335,931,358,539.00
2	Lisensi	39,171,349,562.00
3	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000.00
4	ATB Lainnya	86,486,016,807.00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		461,681,674,908.00

Rincian nilai Aset Tak Berwujud berdasarkan unit Eselon I adalah sebagai berikut :



Tabel 62.
Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit	Aset Tak Berwujud	
Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	2,401,521,795.00	2,468,064,730.00
Inspektorat Jenderal	1,262,584,500.00	1,225,002,000.00
Ditjen AHU	46,919,307,362.00	46,890,844,362.00
Ditjen Pemasarakatan	6,702,226,463.00	4,728,290,703.00
Ditjen Imigrasi	387,283,097,247.00	379,401,473,472.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	12,534,963,327.00	10,904,019,827.00
Ditjen PP	823,807,500.00	586,548,500.00
Ditjen HAM	307,520,000.00	305,889,000.00
BPHN	3,199,683,000.00	121,936,395.00
Balitbang	163,370,214.00	148,825,214.00
BPSDM	83,593,500.00	83,593,500.00
TOTAL	461,681,674,908.00	446,864,487,703.00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	446,864,487,703.00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	34,868,684.00
Pembelian	16,774,811,344.00
Transfer Masuk	34,800,996,366.00
Hibah Masuk	4,416,025,500.00
Reklasifikasi Masuk	2,669,001,000.00
Pengembangan Nilai Aset	645,774,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1,061,408,515.00
Total Mutasi Tambah :	60,402,885,409.00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	257,226,759.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	3,799,231.00
Transfer Keluar	34,800,996,366.00
Reklasifikasi Keluar	896,318,601.00
Koreksi Pencatatan	9,421,395,321.00
Penghentian Aset dari Penggunaan	205,961,926.00
Total Mutasi Kurang :	45,585,698,204.00
Saldo per 31 Desember 2016	461,681,674,908.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	304,219,924,435.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	157,461,750,473.00



Penjelasan Transaksi :

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp34.868.684,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen Imigrasi pada satker Perwakilan Imigrasi Berlin.
- Pembelian sebesar Rp16.774.811.344,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Itjen sebesar Rp37.582.500,00, Ditjen AHU sebesar Rp187.902.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp447.643.240,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp14.343.522.104,00, Ditjen KI sebesar Rp1.630.943.500,00, Ditjen PP sebesar Rp44.000.000,00, Ditjen HAM sebesar Rp49.533.000,00, BPHN sebesar Rp19.140.000,00, dan Balitbang HAM sebesar Rp14.545.000,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp34.800.996.366,00 terdapat pada unit eselon 1 Setjen dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp291.002.895,00 dan Rp34.509.993.471,00.
- Hibah Masuk sebesar Rp4.416.025.500,00 terdapat pada satker unit eselon 1 Ditjen PAS dan BPHN masing-masing sebesar Rp3.513.435.500,00 dan Rp902.590.000,00.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.669.001.000,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Ditjen PAS sebesar Rp9.020.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp719.173.000,00, dan BPHN sebesar Rp1.940.808.000,00.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp645.774.000,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Ditjen Imigrasi sebesar Rp218.880.000,00, Ditjen PP sebesar Rp193.259.000,00, dan BPHN sebesar Rp233.635.000,00.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp1.061.408.515,00 terdapat pada satker unit eselon 1 Ditjen Imigrasi.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar Rp257.226.759,00 terdapat pada unit eselon 1 Ditjen PAS pada satker Rutan Serang, Banten.
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-) sebesar Rp3.799.231,00 terdapat pada satker unit eselon 1 Ditjen Imigrasi.
- Transfer Keluar sebesar Rp34.800.996.366,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Ditjen AHU sebesar Rp159.439.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp34.623.130.971,00, dan BPHN sebesar Rp18.426.395,00.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp896.318.601,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp12.000.000,00, Ditjen PAS sebesar Rp239.721.101,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp644.597.500,00.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp9.421.395.321,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp251.045.830,00, Ditjen PAS sebesar Rp1.427.802.294,00, dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp7.734.694.297,00.
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp205.961.926,00 diantaranya terdapat pada beberapa unit eselon 1 yaitu Setjen sebesar Rp94.500.000,00,



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Ditjen PAS sebesar Rp63.559.926,00, dan Ditjen HAM sebesar Rp47.902.000,00.

Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Ditjen Imigrasi masih dalam proses inventarisasi, melalui penelusuran dokumen sumber. Inventarisasi dilakukan untuk memastikan jumlah, kondisi dan kesesuaian pencatatan ATB dalam aplikasi BMN dengan kondisi sebenarnya. Sampai dengan pelaporan tahun 2016, Ditjen Imigrasi telah melakukan koreksi pencatatan ATB senilai Rp7.205.718.279,00. Proses inventarisasi dan koreksi akan dilanjutkan pada tahun 2017.

Saldo ATB senilai Rp461.681.674.908,00 termasuk didalamnya ATB yang usang dan ATB yang perlu direklasifikasi keluar sebesar Rp124.163.969.605,00 dengan rincian:

Tabel 63.
Hasil Inventarisasi ATB Ditjen Imigrasi

No	Kategori ATB	Jumlah (Unit)	Nilai
1.	ATB Tidak Dipergunakan	133	34.500.206.023,00
2.	ATB Direklasifikasi Keluar	6	17.615.758.550,00
3.	ATB Software Reklas ke ATB Lainnya	11	72.048.005.032,00
Total ATB		150	124.163.969.605,00

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa ATB yang sudah tidak digunakan dan belum diusulkan penghapusan senilai Rp34.500.206.023,00, dan ATB yang seharusnya direklasifikasi keluar menjadi Aset Tetap maupun Aset Tetap Lainnya senilai Rp89.663.763.582,00 akan dilakukan koreksi di Tahun 2017.

*Aset Lain-Lain
Rp232.274.117.
943,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp232.274.117.943,00 dan Rp248.012.198.366,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Perbandingan Rincian Aset Lain-lain TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	232,023,495,677.00
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	250,622,266.00
Jumlah		232,274,117,943.00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian nilai Aset Lain-lain berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 64.
Perbandingan Nilai Aset Lain-lain Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit	Aset Lain-lain	
Eselon I	2016	2015
Sekretariat Jenderal	9,664,411,086.00	9,946,221,518.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	51,034,876,131.00	97,847,350,124.00
Ditjen Pemasyarakatan	96,218,361,528.00	52,797,695,569.00
Ditjen Imigrasi	64,873,663,255.00	76,888,590,193.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	768,586,750.00	1,473,709,500.00
Ditjen PP	411,815,771.00	1,052,960,771.00
Ditjen HAM	1,641,904,540.00	604,053,320.00
BPHN	1,086,414,000.00	1,434,146,509.00
Balitbang	476,707,000.00	199,396,000.00
BPSDM	6,097,377,882.00	5,768,074,862.00
TOTAL	232,274,117,943.00	248,012,198,366.00

Rincian Mutasi Aset Lain-lain tersebut meliputi :

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan :

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	247,967,538,026.00
Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	93,838,158,877.00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	45,805,182.00
Total Mutasi Tambah :	93,883,964,059.00
Mutasi Kurang :	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	5,676,414,960.00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	52,690,416,045.00
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	409,714,766.00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	4,248,059,681.00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	3,847,071,002.00
Usulan Barang RB ke pengelola (BMN yang dihentikan)	18,785,110,075.00
Usulan Barang Hilang ke pengelola (BMN yang dihentikan)	8,607,817.00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	24,162,612,062.00
Total Mutasi Kurang :	109,828,006,408.00
Saldo per 31 Desember 2016	232,023,495,677.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	210,188,662,536.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	21,834,833,141.00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan tersebut meliputi :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2015	44,660,340.00
Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	205,961,926.00
Total Mutasi Tambah :	205,961,926.00
Saldo per 31 Desember 2016	250,622,266.00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	243,687,614.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	6,934,652.00

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp514.652.274
.585,00

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp514.652.274.585,00 dan Rp215.060.760.151,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud (ATB)			
1	Software	335,959,939,290.00	294,394,489,004.00	41,565,450,286.00
2	Lisensi	39,171,349,562.00	9,825,435,431.00	29,345,914,131.00
	Jumlah	375,131,288,852.00	304,219,924,435.00	70,911,364,417.00
B	Aset yang tidak digunakan			
1	Aset Tetap yg tdk digunakan	232,023,495,677.00	210,188,662,536.00	21,834,833,141.00
2	ATB yg tdk digunakan	250,622,266.00	243,687,614.00	6,934,652.00
	Jumlah	232,274,117,943.00	210,432,350,150.00	21,841,767,793.00
	Total Akumulasi Aset Lainnya	607,405,406,795.00	514,652,274,585.00	92,753,132,210.00

Uang Muka
dari KPPN
Rp3.358.841.5
27,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.358.841.527,00 dan Rp3.954.305.055,00, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas Dibendahara Pengeluaran. Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 65.
Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Unit Eselon I	Uang Muka dari KPPN	
		2016	2015
1	Sekretariat Jenderal	220,906,551.00	1,887,115,988.00
2	Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
3	Ditjen AHU	111.00	185,874,876.00
4	Ditjen Pemasarakatan	506,537,014.00	196,079,050.00
5	Ditjen Imigrasi	2,623,427,851.00	1,425,508,653.00
6	Ditjen KI	0.00	3,550,000.00
7	Ditjen PP	0.00	10,788,000.00
8	Ditjen HAM	6,470,000.00	0.00
9	B P H N	0.00	40,497,380.00
10	Balitbang HAM	0.00	0.00
11	B P S D M	1,500,000.00	204,891,108.00
TOTAL		3,358,841,527.00	3,954,305,055.00

Sedangkan Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 66.
Rincian Uang Muka KPPN Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Kanwil Setjen Manado	117.650,00	Sisa UP TA. 2016
		30.924.851,00	Sisa TUP TA.2016
2	Pusat data dan Teknologi Informasi	189.864.050,00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	220.906.551,00	
	Ditjen AHU		
3	Kanwil AHU Papua	111,00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	111,00	
	Ditjen Pemasarakatan		
4	Rutan Medan	128.028.000,00	Sisa TUP TA.2016
5	Bapas Kendari	646,00	Sisa UP TA. 2016
6	Bapas Semarang	1.514.900,00	Sisa UP TA.2016
7	Rutan Labuhan Deli	63.988.000,00	Sisa TUP TA.2016
8	Lapas Pematang Siantar	58.910.000,00	Sisa TUP TA.2016
9	Cabang Rutan Gunung Tua	32.019.757,00	Sisa UP TA. 2016
		450.000,00	Sisa TUP TA.2016
10	Lapas Pontianak	50.000.000,00	Sisa UP TA. 2016
		90.000.000,00	Sisa TUP TA.2016
11	Rutan Raba/Bima	871,00	Sisa UP TA. 2016
12	Rutan Bajawa	8.424.381,00	Sisa UP TA. 2016
13	Rutan Maumere	8.172.000,00	Sisa TUP TA.2016
14	Kanwil Pas Manado	16.439.000,00	Sisa UP TA. 2016
15	Kanwil Pas Palu	15.463.000,00	Sisa UP TA. 2016
16	Lapas Wanita Palembang	2.032.200,00	Sisa TUP TA.2016
17	Rutan Putussibau	490.000,00	Sisa UP TA. 2016



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18	Rupbasan Surabaya	5.541.000,00	Sisa TUP TA.2016
19	Rupbasan Jayapura	5.849.000,00	Sisa TUP TA.2016
20	Lapas Narkotika Cirebon	8.056.400,00	Sisa UP TA. 2016
		7.444.500,00	Sisa TUP TA.2016
21	Rupbasan Pangkal Pinang	2.179.359,00	Sisa TUP TA.2016
22	Lapas Anak Mataram	1.534.000,00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	506.537.014,00	
	Ditjen Imigrasi		
23	Kantor Imigrasi Cirebon	1.600.000,00	Sisa UP TA. 2016
24	Kantor Imigrasi Pontianak	9.780.000,00	Sisa UP TA. 2016
25	Perwakilan Imigrasi Di Singapura	2.688,00	Sisa UP TA. 2016
26	Perwakilan Imigrasi Di Kuala Lumpur	360.614.160,00	Sisa UP TA. 2016
27	Perwakilan Imigrasi Di Penang	23.431.175,00	Sisa UP TA. 2016
28	Perwakilan Imigrasi Di Bangkok	41.212.108,00	Sisa UP TA. 2016
29	Perwakilan Imigrasi Di Hongkong	5.478.260,00	Sisa UP TA. 2016
30	Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	34.340.804,00	Sisa UP TA. 2016
31	Perwakilan Imigrasi Di Davao	609.344.769,00	Sisa UP TA. 2016
32	Perwakilan Imigrasi Di Den Haag	44.041.730,00	Sisa UP TA. 2016
33	Perwakilan Imigrasi Di Berlin	92.152.956,00	Sisa UP TA. 2016
34	Perwakilan Imigrasi Di Sidney	52.920.642,00	Sisa UP TA. 2016
35	Perwakilan Imigrasi Di Kuching	11.462.789,00	Sisa UP TA. 2016
36	Perwakilan Imigrasi Di Tawao	305.287.687,00	Sisa UP TA. 2016
37	Perwakilan Imigrasi Di Los Angeles	273.048.811,00	Sisa UP TA. 2016
38	Kantor Imigrasi Ambon	3.836.000,00	Sisa TUP TA. 2016
39	Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	289.772.062,00	Sisa UP TA. 2016
40	Perwakilan Imigrasi Di Beijing	230.250.180,00	Sisa UP TA. 2016
41	Perwakilan Imigrasi Di Johor Bahru	61.096.314,00	Sisa UP TA. 2016
42	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Ekstern	48.128.558,00	Sisa UP TA. 2016
43	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	66.335,00	Sisa UP TA. 2016
44	Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di Rrc	125.559.823,00	Sisa UP TA. 2016
	SUBTOTAL	2.623.427.851,00	
	Ditjen HAM		
45	Kanwil Ditjen HAM Sulawesi Barat	6.470.000,00	Sisa TUP TA.2016
	SUBTOTAL	6.470.000,00	
	BPSDM		
46	Kanwil BPSDM Manado	1.500.000,00	Sisa UP TA. 2016
	SUBTOTAL	1.500.000,00	
	TOTAL	3.358.841.527,00	

Utang kepada Pihak Ketiga Rp175.408.091.116,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp175.408.091.116,00 dan Rp87.090.356.870,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari utang beras 2014 kepada Bulog, biaya perjalanan dinas mutasi pegawai yang belum dibayar, kekurangan gaji dan uang makan pegawai yang belum dibayar, kekurangan belanja bahan makanan narapidana dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 67. Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga TA 2016

No	Type Utang	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	7,430,388,204.00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	136,952,267,169.00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	11,248,776,226.00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	19,776,659,517.00
Grand Total		175,408,091,116.00

Tabel 68.

Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga berdasarkan Eselon I TA 2016

Unit Eselon I	Utang Pihak Ketiga				Total
	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	Utang Pihak Ketiga Lainnya	
Sekretariat Jenderal	89.036.167,00	31.888.550.497,00	10.338.443.772,00	14.515.349.793,00	56.831.380.229
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	24.782.318,00	0,00	6.759.003.889,00	6.783.786.207,00
Ditjen Pemasarakata	7.091.302.520,00	101.977.460.311,00	910.332.454,00	290.657.153,00	110.269.752.438,00
Ditjen Imigrasi	351.061.030,00	1.150.379.962,00	0,00	0,00	1.501.440.992,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	21.731.250,00	0,00	0,00	21.731.250,00
Ditjen PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.531.399.717,00	135.062.904.338,00	11.248.776.226,00	21.565.010.835,00	175.408.091.116,00

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.



Tabel 69.
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Utang Pihak Ketiga	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	56,831,380,229.00	56,672,285,497.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	6,783,786,207.00	56,072,743.00
Ditjen Pemasyarakatan	110,269,752,438.00	24,137,367,491.00
Ditjen Imigrasi	1,501,440,992.00	2,447,756,351.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	21,731,250.00	3,004,571,563.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	289,563,070.00
BPHN	0.00	482,740,155.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	0.00	0.00
TOTAL	175,408,091,116.00	87,090,356,870.00

Sedangkan rincian Utang Pihak Ketiga berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 70.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga	
	2016	Keterangan
Sekretariat Jenderal		
SEKRETARIAT JENDERAL (satker)	1.982.648.000,00	Belanja barang yang masih harus dibayar berupa biaya mutasi untuk 183 pegawai
DKI JAKARTA	2.067.041.129,00	Bulog
	15.970.980,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan kantor
JAWA TENGAH	2.959.296.567,00	Bulog
	40.422.825,00	PLN
	2.753.382,00	Telkom
	1.000.000,00	Belanja Pegawai gaji & Tunjangan
DI YOGYAKARTA	54.048.184,00	Belanja Pegawai Kekurangan Gaji dan uang Makan Desember 2016
JAWA TIMUR	9.005.700.643,00	Bulog dan PLN
ACEH	3.229.892.690,00	Bulog
SUMATERA UTARA	3.983.606.550,00	Bulog
SUMATERA BARAT	6.127.753.209,00	Bulog
RIAU	3.706.409.409,00	Bulog
JAMBI	92.875.918,00	PLN
SUMATERA SELATAN	2.160.848.483,00	Bulog
LAMPUNG	2.062.152.368,00	PLN
KALIMANTAN BARAT	24.848.330,00	PLN
KALIMANTAN TENGAH	1.260.902.738,00	Bulog



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KALIMANTAN SELATAN	3.360.372.318,00	Bulog, PLN dan Telkom
KALIMANTAN TIMUR	5.451.260,00	PLN dan Telkom
SULAWESI UTARA	1.506.888.615,00	Bulog
SULAWESI TENGAH	458.702.235,00	Bulog
SULAWESI SELATAN	2.003.083.681,00	Bulog
SULAWESI TENGGARA	740.495.640,00	Bulog
MALUKU	193.144.560,00	Bulog
BALI	321.701.420,00	Bulog, PLN dan Telkom
NUSA TENGGARA BARAT	106.285.941,00	
NUSA TENGGARA TIMUR	754.200.093,00	Bulog
PAPUA	168.984.882,00	Bulog
BENGKULU	4.842.953.094,00	Bulog
MALUKU UTARA	205.216.095,00	Bulog
BANTEN	2.624.352.825,00	Bulog dan PLN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	605.233.173,00	Bulog
GORONTALO	3.186.000,00	Telkom dan PDAM
KEPULAUAN RIAU	28.120.623,00	PLN dan Telkom
SATKER LIKUIDASI	124.836.369,00	
SUBTOTAL	56.831.380.229,00	
Ditjen AHU		
BHP Jakarta	1.743.842.843,00	Dana Pihak Ketiga
BHP Semarang	2.507.132.644,00	Dana Pihak Ketiga
BHP Surabaya	2.073.911.359,00	Dana Pihak Ketiga, PLN, Telkom dan PDAM
BHP Ujung Pandang	14.672.318,00	Dana Pihak Ketiga, PLN, Telkom dan PDAM
BHP Medan	444.227.043,00	Dana Pihak Ketiga
SUBTOTAL	6.783.786.207,00	
Ditjen Pemasarakatan	110.269.752.438,00	Rincian Terlampir pada Bagian Lampiran 2 a Laporan Keuangan
Ditjen Imigrasi	1.501.440.992,00	Rincian Terlampir pada Bagian Lampiran 2 b Laporan Keuangan
Ditjen Kekayaan Intelektual	21.731.250,00	PT.Pos Indonesia
TOTAL	175.408.091.116,00	

Penjelasan atas Utang Kepada Pihak Ketiga (BULOG) sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekonsiliasi Administrasi Penyaluran Beras BULOG kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA. 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015, disepakati bahwa tunggakan pembayaran beras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA. 2014 sebesar Rp44.501.982.108,00 yang menjadi hutang pada unit organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pada Alokasi Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA. 2015 terdapat Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan beras sebesar Rp41.000.000.000,00 yang berada pada DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, namun pembayaran tunggakan beras TA. 2014 tersebut tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan karena secara akuntansi hutang tersebut merupakan hutang Sekretariat Jenderal.



3. Berdasarkan kondisi diatas, pada TA.2016 Biro Keuangan telah melakukan upaya guna penanggulangan pembayaran tunggakan beras tersebut antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dan meminta petunjuk kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, guna mencari cara penyelesaian pembayaran tunggakan beras tersebut;
 - b. Mengajukan usulan revisi anggaran ke Kementerian Keuangan untuk mengalihkan anggaran pembayaran tunggakan beras yang berada pada DIPA Direktorat Jenderal Pemasaryakatan untuk dialihkan ke DIPA Sekretariat Jenderal;
 - c. Mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan untuk mengalihkan hutang pembayaran beras, yang semula merupakan hutang Sekretariat Jenderal untuk dialihkan menjadi hutang Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.
 - d. Namun usulan revisi anggaran dan usulan pengalihan hutang yang telah diajukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.
4. Sampai dengan TA 2016 Anggaran untuk pembayaran tunggakan/hutang bahan makanan (beras) Narapidana tahun 2014 belum dialokasikan pada DIPA Sekretariat Jenderal TA. 2016.
5. Pembayaran tunggakan/hutang bahan makanan (beras) Narapidana tahun 2014 kepada Bulog akan dialokasikan pembayarannya pada DIPA Sekretariat Jenderal TA.2017.

Hibah Yang
Belum
Disahkan
Rp176.160.000
,00

C.26 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tersaji sebesar Rp176.160.000,00 dan Rp762.237.850,00.

Hibah yang belum disahkan merupakan aset yang diterima oleh Satuan Kerja dan belum disahkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN), namun telah dicatatkan pada aplikasi SIMAK berdasarkan BAST. Proses pengesahan hibah menunggu adanya dispensasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perbandingan Nilai Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 71.
Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Hibah yang Belum Disahkan	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	151,560,000.00	151,560,000.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	0.00	0.00
Ditjen Pemasarakatan	24,600,000.00	537,060,350.00
Ditjen Imigrasi	0.00	0.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0.00	73,617,500.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	0.00	0.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	0.00	0.00
TOTAL	176,160,000.00	762,237,850.00

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 72.
Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2016

Unit Eselon I	Hibah Yang Belum Disahkan	
	2016	Keterangan
Sekretariat Jenderal		
Kanwil Kalimantan Selatan	151.560.000,00	Hibah Tanah dari Tahun 2015 yang diberikan oleh Pemda Setempat dan belum disahkan oleh KPPN
Ditjen Pemasarakatan		
Lapas Bogor Jawa Barat	24.600.000,00	Untuk Kelangsungan Pembinaan di Lapas Bogor
TOTAL	176.160.000,00	

Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp9.157.661,0
0

C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp9.157.661,00 dan Rp36.973.247,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.



Tabel 73.
Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	0,00	33.748.476,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	6.112.661,00	3.224.771,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang	0,00	0,00
BPSDM	3.045.000,00	0,00
TOTAL	9.157.661,00	36.973.247,00

Rincian penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri dari :

1. Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran Satker Lembaga Pemasarakatan Permisian sebesar Rp6.112.661,00.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan pajak penghasilan (PPh 21) atas honor narasumber pada kegiatan perkuliahan umum Taruna AKIP pegawai yang belum dibayar.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp223.094.509
.992,00*

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp223.094.509.992,00 dan Rp74.963.095.711,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2016

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Perorangan/ Badan lainnya	222,333,300,541.00	Jasa Hukum untuk pengurusan Hak dan Perizinan
Badan Swasta Lainnya	761,209,451.00	Sewa gedung dan bangunan
Total	223,094,509,992.00	

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 74.
Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Unit Eselon I	Pendapatan Diterima Di Muka	
	2016	2015
Sekretariat Jenderal	113,607,201.00	270,803,780.00
Inspektorat Jenderal	0.00	0.00
Ditjen AHU	5,848,400,000.00	19,061,607,500.00
Ditjen Pemasarakatan	101,095,890.00	318,573,261.00
Ditjen Imigrasi	192,127,282.00	171,804,920.00
Ditjen Kekayaan Intelektual	216,822,592,952.00	55,140,306,250.00
Ditjen PP	0.00	0.00
Ditjen HAM	0.00	0.00
BPHN	16,686,667.00	0.00
Balitbang	0.00	0.00
BPSDM	0.00	0.00
TOTAL	223,094,509,992.00	74,963,095,711.00

Penjelasan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapatan Diterima di Muka pada Sekretariat Jenderal merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Jumlah	Keterangan
Satker Setjen	14,666,664.00	Sewa gedung berupa pemasangan tower PT. Adi Cipta yang masa kontraknya berakhir TA.2017
Kanwil DKI Jakarta	96,025,537.00	Pendapatan sewa gedung oleh Bank BRI
Kanwil Mataram	2,915,000.00	
TOTAL	113,607,201.00	

2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menyetorkan ke Kas Negara atas penerimaan pengumuman perseroan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Akan tetapi, masih terdapat BN/TBN yang belum dilakukan pengumuman dikarenakan mekanisme pencairan anggaran. Atas kejadian tersebut, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerbitkan jurnal BNTBN yang tercatat sebagai piutang sehingga transaksi sebesar Rp19.061.607.500,00 telah dihapus dari neraca. Saldo sebesar Rp5.848.400.000,00 berasal dari penyajian voucher yang telah dibeli oleh masyarakat, akan tetapi belum digunakan dalam pelayanan jasa hukum pada aplikasi AHU Online. Mutasi pendapatan diterima dimuka dapat disajikan sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAHUN	NAMA PELAYANAN	JUMLAH TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI
2015	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	749	187,250,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	262	65,500,000.00
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	225	22,500,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	973	973,000,000.00
	Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	461	230,500,000.00
	Pencarian/unduh (search/download) data Perseroan Secara Online	255	12,750,000.00
	Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	738	184,500,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	59	14,750,000.00
2016	Pendaftaran Wasiat Secara Online	4,473	447,300,000.00
	Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan	1,408	141,500,000.00
	Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	1,891	189,100,000.00
	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	1,354	281,350,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	844	211,000,000.00
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	1,145	145,850,000.00
	Pengesahan Badan Hukum Perseroan	8	8,000,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	1,322	1,322,000,000.00
	Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	889	718,000,000.00
	Pencarian/unduh (search/download) data Perseroan Secara Online	521	40,300,000.00
	Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	1,428	319,400,000.00
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	441	110,250,000.00
J U M L A H		19,446	5,624,800,000.00

3. Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi dengan rincian sebagai berikut :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Satker	Jumlah	Keterangan
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	74,405,833.00	Sewa ATM dan Kantor BRI
Kantor Imigrasi Semarang	4,400,000.00	Sewa ATM dan Koperasi
Kantor Imigrasi Palembang	889,333.00	Sewa ATM
Kantor Imigrasi Ujung Pandang	15,569,177.00	Sewa ATM BNI
Kantor Imigrasi Palangkaraya	4,500,000.00	Sewa ATM dan Koperasi
Kantor Imigrasi Jakarta Timur	55,621,342.00	Sewa ATM dan Koperasi
Kantor Imigrasi Surakarta	18,696,333.00	Sewa ATM dan Koperasi
Kantor Imigrasi Pemalang	8,045,264.00	Sewa ATM dan Koperasi
Kantor Imigrasi Pati	10,000,000.00	Sewa ATM
TOTAL	192,127,282.00	

4. Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Jumlah	Keterangan
Rutan Pekalongan	1,737,920.00	Pendapatan sewa ATM BRI DAN LP Ngawi dan Sewa KPPDK
Lapas Batam	4,500,000.00	
Lapas Wanita Semarang	60,772.00	
Rutan Purwokerto	32,976.00	
Lapas Ngawi	24,222,000.00	pekerjaan aset tetap berupa sewa
Lapas Singkawang	4,880,000.00	pekerjaan aset tetap berupasewa tanah Jan - Juli
Lapas Balikpapan	62,758,888.00	Sewa Bangunan Kantin
Lapas Tarakan	445,000.00	Sewa Bangunan Kantin
Rutan Kota Agung	2,458,334.00	Sewa Bangunan Kantin
TOTAL	101,095,890.00	

5. Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam periode tersebut. Rincian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Nilai
1	Biaya pemeliharaan / Annuity	216,643,741,250.00
2	Sewa BRI	178,851,702.00
Jumlah		216,822,592,952.00

6. Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada kantor pusat Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa Kantin.



Ekuitas

Rp23.088.519.
377.924,00

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp23.088.519.377.924,00 dan Rp22.206.545.171.185,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PNBP

Lainnya

Rp3.165.273.
844.117,00

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.165.273.844.117,00 dan Rp4.264.580.644.852,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	185.422.600,00	43.266.610,00	,328,56
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	0,00	7.130.000,00	(100,00)
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	2.528.717.281,00	661.567.821,00	282,23
Pendapatan Penjualan Informasi Penerbitan Film Survey Pemetaan dan	0,00	800.000,00	(100,00)
Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi	0,00	47.500.000,00	(100,00)
Pendapatan Penjualan Lainnya	307.077.507,00	561.565.872,00	(53,19)
Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya	(9.472.561,00)	0,00	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.928.758.989,00	6.878.237.980,00	0,73
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	(1.529.893,00)	(735.390,00)	108,04
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	20.464.300,00	134.642.862,00	(84,80)
Pendapatan Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	460.000,00	(100,00)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	2.076.000,00	(100,00)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1.809.541.405,00	457.201.531,00	295,79
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	21.106.400,00	28.718.200,00	(26,51)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	1.949.807.256.319,00	3.084.322.562.871,00	(36,78)
Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan	(188.850.000,00)	(6.080.000,00)	3.006,09
Pendapatan Hak dan Perijinan	1.179.692.566.228,00	1.124.806.622.779,00	4,88
Pendapatan Sensor/Karantina Pengawasan/Pemeriksaan	400.000,00	553.135.000,00	(99,93)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	2.694.495.291,00	1.432.319.366,00	88,12
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.227.864.352,00	210.597.772,00	483,04
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	0,00	81.645,00	(100,00)
Pendapatan Uang Pewarganegaraan	2.789.550.000,00	2.220.500.000,00	25,63
Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	323.986.012,00	0,00	-
Pendapatan Bea Lelang	0,00	55.530.225,00	(100,00)
Pendapatan atas Penertiban SP2D dalam Rangka TSA	0,00	1.710.000,00	(100,00)
Pendapatan Jasa Lainnya	1.041.007.071,00	1.103.432.517,00	(5,66)
Pendapatan Bunga Lainnya	0,00	196.005,00	(92,03)
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	0,00	694.000,00	(100,00)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	21.170.000,00	(69,73)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.108.959.110,00	1.606.318.541,00	93,55
Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	7.700.280,00	37.991.048,00	(79,73)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	23.372.930,00	45.359.802,00	(48,47)
Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	0,00	500.000,00	(100,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Anggaran Lainlain	12.955.450.496,00	39.257.689.171,00	(67,00)
Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	0,00	68.754.453,00	(100,00)
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	0,00	2.060.000,00	(100,00)
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara	0,00	17.068.171,00	(100,00)
JUMLAH	3,165,273,844,117,00	4,264,580,644,852,00	(25,78)

Selisih antara Pendapatan di LO dengan Belanja Pendapatan di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan PNBPN LO	3.165.273.844.117,00
Pendapatan PNBPN LRA	3.375.662.350.209,00
Selisih Antara LO dan LRA	(210.388.506.092,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akhir	60.336.607,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Awal	39.515.770,00
Kenaikan/Penurunan Pendapatan YMHD (c - d)	20.820.837,00
Piutang PNBPN Akhir	415.865.420.313,00
Piutang PNBPN Awal	443.219.597.907,00
Kenaikan/Penurunan Piutang PNBPN (f - g)	(27.354.177.594,00)
Kas Di Bendahara Penerimaan Akhir	3.760.180.498,00
Kas Di Bendahara Penerimaan Awal	8.158.498.587,00
Kenaikan/Penurunan Kas di Bend. Penerima (i - j)	(4.398.318.089,00)
Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	223.094.509.992,00
Pendapatan Diterima Dimuka Awal	74.963.095.711,00
Kenaikan/Penurunan Pend. Ditrn Dimuka (l - m)	148.131.414.281,00
Pendapatan TP/TGR (42392x)	655.196.690,00
Pendapatan Pengembalian Belanja (42395x)	16.667.213.658,00
PNBP yang membentuk Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (o + p)	17.322.410.348,00
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN (42312x)	2.283.796.036,00
PNBP yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (s)	2.283.796.036,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja	176.108.261,00
Jurnal Pembayaran Piutang PNBPN dengan menggunakan Akun 42395x	15.181.960.730,00
Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan atau Pengembalian Belanja Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	(25.925.063.050,00)
Pendapatan PNBPN LO = b + e + h + k - n - q - s - t + u + v	3.165.273.844.117,00
Selisih (a - v)	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban
Pegawai
Rp4.567.804.
535.642,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.567.804.535.642,00 dan Rp4.434.070.015.484,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.830.655.838.188,00	1.680.755.474.479,00	8,92
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(210.173.498,00)	(306.113.357,00)	(31,34)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(942.840,00)	(31.353.100,00)	(96,99)
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.470.133,00	42.491.700,00	(25,94)
Beban Tunj Suami/Istri PNS	124.418.650.883,00	120.780.524.817,00	3,01
Pengembalian Beban Tunj Suami/Istri PNS	(36.860.519,00)	(59.706.867,00)	(38,26)
Beban Tunj Anak PNS	35.896.445.250,00	35.042.671.375,00	2,44
Pengembalian Beban Tunj Anak PNS	(6.017.826,00)	(9.132.808,00)	(34,11)
Pengembalian Beban Tunj Struktural PNS	(68.396.605,00)	(91.003.052,00)	(24,84)
Beban Tunj Struktural PNS	63.634.299.072,00	63.824.951.950,00	(0,30)
Beban Tunj Fungsional PNS	91.028.776.558,00	89.391.160.501,00	1,83
Pengembalian Beban Tunj Fungsional PNS	(101.286.172,00)	(70.320.000,00)	44,04
Beban Tunj PPh PNS	18.097.722.528,00	35.114.509.890,00	(48,46)
Pengembalian Beban Tunj PPh PNS	(610.640,00)	(420.098,00)	45,36
Pengembalian Beban Tunj Beras PNS	(4.517.252,00)	(32.257.794,00)	(86,00)
Beban Tunj Beras PNS	103.602.234.740,00	104.826.147.550,00	(1,17)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Uang Makan PNS	333.844.866.909,00	343.779.594.077,00	(2,89)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(70.565.486,00)	(532.780.772,00)	(86,76)
Beban Tunj Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	381.575.000,00	400.250.000,00	(4,67)
Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	(4.430.000,00)	0,00	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	5.579.685.000,00	5.646.604.000,00	(1,19)
Beban Tunj Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff	139.319.488,00	0,00	-
Beban Tunj Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	15.657.000,00	735.432.842,00	(97,87)
Beban Tunjangan Umum PNS	25.012.140.000,00	26.560.732.000,00	(5,83)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(272.164.239,00)	(166.231.071,00)	63,73
Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	0,00	27.552.000,00	(100,00)
Pengembalian Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0,00	(982,00)	(100,00)
Beban Tunj Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	1.800.000,00	61.874.400,00	(97,09)
Beban Tunj Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0,00	4.858,00	(100,00)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	26.724.000,00	0,00	-
Beban Uang Lembur	24.971.126.060,00	28.076.410.150,00	(11,06)
Pengembalian Beban Uang Lembur	(5.802.550,00)	(28.360.850,00)	(79,54)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.911.247.972.460,00	1.904.683.362.851,00	0,34



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	(4.352.053.205,00)	(100,00)
JUMLAH	4.567.804.535.642,00	4.434.070.015.484,00	3,02

Selisih antara Beban Pegawai di LO dengan Belanja Pegawai di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Beban Pegawai LO	4.567.804.535.642,00
Belanja Pegawai LRA	4.564.697.512.607,00
Selisih Antara LO dan LRA	3.107.023.035,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	8.776.376.151,00
Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	11.886.028.186,00
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Pegawai	0,00
Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	2.629.000,00
Beban Pegawai Total = b - c + d - e	4.567.804.535.642,00
Selisih (a - f)	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban
Persediaan
Rp157.923.41
6.543,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp157.953.416.543,00 dan Rp255.316.182.398,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	119.950.434.553,00	195.843.635.668,00	(38,75)
Beban Persediaan amunisi	95.638.471,00	134.962.457,00	(29,14)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	404.294.386,00	368.359.466,00	9,76
Beban Persediaan bahan baku	6.338.151.914,00	16.080.419.999,00	(60,58)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	20.552.664.171,00	17.994.647.747,00	14,05
Beban Persediaan Lainnya	10.612.233.048,00	24.894.157.061,00	(57,37)
JUMLAH	157.953.416.543,00	255.316.182.398,00	(38,15)

Selisih antara Beban Persediaan di LO dengan Belanja Persediaan di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Beban Persediaan LO	157.923.416.543,00
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	401.555.012.736,00
Selisih Antara LO dan LRA	(243.631.596.193,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Persediaan Awal	521.360.073.588,00
Persediaan Akhir	501.457.950.598,00
Kenaikan/Penurunan Persediaan (c-d)	19.902.122.990,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	4.265.334.805,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	3.293.225.630,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	9.565.000,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	40.045.200,00
Blnj Brg Persediaan Akun 523xxx (f + g + h + i + j + k)	7.608.170.635,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	25.989.532.206,00
Beban Persediaan Suku Cadang	3.328.821.539,00
Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (m + n)	29.318.353.745,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	70.990.054,00
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	42.155.850,00
Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	413.036.212,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	298.253.508.067,00
Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO (p + q + r + s)	298.779.690.183,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan	6.077.763.896,00
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	0,00
Transfer Keluar Barang Persediaan	(671.226.101.709,00)
Transfer Masuk Barang Persediaan	643.141.185.678,00
Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	23.465.524.832,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan (Tambah)	0,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan (Kurang)	0,00
Pendapatan Penyesuain Nilai Persediaan	343.072.073.279,00
Beban Penyesuain Nilai Persediaan	279.783.810.953,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1.486.435.393,00
Penghapusan Barang Persediaan	(1.829.845.688,00)
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	7.985.840.762,00
Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan	148.050.446,00
Beban Persediaan Total = (b + e + l - o - t + u - v + w + x + y + z + aa + ab - ac - ad)	157.923.416.543,00
Selisih (a - ae)	0,00

Beban Barang dan Jasa Rp2.339.521.711.965,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.339.521.711.965,00 dan Rp2.023.941.933.253,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(13.949.000,00)	(41.188.487,00)	(66,13)
Beban Keperluan Perkantoran	199.940.348.277,00	151.247.990.130,00	32,19
Beban Pengadaan Bahan Makanan	975.276.586.237,00	744.139.001.967,00	31,06



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian Beban			
Pengadaan Bahan	(403.863.795,00)	(756.673.832,00)	(46,63)
Makanan			
Pengembalian Beban			
Penambah Daya Tahan	(3.682.445,00)	(1.656.500,00)	122,30
Tubuh			
Beban Penambah Daya			
Tahan Tubuh	38.320.039.003,00	31.270.116.260,00	22,55
Beban Pengiriman Surat			
Dinas Pos Pusat	8.220.674.975,00	7.219.608.891,00	13,87
Pengembalian Beban			
Honor Operasional Satuan	(95.518.000,00)	(24.925.250,00)	283,22
Kerja			
Beban Honor Operasional			
Satuan Kerja	61.999.720.488,00	50.075.172.092,00	23,81
Beban Barang Operasional			
Lainnya	43.212.322.154,00	168.092.134.261,00	(74,29)
Pengembalian Beban			
Barang Operasional	(3.010.600,00)	(8.117.210,00)	(62,91)
Lainnya			
Beban Bahan			
	178.804.380.405,00	189.942.654.505,00	(5,86)
Pengembalian Beban			
Bahan	(91.868.863,00)	(9.832.621,00)	834,33
Beban Honor Output			
Kegiatan	39.198.533.049,00	42.405.077.016,00	(7,56)
Pengembalian Beban			
Honor Output Kegiatan	(104.191.375,00)	(392.493.750,00)	(73,45)
Beban Barang Non			
Operasional Lainnya	220.940.021.622,00	230.975.370.425,00	(4,34)
Pengembalian Beban			
Barang Non Operasional	(353.169.275,00)	(169.108.960,00)	108,84
Lainnya			
Beban Langganan Listrik			
	131.539.064.751,00	121.075.464.138,00	8,64
Pengembalian Beban			
Langganan Listrik	(58.991.834,00)	(62.225.693,00)	(5,20)
Beban Langganan Telepon			
	7.272.405.977,00	8.465.695.124,00	(14,10)
Pengembalian Beban			
Langganan Telepon	0,00	(192.507,00)	(100,00)
Beban Langganan Air			
	14.359.197.399,00	12.366.567.019,00	16,11



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian Beban Langganan Air	0,00	(1.711.145,00)	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15.804.987.414,00	11.528.640.195,00	37,09
Beban Jasa Pos dan Giro	4.770.586.407,00	3.155.273.220,00	51,19
Pengembalian Beban Jasa Pos dan Giro	(279.120,00)	0,00	-
Beban Jasa Konsultan	128.515.061.246,00	1.260.789.540,00	10.093,22
Pengembalian Beban Jasa Konsultan	0,00	(2.039.000,00)	(100,00)
Beban Sewa	160.094.356.003,00	147.569.772.060,00	8,49
Pengembalian Beban Sewa	(84.269.097,00)	(1.452.000,00)	5,703,66
Beban Jasa Profesi	57.927.242.393,00	52.603.638.674,00	10,12
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(570.173.750,00)	(583.894.250,00)	(2,35)
Beban Jasa Lainnya	54.798.841.269,00	50.991.276.580,00	7,47
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(13.883.400,00)	(3.328.500,00)	317,11
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	181.559.450,00	3.694.425.858,00	(95,09)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	10.775.000,00	(2.528.408.000,00)	(100,43)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	123.201.000,00	0,00	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	8.658.000,00	450.513.003,00	(98,08)
JUMLAH	2.339.521.711.965,00	2.023.941.933.253,00	15,59

Selisih antara Barang dan Jasa di LO dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Barang dan Jasa LO	2.339.521.711.965,00
Belanja Barang dan Jasa LRA	2.263.169.261.553,00
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	47.042.734.238,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	129.550.387.017,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	24.851.226,00
Beban yang membentuk Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	24.851.226,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	0,00
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan	6.077.763.896,00
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	123.924.199,00
Jurnal Manual Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	94.028.800,00
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	176.108.261,00
Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	17.280.565,00
Beban Ekstrakomtable	324.193.450,00
Beban Barang dan Jasa Total = b - c + d - e - f	2.339.521.711.965,00
Selisih (a - g)	0,00

Beban Pemeliharaan Rp441.849.879.018,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp441.849.879.018,00 dan Rp420.917.650.883,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	221.659.506.504,00	232.532.103.479,00	(4,68)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(19.625.966,00)	(33.461.960,00)	(41,35)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.093.039.249,00	2.294.758.623,00	(8,79)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	(10.925.000,00)	(3.791.000,00)	188,18
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.200.643.058,00	143.842.031.654,00	24,58
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(47.567.000,00)	(2.456.042,00)	1.836,73
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	732.979.819,00	1.123.329.091,00	(34,75)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.909.109.892,00	8.381.819.819,00	(5,64)
Beban Pemeliharaan Irigasi	29.689.000,00	0,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	402.460.607,00	312.118.525,00	28,94
Beban Pemeliharaan	579.640.110,00	(4.435.000,00)	(13.169,68)
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.575.000,00	547.955.166,00	(99,53)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	25.989.532.206,00	27.811.503.287,00	(6,55)
Beban Persediaan suku cadang	3.328.821.539,00	4.116.175.241,00	(19,13)
JUMLAH	441.849.879.018,00	420.917.650.883,00	4,97

Selisih antara Beban Pemeliharaan di LO dengan Belanja Pemeliharaan di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Beban Pemeliharaan LO	441.849.879.018,00
Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	422.584.859.789,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	25.989.532.206,00
Beban Persediaan Suku Cadang	3.328.821.539,00
Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (c + d)	29.318.353.745,00
Blanj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	4.265.334.805,00
Blanj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	3.293.225.630,00
Blanj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	9.565.000,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	40.045.200,00
Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	7.608.170.635,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset	2.315.659.415,00
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	148.050.446,00
Jurnal Manual Belanja Barang yang masih harus dibayar dengan menggunakan Akun 523	15.970.980,00
Kesalahan Pencatatan Jurnal	2.575.000,00
Beban Pemeliharaan Total = b + e - l	441.849.879.018,00
Selisih (a - m)	0,00

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp468.275.24
3.929,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp468.275.243.929,00 dan Rp327.740.781.725,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	259.193.764.318,00	215.710.484.782,00	20,16
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(7.208.431.972,00)	(6.429.210.126,00)	12,12
Beban Perjalanan Tetap	0,00	927.377.500,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.232.523.879,00	38.939.130.944,00	11,03
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(55.779.700,00)	(61.631.000,00)	(9,49)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(836.602.958,00)	(71.104.660,00)	1,076,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.336.232.778,00	21.866.914.090,00	125,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.684.681.242,00	34.063.217.136,00	125,12
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(3.886.832.505,00)	(1.784.366.603,00)	117,83
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(7.827.544.270,00)	(3.334.897.086,00)	134,72
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	44.348.029.768,00	21.478.450.134,00	106,48
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	45.000.000,00	0,00	-



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(747.687.680,00)	(230.653.412,00)	224,16
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15.997.891.029,00	6.667.070.026,00	139,95
JUMLAH	468.275.243.929,00	327.740.781.725,00	42,88

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas di LO dengan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a	Beban Perjalanan Dinas LO	468.275.243.929,00
b	Belanja Perjalanan Dinas LRA	470.158.278.311,00
c	Pembayaran Utang Blj. Perjadin TAYL	3.902.368.382,00
d	Utang Belanja Perjadin Tahun Anggaran Berjalan	1.986.588.000,00
	FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
e	Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0,00
f	Beban Perjalanan Dinas Total = b - c + d - e	468.275.243.929,00
	Selisih (a - f)	0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp298.779.690.183,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp298.779.690.183,00 dan Rp515.658.479.217,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	9.309.000,00	(100,00)
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	70.990.054,00	548.377.303,00	(87,05)
Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	42.155.850,00	42.401.600,00	(0,58)
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	413.036.212,00	789.053.770,00	(47,65)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	298.253.508.067,00	513.173.877.239,00	(41,88)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	129.800,00	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	1.095.330.505,00	(100,00)
JUMLAH	298.779.690.183,00	515.658.479.217,00	(42,06)

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada LRA terdapat selisih, dimana selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a	Beban Barang Utk Diserahkan ke Masy. LO	298.779.690.183,00
b	Belanja Barang Utk Diserahkan ke Masy. LRA	42.155.850,00
c	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00
d	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	70.990.054,00
e	Beban Jalan, Irigasi, Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
f	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	413.036.212,00
g	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	298.253.508.067,00
h	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
i	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
j	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO (c + d + e + f + g + h + i)	298.737.534.333,00
k	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat = (b + j)	298.779.690.183,00
	Selisih (a - k)	0,00

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kesalahan tersebut terdapat pada TA 2015.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp122.603.050,00 dengan rincian sebagai berikut.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	0,00	122.603.050,00	(100,00)
JUMLAH	0,00	122.603.050,00	(100,00)

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp836.164.40
3.465,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp836.164.403.465,00 dan Rp634.430.458.635,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 dan TA 2015*

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	531.061.775.845,00	407.638.810.454,00	30,28
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	252.202.364.824,00	198.038.546.041,00	27,35
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.983.132.254,00	6.436.055.616,00	(22,57)
Beban Penyusutan Irigasi	2.172.047.828,00	2.985.004.440,00	(27,23)
Beban Penyusutan Jaringan	3.550.732.452,00	5.665.849.349,00	(37,33)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.080.518.636,00	5.526.998.413,00	(80,45)
Beban Amortisasi Software	32.183.691.439,00	0,00	-
Beban Amortisasi Lisensi	3.973.961.689,00	0,00	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	9.926.129,00	0,00	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	50.906.900,00	(100,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	4.946.252.369,00	8.088.287.422,00	(38,85)
JUMLAH	836.164.403.465,00	634.430.458.635,00	31,80

Selisih antara Beban Penyusutan dan Amortisasi di LO dengan Akumulasi Penyusutan dan Akumulasi Amortisasi dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	836.164.403.465,00
Akumulasi Penyusutan Awal	(4.237.035.346.111,00)
Akumulasi Penyusutan Akhir	(5.467.998.096.515,00)
Akumulasi Penyusutan --- Saldo Awal	0,00
Akumulasi Penyusutan --- Transfer Masuk	(256.750.290.890,00)
Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Tambah	(392.082.165.084,00)
Akumulasi Penyusutan --- Reklas Masuk	(100.873.811.551,00)
Akumulasi Penyusutan --- Hibah Masuk	0,00
Akumulasi Amortisasi --- Penyusutan Pertama Kali	0,00
Akumulasi Amortisasi --- Koreksi Tambah	(311.914.073.296,00)
Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(1.061.620.340.821,00)
Akumulasi Amortisasi --- Koreksi Kurang	15.930.257.800,00
Akumulasi Penyusutan --- Transfer Keluar	267.597.801.867,00
Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Kurang	214.167.949.603,00
Akumulasi Penyusutan --- Reklas Keluar	100.873.811.551,00
Akumulasi Penyusutan --- Hibah Keluar	0,00
Akumulasi Penyusutan --- Penghapusan BMN	63.601.610.143,00
Akumulasi Penyusutan --- Transaksi Normalisasi Aset Tetap	(229.500,00)
Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	662.171.201.464,00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset	4.547.592.681,00
Jurnal Manual atas Beban Penyusutan	103.199.737,00
Beban Penyusutan Total = b - c + k + s + t	836.164.403.465,00
Selisih (a - u)	0,00

Beban
 Penyisihan
 Piutang Tak
 Tertagih
 Rp17.776.217
 .241,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp17.776.217.241,00 dan Rp258.700.396.723,00 dengan rincian sebagai berikut.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	17.855.499.545,00	258.702.597.765,00	(93,10)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	1.504.705,00	0,00	-
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	0,00	676.037,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan	(72.895.509,00)	4.702.921,00	(1650,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang	(7.891.500,00)	(7.580.000,00)	4,11
JUMLAH	17.776.217.241,00	258.700.396.723,00	(93,13)

Rincian perhitungan pada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

a	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	(17.776.217.241,00)
b	Penyisihan Piutang Akhir	(371.025.315.991,00)
c	Penyisihan Piutang Awal	(353.249.935.224,00)
d	Penghapusan Piutang	0,00
e	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	836.474,00
j	Beban Penyisihan Piutang Total = b - c - d	(17.776.217.241,00)
	Selisih (a - e)	-

Beban Lain-lain
Rp0,00

D.11 Beban Lain-lain

Beban ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kesalahan tersebut terdapat pada TA 2015. Beban Lain-lain Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.692.970,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Lain-lain TA 2016 dan TA 2015

Uraian Jenis Beban	2016	2015	Naik (Turun) %
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	0,00	4.692.970,00	(100,00)
JUMLAH	0,00	4.692.970,00	(100,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kegiatan Non
Operasional
Rp108.983.84
8.892,00

D.12. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah surplus Rp108.983.848.892,00 dan Rp103.673.877,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2016 dan TA 2015*

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar = (a-b)	(13.836.292.306,00)	(7.307.875.263,00)	89,33
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar (a)	2.283.796.036,00	3.837.794.885,00	(40,49)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	69.921.150,00	2.155.112,00	3.144,43
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	149.758.000,00	200.617.270,00	(25,35)
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli	0,00	0,00	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.064.116.886,00	3.635.022.503,00	(43,22)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar (b)	16.120.088.342,00	11.145.670.148,00	44,63
Beban Kerugian Pelepasan Aset	16.120.088.342,00	11.145.670.148,00	44,63
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya = (c-d)	122.820.141.198,00	7.411.549.140,00	1.557,15
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (c)	404.250.923.885,00	12.424.508.122,00	3.153,66
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	232.762.946,00	58.950.293,00	294,85
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	210.127.814,00	1.361.292.500,00	(84,56)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.323.903.384,00	670.318.727,00	97,50
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.501.153.635,00	2.546.546.360,00	76,76



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.561.141.176,00	4.967.420.745,00	92,48
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	32.878.650,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	124.313.523,00	(100,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	102.064.359,00	0,00	-
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	12.138.895,00	0,00	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	45.235.558.397,00	2.662.787.324,00	1.598,80
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	343.072.073.279,00	0,00	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (d)	281.430.782.687,00	5.012.958.982,00	5.514,07
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	24.851.226,00	4.913.109,00	405,81
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	279.783.810.953,00	0,00	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1.486.435.393,00	5.008.045.873,00	(70,32)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	93.194.565,00	0,00	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	42.490.550,00	0,00	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL = (a-b) + (c-d)	108.983.848.892,00	103.673.877,00	105.021,80



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp22.206.545.171.185,00

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp22.206.545.171.185,00 dan Rp21.341.605.273.417,00.

Surplus
(Defisit) LO
(Rp5.853.837.404.977,00)

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar (Rp5.853.837.404.977,00) dan (Rp4.606.219.375.609,00).

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.3.1. PENYESUAIAN NILAI ASET

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.785.578.129,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-9599/PB.6/2016 tanggal 25 November 2016 perihal Rilis *Update* Aplikasi SAIBA Versi 3.3, SIMAK-BMN Tingkat Satker Versi 16.0, dan Aplikasi Persediaan Versi 16.0.0 yang menyatakan bahwa selama ini akun Penyesuaian Nilai Persediaan yang dihasilkan dari koreksi otomatis persediaan, koreksi masuk/keluar persediaan, dan reklasifikasi masuk/keluar persediaan diperlakukan sebagai penyesuaian nilai aset tahun berjalan dan disajikan dalam LPE. Sejak dikeluarkan Aplikasi SAIBA Versi 3.3 dilakukan perubahan dimana Akun Penyesuaian Nilai Persediaan yang berada disisi Kredit akan di-*mapping* menjadi Akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511), sedangkan Akun Penyesuaian Nilai Persediaan yang berada disisi Debet akan di-*mapping* menjadi akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311). Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan disajikan dalam Laporan Operasional (LO), sebagai bagian dari Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Akun yang dimungkinkan untuk



disajikan dalam pos Penyesuaian Nilai Aset tahun berjalan pada LPE hanya Setoran Surplus BLU (391141).

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp22.991.058.
641,00*

E.3.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp22.991.058.641,00 dan Rp2.658.772.361,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 75.
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	5.095.682.435,00
Amunisi	57.676.912,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	6.353.412.713,00
Suku Cadang	292.683.961,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	(120.000,00)
Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	147.900.000,00
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	85.909.935,00
Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan ke Masyarakat	5.568.904.485,00
Bahan Baku	222.692.728,00
Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	5.539.983,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	4.736.872.262,00
Persediaan Lainnya	423.003.227,00
TOTAL KOREKSI	22.991.058.641,00



Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp57.174.605.
085,00

E.3.3. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap oleh KPKNL setempat. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57.174.605.085,00 dan Rp0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 76.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2016

Satuan Kerja	Nilai Revaluasi	Keterangan
Lembaga Pemasyarakatan Pontianak	56.556.556.000,00	Penilaian Ulang Aset Gedung dan Bangunan
Kantor Imigrasi Pare-Pare	618.049.085,00	Penilaian Ulang Aset Gedung dan Bangunan
TOTAL REVALUASI	57.174.605.085,00	

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
(Rp583.305.722
.198,00)

E.3.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar (Rp583.118.945.889,00) dan Rp37.141.471.862,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 77.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi per 31 Desember 2016

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(275.052.345.809,00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(308.253.376.389,00)
TOTAL REVALUASI	(583.305.722.198,00)

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 78.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Aset
per 31 Desember 2016

Jenis Aset	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Tanah	16.854.817.529,00		16.854.817.529,00
Peralatan dan Mesin	9.421.309.788,00	77.796.259.933,00	(68.374.950.145,00)
Gedung dan Bangunan	124.728.418.360,00	239.441.225.738,00	(114.712.807.378,00)
Jalan dan Jembatan	21.317.517.778,00	41.679.239.873,00	(20.361.722.095,00)
Irigasi	12.617.020.582,00	52.232.671.044,00	(39.615.650.462,00)
Jaringan	9.252.589.972,00	39.653.378.859,00	(30.400.788.887,00)
Aset Tetap Renovasi		7.126.534.995,00	(7.126.534.995,00)
Aset Tetap Lainnya	2.712.418.304,00	1.732.721.587,00	979.696.717,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		5.153.636.973,00	(5.153.636.973,00)
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	6.896.574.423,00	13.850.567.234,00	(6.953.992.811,00)
SUBTOTAL			(274.865.569.500,00)
Software		302.609.010.788,00	(302.609.010.788,00)
Lisensi		7.772.005.338,00	(7.772.005.338)
Aset Tak Berwujud Lainnya	2.171.386.891,00	43.747.154,00	2.127.639.737,00
SUBTOTAL			(308.253.376.389,00)
TOTAL KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI			(583.118.945.889,00)

Koreksi Lain-
Lain
(Rp1.738.323.2
70,00)

E.3.5. LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar (Rp1.738.323.270,00) dan Rp15.570.406.180,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.



Koreksi dilakukan untuk mutasi tambah atau mutasi kurang suatu transaksi karena kesalahan pencatatan transaksi di tahun-tahun sebelumnya, koreksi hutang/piutang maupun pendapatan hasil suatu proses validasi atau penilaian ulang dari Inspektorat Jenderal, BPKP atau BPK.

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 79.

Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2016

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi	
	Debit	Kredit
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
LAPAS SUNGAI LIAT	2.430.389,00	Koreksi atas Lebih Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar TAYL
RUPBASAN	116.000,00	
Subtotal	2.546.389,00	
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		
BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	3.569.289,00	Koreksi atas Lebih Catat atau Kurang Catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Yang Terjadi pada Tahun Anggaran Sebelumnya
CABRUTAN NEGARA BEUREUN	40.198.472,00	
CABRUTAN DOBO	1.500.000,00	
CABRUTAN WAHAI	14.586.000,00	
CABRUTAN BANDANAIRE	4.262.500,00	
LAPAS NARKOTIKA MUARA SABAK	25.331.080,00	
LAPAS LHOK SEUMAWA	161.969.976,00	
LAPAS NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	10.552.000,00	
LAPAS TEBINGTINGGI	143.648.320,00	
LAPAS WANITA LAMPUNG	82.291.889,00	
RUTAN MASOHI	2.000.000,00	
RUTAN TANJUNG PURA	72.001.300,00	
LAPAS BITUNG	27.842.500,00	
CABRUTAN NATAL	10.929.676,00	
CABRUTAN SINABANG	(23.222.472,00)	
DIREKTORAT JENDERAL HAM	150.342.570,00	
DIREKTORAT JENDERAL KI	2.472.642.695,00	
LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	(107.091.578,00)	
LAPAS BITUNG	2.215.109,00	
LAPAS LANGSA	128.287.243,00	
LAPAS MEDAN	(873.207.913,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RUTAN RENGAT	70.008,00	
SEKRETRIAT JENDERAL	18.327.834,00	
KANWIL BENGKULU	(4.238.872.432,00)	
Subtotal	(1.869.825.934,00)	
Piutang PNB		
KANTOR IMIGRASI SURABAYA	74.999.999,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	3.404.450,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA UNAAHA	4.172.400,00	
CABRUTAN NEGARA SINGKEL	(55.444,00)	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	(17.022,00)	
DIREKTORAT JENDERAL KI	592.868.750,00	
DIREKTORAT JENDERAL KI	322.240.000,00	
DIREKTORAT JENDERAL KI	(70.924.773,00)	
DIREKTORAT JENDERAL KI	(159.878.750,00)	
LAPAS KALISOSOK	(10.078.535,00)	
KANWIL KUMHAM BANDUNG	(3.500.000,00)	
Subtotal	753.231.075,00	Koreksi atas Lebih Catat atau Kurang Catat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terjadi pada Tahun Anggaran Sebelumnya
Kas Lainnya dan Setara Kas		
DITJEN PEMASYARAKATAN	(855.432.552,00)	
Subtotal	(855.432.552,00)	
Bagian Lancar – Piutang TP/TGR		
BPHN	(4.400.000,00)	
BPHN	22.000,00	Koreksi atas Piutang TGR karena Penerimaan pembayaran piutang sudah dialihkan ke PT. Taspen sehingga sudah tidak menjadi potensi pendapatan satker lagi.
Subtotal	(4.378.000,00)	
Piutang TP/TGR		
KANTOR IMIGRASI TERNATE	(10.000.000,00)	
LAPAS PADANG SIDEMPUNAN	2.062.300,00	
CABRUTAN NEGARA SINGKEL	554.440,00	
KANWIL KUMHAM BANDUNG	17.500,00	
DIREKTORAT JENDERAL KI	(71.036.139,00)	
KANWIL KUMHAM PAPUA	288.750,00	
Subtotal	(78.113.149,00)	Koreksi atas Piutang TGR karena Penerimaan pembayaran piutang sudah dialihkan ke PT. Taspen sehingga sudah tidak menjadi potensi pendapatan satker lagi.



Pendapatan Hak dan Perizinan		
DIREKTORAT JENDERAL AHU	63.750.000,00	Koreksi atas Lebih Catat Pendapatan Hak dan Perizinan pada Ditjen AHU
DIREKTORAT JENDERAL AHU	128.200.000,00	
DIREKTORAT JENDERAL AHU	17.280.565,00	
Subtotal	209.230.565,00	
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		
KANIM SURAKARTA	(8.544.500,00)	
KANIM SURAKARTA	(9.533.333,00)	
Subtotal	(18.077.833,00)	
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	4.848.669,00	
Subtotal	4.848.669,00	
Hibah Yang Belum Disahkan		
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	73.617.500,00	Koreksi atas Hibah yang pengesahan sudah diterima di TA. 2015 namun tidak sempat diinput dokumen pengesahan pada Tahun 2015, sehingga status pada Audited 2015 masih belum disahkan.
RUTAN JAKARTA TIMUR	44.030.000,00	
Subtotal	117.647.500,00	
TOTAL KOREKSI	(1.738.323.270,00)	



Transaksi
Antar Entitas
Rp7.240.689.9
93.458,
00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.298.410.327.388,00 dan Rp5.408.003.044.845,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 80.
Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Transaksi	30 Des 2016	31 Des 2015
1	Ditagihkan Kepada Entitas Lain	10.627.299.182.154,00	9.257.161.142.516,00
2	Diterima Dari Entitas Lain	3.375.662.350.209,00	4.225.609.990.797,00
3	Transfer Masuk	1.079.280.716.133,00	11.881.144.119.155,00
4	Transfer Keluar	1.050.420.549.168,00	11.509.631.784.029,00
5	Pengesahan Hibah	17.919.281.978,00	4.953.040.000,00
6	Pengembalian Pengesahan Hibah	5.953.500,00	13.482.000,00
	TOTAL ((1)-(2)-(3)+(4)-(5)+(6))	7.240.689.993.458,00	5.408.003.044.845,00

E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp3.375.662.350.209,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.627.299.182.154,00.

E.4.2. TRANSFER MASUK / TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.050.420.549.168,00 terdiri dari:



Tabel 81.
Rincian Transfer Masuk
Per 31 Desember 2016

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	Unit Eselon I / Kanwil	10.552.160.496,00
2	Amunisi	Unit Eselon I / Kanwil	22.710.996,00
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Unit Eselon I / Kanwil	1.893.384.600,00
4	Suku Cadang	Unit Eselon I / Kanwil	538.620.548,00
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	Unit Eselon I / Kanwil	64.767.600,00
6	Peralatan dan Mesin Utk Masyarakat	Unit Eselon I / Kanwil	530.065.300,00
7	Aset Lain-Lain Utk Masyarakat	Unit Eselon I / Kanwil	43.623.250,00
8	Barang Persediaan Lainnya Utk Masy.	Unit Eselon I / Kanwil	579.552.056.969,00
9	Bahan Baku	Unit Eselon I / Kanwil	616.481.860,00
10	Persediaan Utk Tujuan Strategis/Jaga	Unit Eselon I / Kanwil	48.781.569.800,00
11	Persediaan Lainnya	Unit Eselon I / Kanwil	545.744.259,00
12	Tanah	Unit Eselon I / Kanwil	6.478.286.297,00
13	Peralatan dan Mesin	Unit Eselon I / Kanwil	209.905.898.822,00
14	Gedung dan Bangunan	Unit Eselon I / Kanwil	142.709.368.173,00
15	Jalan dan Jembatan	Unit Eselon I / Kanwil	2.847.897.000,00
16	Irigasi	Unit Eselon I / Kanwil	3.159.400.233,00
17	Jaringan	Unit Eselon I / Kanwil	1.617.923.623,00
18	Aset Tetap Renovasi	Unit Eselon I / Kanwil	742.272.844,00
19	Aset Lain-Lain	Unit Eselon I / Kanwil	642.887.632,00
20	Software	Unit Eselon I / Kanwil	34.757.078.866,00
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Unit Eselon I / Kanwil	4.418.350.000,00
	TOTAL		1.050.420.549.168,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.079.280.716.133,00 terdiri dari:

Tabel 82.
Rincian Transfer Keluar
Per 31 Desember 2016

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Barang Konsumsi	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	13.651.699.783,00
2	Amunisi	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	13.810.750,00
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	258.193.250,00
4	Suku Cadang	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	192.432.720,00
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	1.350.000,00
6	Aset Tetap Lainnya Utk Masyarakat	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	77.438.300,00
7	Aset Lain-Lain Utk Masyarakat	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	1.023.000,00



8	Barang Persediaan Lainnya Utk Masy.	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	600.599.133.396,00
9	Bahan Baku	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	1.128.820,00
10	Persediaan Utk Tujuan Strategis	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	56.259.431.484,00
11	Persediaan Lainnya	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	170.460.206,00
12	Tanah	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	7.198.286.297,00
13	Peralatan dan Mesin	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	235.671.369.498,00
14	Gedung dan Bangunan	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	122.437.802.954,00
15	Jalan dan Jembatan	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	2.847.897.000,00
16	Irigasi	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	3.159.400.233,00
17	Jaringan	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	1.587.548.113,00
18	Aset Tetap Renovasi	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	2.995.628.748,00
19	Aset Lain-Lain	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	259.948.982,00
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	30.752.155.022,00
21	Piutang	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	96.633.405,00
22	Software	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	638.229.406,00
23	Aset Tetap Henti Guna	Unit Eselon I / Kanwil / Satker	409.714.766,00
	TOTAL		1.079.280.716.133,00

E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp17.919.281.978,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp5.953.500,00.

Rincian Hibah Langsung dijabarkan dalam Pengungkapan Penting Lainnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

*Ekuitas Akhir
Rp23.088.519.
377.924,00*

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp23.088.519.377.924,00 dan Rp22.206.545.171.185,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. DATA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan Printout Laporan Aplikasi e-Rekon-LK.

F.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mempunyai Kebijakan Akuntansi Akrual yang memuat secara spesifik perlakuan terhadap transaksi-transaksi yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain :

- Kebijakan Akuntansi Lapas Industri;
- Kebijakan terkait penetapan Bagan Akun Standar yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan PNBP untuk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Kebijakan PNBP terkait penerimaan Merk, Paten, Desain Industri dan Cipta dari Masyarakat;
- Kebijakan Koreksi Pencatatan Nilai Aset karena Pengembalian Belanja terkait dengan temuan hasil pemeriksaan APIP dan Pengakuan Piutang terhadap pengembalian belanja yang belum diselesaikan;
- Kebijakan Akuntansi terkait Surat Edaran Kepala Biro Pengelolaan BMN Nomor : SEK.4.PL.04.06-2599 tanggal 15 Desember 2016 perihal Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2016;
- Kebijakan terkait Perlakuan Pengakuan Akrual atas Transaksi Tagihan Telepon, Air bulan Desember Tahun Anggaran Lalu;
- Kebijakan terkait PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN berupa sewa, dan lain-lain;
- Kebijakan terkait penetapan Estimasi Pendapatan pada Unit-Unit Eselon I penerima PNBP;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih mengacu kepada PMK nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

F.3. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

- Masih terdapat Belanja Tanpa Pagu (Pagu Minus) untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada beberapa Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat



Jenderal Imigrasi yang sampai dengan batas waktu perpanjangan Revisi tidak ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja.

- Masih terdapat transaksi pengembalian Belanja melebihi Realisasi Belanja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang sampai dengan batas waktu perpanjangan Revisi tidak ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja.
- Masih banyaknya pembebanan belanja yang tidak sesuai dengan Mata Anggaran Kegiatan, seperti belanja barang Persediaan yang menggunakan Akun Non Persediaan, belanja menggunakan Akun Belanja Pemeliharaan yang menghasilkan Aset, karena sudah memenuhi nilai Kapitalisasi, dan lain-lain, sehingga timbul dalam daftar Jurnal Tidak Lazim dalam Aplikasi e-Rekon-LK.
- Masih ada Hibah Langsung yang belum disahkan senilai Rp343.534.893,00 antara lain terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan berupa Tanah di Tahun 2015, namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ditindaklanjuti proses pengesahannya.

F5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1.1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 774K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inchrat) dalam perkara Kasasi Perdata antara Pemerintah RI cq Menteri Hukum dan HAM RI cq Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan cq Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar selaku tergugat melawan Daryanto Lie, telah ditetapkan bahwa tergugat dihukum untuk membayarkan ganti rugi akibat tidak mengembalikan barang bukti sandal Merk Coms sebanyak 9.753 pasang atau setara dengan Rp448.638.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Daryanto Lie.

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut di atas, maka satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (409263) telah mengakui adanya utang kepada pihak ketiga dalam neraca Satker Tahun Anggaran 2016.

Utang ini telah dibayarkan lunas atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-013.05.1.409263/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan SPM No. 01499 tanggal 19 Desember 2016 dan SP2D No. 161391303037810 tanggal 21 Desember 2016.

1.2. Pemasyarakatan Produktif (Lapas Industri)

Setiap narapidana harus menjalani pembinaan selama menjalani masa pidananya. Pembinaan bagi narapidana meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kemandirian diwujudkan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Latihan Keterampilan Kerja (untuk selanjutnya disebut Kegiatan Pelatihan) dan kegiatan kerja/produksi bagi narapidana (untuk selanjutnya disebut Kegiatan Produksi). Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Produksi bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada narapidana, sekaligus merupakan bagian aktifitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan.

Idealnya, Kegiatan Produksi Lapas ini dimulai dengan pembentukan industri-industri kecil di setiap Lapas sesuai dengan kemampuan dan potensi-potensi lokal di sekitar Lapas. Kemudian secara bertahap dibina dan difasilitasi agar industri-industri kecil Lapas ini mampu tumbuh dan berkembang menjadi Industri Menengah dan Industri Besar. Sehingga dalam jangka panjang dapat terwujud adanya Prison Industry seperti yang ada di berbagai negara maju lainnya.

Bahwa ketika kegiatan kerja bagi narapidana benar-benar dapat diselenggarakan secara lebih baik dan profesional, maka beragam hasil karya narapidana dapat tercipta. Pada akhirnya, Lapas dapat benar-benar menjadi satu sentra produksi dimana sumber daya utamanya adalah narapidana.

Pencapaian terhadap visi yang telah ditetapkan akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu hingga 15 tahun mendatang. Pentahapan ini akan dibagi dalam 3 tahap dimana masing-masing tahap akan dilaksanakan selama waktu 5 tahun.

Tahap Pertama (2014-2019); pada tahap ini akan difokuskan untuk memantapkan Lapas-Lapas yang dinilai sudah layak menjadi Lapas Produksi. Untuk itu, langkah paling awal adalah melakukan pemetaan atau identifikasi terhadap Lapas-Lapas yang dinilai layak menjadi pilot project. Selanjutnya, Lapas-Lapas ini akan dijadikan sebagai Lapas Percontohan (Pilot Project).

Pada tahap awal ini juga akan mulai dilakukan edukasi dan promosi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa narapidana adalah sumber daya yang mempunyai potensi dan mampu memberikan karya yang bermanfaat. Edukasi dan promosi ini merupakan program yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tahap Kedua (2020-2025); pada tahap ini akan dilakukan perluasan Lapas pilot. Setelah Lapas pilot yang dibentuk pada tahap awal dinilai mapan, maka dilakukan pembentukan Lapas pilot baru. Hal ini agar akan semakin banyak Lapas yang benar-benar dapat menjadi Lapas produksi. Tentu saja, pemenuhan sumber daya menjadi faktor yang juga dilakukan sebagaimana yang diterapkan pada tahap pertama. Karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan Lapas Pilot Project adalah kesiapan dan ketersediaan sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarananya (termasuk keuangan).



Tahap Ketiga (2026-2031); memperbanyak jumlah Lapas Produktif menjadi program yang terus dilaksanakan. Pada setiap tahapan, jumlah Lapas Pilot akan terus diperluas dengan memperhatikan aspek sumber daya yang dimiliki. Disamping evaluasi dan maintenance terhadap Lapas- Lapas yang sudah masuk dalam kategori Lapas Produktif.

1.3. Hibah Langsung di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

a. Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan

Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerima hibah barang berupa Peralatan Tanggap Darurat (*Emergency Response*) dengan jumlah hibah secara keseluruhan adalah sebesar \$35.451,60 equal Rp460.873.960,00 dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat: International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). Barang hibah tersebut diatas telah dicatatkan pada aplikasi SIMAK Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (409263) berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang / Jasa (SP3HL-BJS) No. 0321/PR.8/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Sampai dengan akhir tahun 2016, 20 set peralatan tanggap darurat ini telah ditransfer keluar ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pasir Putih.

b. Lapas Kelas I Cipinang

Forum Of Medium Small Economic Africa Asean (FORSEAA) memberikan hibah bantuan sarana ISPS (*Integrated Secured Prison System*) melalui Proyek Percontohan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang senilai USD750.000,00 setara Rp10.211.535.000,00. Hibah barang ini diterima langsung dari FORSEAA oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dengan disaksikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 20 Agustus 2016. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru memperoleh informasi mengenai hibah barang ini pada akhir Desember 2016. Kondisi ini mengakibatkan pemeriksaan fisik atas hibah barang ini baru dilakukan oleh Pihak Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru bisa dilakukan pada saat masa pengajuan pengesahan hibah barang telah ditutup. Atas kondisi ini, barang - barang hibah tersebut sudah ada di Lapas Kelas I Cipinang namun baru akan di catat sebagai saldo perolehan di awal tahun 2017 pada Laporan BMN Lapas Kelas I Cipinang pada periode semester I 2017.

c. Lapas Banceuy

Lapas Banceuy mendapatkan hibah berupa bangunan kantin semi permanen dari H. Dedeh senilai Rp30.500.000,00. Atas hibah tersebut, belum diajukan permintaan nomor register dan pengesahan pencatatan hibah barang / jasa.



d. Rutan Rangkas Bitung

Rutan Rangkas Bitung mendapatkan hibah berupa paving block seluas 640 m² dari Pemerintah Kabupaten Lebak senilai Rp48.653.000,00. Atas hibah tersebut belum diajukan permintaan nomor register dan pengesahan pencatatan hibah barang / jasa, karena belum mendapatkan dokumen BAST dari pemberi hibah sebagai syarat pengajuan register hibah.

1.4. APBN-P 2016

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016, hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan Tambahan Anggaran Belanja Sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 yang diperuntukkan guna penanggulangan masalah narkoba, penanganan over capacity pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan peningkatan kualitas layanan di bidang pemasyarakatan serta pengadaan sarana dan prasarana operasional UPT Pemasyarakatan.

APBN-P TA 2016 ini dianggarkan untuk kegiatan pembangunan pada 9 satuan kerja dan adanya APBN-P tahun 2016 untuk kegiatan pembangunan pada 58 satuan kerja, pembentukan Lapas Industri pada 23 satuan kerja, pengadaan sarpras di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pembuatan sumur bor pada 20 satuan kerja.

Sampai akhir bulan November 2016, terdapat Anggaran yang masih di blokir (tidak dapat dicairkan) pada Satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp347.815.917.000,00.

1.5. Pembayaran atas Utang Pengadaan Scanner Tahun 2015

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2015 melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa scanner yang akan didistribusikan ke satker upt pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Nilai kontrak pengadaan scanner ini sebesar Rp2.991.600.000,00 dimana pembayarannya dilakukan melalui 2 termin pembayaran, yaitu termin 1 senilai Rp2.393.280.000,00 atau 80% dari nilai kontrak dan termin 2 senilai Rp. 598.320.000 atau 20% dari nilai kontrak. Proses pengajuan pencairan anggaran telah dilakukan sesuai ketentuan melalui KPPN Jakarta V. Berkas tagihanpun telah diterima oleh KPPN Jakarta V, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima SPM dari petugas Front Office KPPN Jakarta V, baik untuk pembayaran termin 1 maupun pembayaran termin 2. Namun sampai dengan batas waktu pencairan anggaran selesai, SP2D untuk pembayaran termin 1 pengadaan scanner senilai Rp2.393.280.000,00 tidak juga diterbitkan oleh KPPN Jakarta V. Sementara Scanner sudah didistribusikan ke satker UPT Pemasyarakatan selama tahun 2015. Scanner tersebut masih tercatat dalam catatan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berkirin surat ke KPPN Jakarta V dengan Nomor surat.

PAS1.KU.04.OL-09 tentang konfirmasi pengajuan dan penerbitan SPM dan SP2D Ditjen Pemasarakatan. KPPN Jakarta V memberikan tanggapan melalui surat nomor. S-153/WPB.12/KP.0522/2016 tanggal 15 Januari 2016 bahwa atas pengeluaran belanja di tahun 2015 yang telah selesai kegiatannya dan belum diselesaikan pembayarannya, maka satker dapat melakukan revisi DIPA Tahun 2016 untuk menampung penyelesaian tagihan dimaksud dalam DIPA 2016 dan mencantumkan dalam Halaman IV DIPA. Atas kondisi ini, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah mengakui adanya utang kepada pihak ketiga sebesar Rp2.393.280.000,00 pada neraca per 31 Desember 2015.

Utang ini telah dibayarkan lunas atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-013.05.1.409263/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan SPM No. 01245 tanggal 30 November 2016 dan SP2D No. 161391303031383 tanggal 1 Desember 2016.

1.6. Pengesahan atas Pengembalian Sisa Hibah Langsung

Sampai dengan akhir tahun 2016, Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum dapat melakukan pengesahan atas pengembalian Sisa Hibah Langsung berupa Uang yang diterimanya berdasarkan Perjanjian Hibah dengan pihak UNICEF dan HCPI.

Kerjasama dengan UNICEF telah berakhir pada 31 Oktober 2015 dan sisa dana sebesar Rp824.464,00 telah disetorkan pada bulan Februari 2016. Sedangkan kerjasama dengan HCPI sisa saldo sebesar Rp91.249.133,00 telah disetorkan pada bulan April 2016.

Untuk dapat melakukan pengesahan atas pengembalian sisa hibah ini, maka sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus melakukan revisi DIPA terlebih dahulu yang mempersyaratkan adanya perjanjian Hibah. Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Subdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Pemasarakatan dan Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, telah berusaha untuk menghubungi pihak Pendonor untuk mendapatkan perjanjian baru atau adendum atas perjanjian hibah yang telah ada sebelumnya.

Namun sampai dengan akhir tahun 2016, belum mendapatkan respon positive dari organisasi pendonor. Sehingga pada neraca Satker Direktorat Jenderal Pemasarakatan TA 2016 masih terdapat akun Kas di bendahara pengeluaran lainnya yang berasal dari hibah yang belum disyahkan sebesar Rp92.073.597,00

Kesulitan ini telah kami sampaikan kepada pembina Kemenkumham di Dit APK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan oleh pihak Dit APK akan mengusahakan agar peraturan untuk melampirkan perjanjian kerjasama hibah pada pengajuan pengesahan pengembalian sisa hibah dapat diiadakan dengan pertimbangan bahwa pada saat pengajuan awal hibah telah disertai dengan Perjanjian Kerjasama Hibah dan pengembalian sisa hibah menunjukkan telah selesainya kerjasama hibah tsb. Namun sampai dengan 31 Desember 2016 dan dibukanya masa perpanjangan untuk pengesahan hibah sampai dengan tanggal

24 Januari 2017, pengesahan atas pengembalian sisa hibah ini belum dapat dilaksanakan.

1.7. Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kanwil DKI Jakarta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerjasama dengan Fasilitas - Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah lingkungan kerja mereka untuk memberikan fasilitas pembayaran bagi para peserta BPJS disekitar mereka berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar. Fasilitas pembayaran ini diberikan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah DKI Jakarta, termasuk juga kepada FKTP yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dana Kapitasi merupakan suatu system pembayaran pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP Pemerintah Pusat berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pengaturan Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi ini diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai PMK No. 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.

Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satker Penerima Dana Kapitasi adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Jumlah Dana Kapitasi TA. 2016 (Rp)	Keterangan
1	Lapas Narkotika Jakarta	124.435.637,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
2	Lapas Cipinang	116.175.000,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
3	Rutan Jakarta Timur	30.758.000,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
4	Rutan Cipinang	52.617.375,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
	Jumlah	323.986.012,00	
5	Rutan Jakarta Pusat	838.144.376,00	Dikembalikan ke Pemda Provinsi DKI Jakarta
6	Lapas Salemba	63.637.042,00	Dikembalikan ke Pemda Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah	901.781.418,00	

4 (empat) dari 6 (enam) satker penerima dana kapitasi telah menyetorkan seluruh Dana Kapitasi tersebut ke kas negara sebagai dana kapitasi yang akan digunakan oleh Satker yang bersangkutan di tahun mendatang setelah menyelesaikan penyusunan estimasi pendapatan PNB dan rencana penggunaan PNB tersebut agar dapat dicantumkan pada lembar estimasi pendapatan di DIPA Satker ybs pada tahun anggaran 2017.

2. BPSDM

2.1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama BPSDM Hukum dan HAM dengan Nuffic NICHE

- a) Bahwa kegiatan kerjasama antara BPSDM Hukum dan HAM dengan Nuffic NICHE telah dimulai sejak bulan September 2011. Nuffic NICHE merupakan lembaga donor yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di negara berkembang khususnya pendidikan pasca sekolah menengah, pendidikan dan pelatihan.
- b) Kerja sama yang diberikan Nuffic NICHE kepada BPSDM Hukum dan HAM berupa hibah dalam bentuk kegiatan berupa pengembangan kualitas penyelenggaraan Diklat Penyusunan Perundang-undangan melalui pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada beberapa pihak terkait (para pengajar, para staff pelaksana, dan beberapa fasilitas yang mendukung pelaksanaan diklat), dengan tema Capacity Building of BPSDM in Legislative Drafting Education and Training.
- c) Anggaran hibah yang diberikan berjumlah €1.307.365 dan di kelola oleh CINOP Global, yang merupakan pihak ke 3 dari Belanda. CINOP Global bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- d) Kegiatan telah dilaksanakan selama 4 tahun yaitu mulai tahun 2013-2016, namun karena beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan anggaran masih tersedia, kegiatan di perpanjang sampai bulan Juli 2017.

2.2. Kontrak sewa antara ALTRI dengan BPSDM Hukum dan HAM

Berdasarkan, Surat Perjanjian Sementara antara BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan ALTRI (Akademi Litigasi Republik Indonesia) Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum Dan Ham RI tentang Sewa Barang Milik Negara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ALTRI menyewa BMN berupa Tanah seluas 2.559 M² dan bangunan seluas 2.425 M² untuk penyelenggaraan Pendidikan. Adapun jumlah sewanya pertahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sewa, maka dikenakan sanksi sebesar 1% (satu permil) dari harga sewa untuk setiap hari terhitung 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian sewa menyewa, sebesar-besarnya 10% dari harga sewa.

Untuk pembayaran sewa tahun 2015 dibayarkan di tahun 2016, piutang sewa tersebut diakui di satker AKIP (404309), tetapi dibayarkan melalui satker BPSDM Hukum dan HAM (108266) disebabkan karena satker AKIP tidak memiliki Bendahara Penerimaan.

3. Informasi Lain Terkait BMN

3.1 Tanah Milik LP Amuntai dikuasai Oleh Pihak Ketiga

Tanah milik LP Amuntai seluas 4.917 M² dengan harga Rp811.305.000,00 yang terletak di Jalan Sukmaraga Kelurahan Sungai Malang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga yaitu SMP Negeri 4 Amuntai dan Lapas Amuntai telah



melakukan usaha-usaha dalam rangka pengamanan BMN tersebut, tetapi diatas tanah tersebut sudah dibangun Gedung SMPN 4 Amuntai dari tahun 1991 dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor :390 Tahun 2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Lokasi Penggantian Tanah Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Amuntai yang terletak di Jalan Amuntai-Lampihong Desa Kaludan Kecil RT.3 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas $\pm$ 31.000 M².

Tanah pengganti tersebut belum disebabkan masih dalam proses pembebasan dan mengakibatkan aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Lapas Amuntai.

3.2 Rutan Kelas III B Soe, Nusa Tenggara Timur

Tanah Rutan Kelas IIB Soe dengan luas 10.000 m² terdapat sengketa dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana tanah tersebut diminta kembali oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat. Tanah ini sudah tercatat pada SIMAK BMN tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen sumber pada saat pencatatan awal tanah tersebut di SIMAK BMN. Disamping itu tanah ini belum bersertifikat karena menurut Badan Pertanahan setempat tanah ini masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa diterbitkan sertifikatnya.

3.3 Rutan Ruteng, Nusa Tenggara Timur

Tanah Rutan Ruteng dengan luas 11.609 m² terdapat sengketa dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai dimana Pemerintah Kabupaten Manggarai mengklaim bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai padahal diatas tanah tersebut telah berdiri kantor Rutan Ruteng yang lama. Tanah tersebut belum didukung oleh hak atas aset tersebut yaitu sertifikat. Rutan Ruteng telah yaituya mengurus sertifikat tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat, namun sesuai surat Wakil Bupati Manggarai Nomor: Pem.130/352/XII/2014 yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yang tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI menyatakan keberatan karena telah mengakui tanah tersebut sebagai aset Pemerintah Kabupaten Manggarai.

3.4 Nusa Tenggara Timur

Semua gedung bangunan di lingkup Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT belum dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3.5 Sulawesi Utara

Terdapat Aset Tetap Gedung Bangunan berupa rumah dinas pada Cabang Rumah Tahanan Negara Amurang sebanyak 3 (tiga) unit yang nilainya tidak dapat diketahui yaitu, 1 (satu) unit rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Amurang, dan 2 (dua) unit rumah dinas dalam kondisi rusak.



3.6 Rutan Pelaihari, Kalimantan Selatan

Di Rumah Tahanan Negara Pelaihari terdapat 6 (enam) buah pos jaga atas. Namun, terdapat 2 (dua) buah pos jaga atas yang kondisinya sudah rusak berat (NUP 1 dan NUP 2) dan posisinya mengganggu keamanan Rutan Pelaihari. Dengan pertimbangan keamanan, 2 (dua) buah pos jaga atas yang kondisinya rusak berat tersebut telah dibongkar pada Tahun 2009 dan sudah diusulkan penghapusan Pos jaga Atas pada Tanggal 14 April 2009 Nomor :W12.PK.PL.07.03-32 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang tidak ada tindak lanjutnya surat tersebut.

Kepala Rumah Tahanan Pelaihari mengajukan kembali permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan di Rutan Pelaihari melalui surat Nomor W.19.Pas11.PL.05.03-675 Tanggal 06 Juni 2014 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Nomor :W.19.PL.05.02-3214 Tanggal 26 Agustus 2014 meneruskan surat usulan tersebut ke Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Tanggal 27 Oktober dengan Surat Nomor S-81/WKN.12/KNL.03/2014 KPKNL Banjarmasin meminta data/dokumen pendukung permohonan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan BMN pada Rutan Pelaihari dan Kepala Rutan pada Tanggal 3 November 2014 Nomor W.19.Pas11.PL.05.03-1.277 dokumen pendukung permohonan penghapusan BMN pada Rutan Pelaihari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan suratnya Nomor: W19.PL.05.01-5093 Tanggal 27 Nopember 2014 memohon rekomendasi dari APIP untuk melakukan reuiu atas bangunan gedung yang sudah di bongkar lebih dahulu tanpa ada ijin/persetujuan dari Menteri Keuangan.

3.7 Cabang Rutan Amurang

Aset Tetap Tanah pada Cabang Rutan Amurang yang sudah diinput dalam Simak BMN namun belum dibuatkan sertifikat atas nama an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, yaitu Aset Tanah yang dipergunakan untuk dinas seluas 600 m2 berlokasi di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Tombasian, masih menggunakan Akta Hibah No: AM:11809422BP tanggal 16 Januari 1991 atas nama LKMD Uwuran Dua serta Aset Tanah yang dipergunakan untuk bangunan Gedung Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Amurang berlokasi di Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat seluas 21.350 m2, masih menggunakan sertifikat No. 18.03.06.19.4.00001 atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Aset Tanah Gedung Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Amurang seluas 21.350 m² senilai Rp406.781.345,00 masih menggunakan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.



3.8 Lapas Anak Kelas II B Tomohon

Aset Tetap tanah yang sebelumnya merupakan bangunan Lapas Anak Kelas IIB Tomohon yang terletak di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah seluas 118 m² saat ini dikuasai dan digunakan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Kamasi karena tidak/belum memiliki sertifikat.



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK:
NERACA**

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	3,367,711,321	3,954,305,055	(586,593,734)	(14.83)
Kas di Bendahara Penerimaan	3,760,180,498	8,158,498,587	(4,398,318,089)	(53.91)
Kas Lainnya dan Setara Kas	7,881,592,718	1,986,166,659	5,895,426,059	296.82
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	8,072,548,940	7,978,520,140	94,028,800	1.18
Uang Muka Belanja (prepayment)	148,130,443,000	0	148,130,443,000	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	60,336,607	39,515,770	20,820,837	52.69
Piutang Bukan Pajak	403,072,920,313	428,848,797,907	(25,775,877,594)	(6.01)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(370,942,642,503)	(353,087,138,108)	(17,855,504,395)	5.06
Piutang Bukan Pajak (Netto)	32,130,277,810	75,761,659,799	(43,631,381,989)	(57.59)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	578,001,038	603,419,117	(25,418,079)	(4.21)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,948,477)	(3,014,395)	65,918	(2.19)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	575,052,561	600,404,722	(25,352,161)	(4.22)
Persediaan	501,457,950,598	521,360,073,588	(19,902,122,990)	(3.82)
JUMLAH ASET LANCAR	705,436,094,053	619,839,144,320	85,596,949,733	13.81
ASET TETAP				
Tanah	12,573,351,222,603	12,511,223,438,259	62,127,784,344	0.50
Peralatan dan Mesin	4,851,425,471,800	3,696,443,831,458	1,154,981,640,342	31.25
Gedung dan Bangunan	9,529,676,487,148	8,335,166,890,978	1,194,509,596,170	14.33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,381,556,994	219,702,777,946	(125,321,220,952)	(57.04)
Aset Tetap Lainnya	73,266,156,399	77,467,890,093	(4,201,733,694)	(5.42)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	423,520,044,331	440,414,987,596	(16,894,943,265)	(3.84)
Akumulasi Penyusutan	(4,953,345,821,930)	(4,021,974,585,960)	(931,371,235,970)	23.16
JUMLAH ASET TETAP	22,592,275,117,345	21,258,445,230,370	1,333,829,886,975	6.27
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	838,633,567	1,040,822,031	(202,188,464)	(19.43)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(15,762,511)	(87,928,721)	72,166,210	(82.07)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	822,871,056	952,893,310	(130,022,254)	(13.64)
Piutang Jangka Panjang lainnya	12,792,500,000	14,370,800,000	(1,578,300,000)	(10.98)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(63,962,500)	(71,854,000)	7,891,500	(10.98)
Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)	12,728,537,500	14,298,946,000	(1,570,408,500)	(10.98)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	13,551,408,556	15,251,839,310	(1,700,430,754)	(11.15)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	461,681,674,908	446,864,487,703	14,817,187,205	3.32
Aset Lain-lain	232,274,117,943	248,012,198,366	(15,738,080,423)	(6.35)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(514,652,274,585)	(215,060,760,151)	(299,591,514,434)	139.31
JUMLAH ASET LAINNYA	179,303,518,266	479,815,925,918	(300,512,407,652)	(62.63)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH ASET	23,490,566,138,220	22,373,352,139,918	1,117,213,998,302	4.99
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	175,408,091,116	87,090,356,870	88,317,734,246	101.41
Hibah Yang Belum Disahkan	176,160,000	762,237,850	(586,077,850)	(76.89)
Pendapatan Diterima Dimuka	223,094,509,992	74,963,095,711	148,131,414,281	197.61
Uang Muka dari KPPN	3,358,841,527	3,954,305,055	(595,463,528)	(15.06)
Utang Jangka Pendek Lainnya	9,157,661	36,973,247	(27,815,586)	(75.23)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	402,046,760,296	166,806,968,733	235,239,791,563	141.03
JUMLAH KEWAJIBAN	402,046,760,296	166,806,968,733	235,239,791,563	141.03
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,088,519,377,924	22,206,545,171,185	881,974,206,739	3.97
JUMLAH EKUITAS	23,088,519,377,924	22,206,545,171,185	881,974,206,739	3.97
JUMLAH EKUITAS	23,088,519,377,924	22,206,545,171,185	881,974,206,739	3.97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,490,566,138,220	22,373,352,139,918	1,117,213,998,302	4.99



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2016 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6,711,913,400
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	10,666,218,455	0
0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	8,158,498,587	0
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	87,359,590	0
0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	1,898,807,069	0
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	7,978,520,140	0
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	39,515,770	0
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	428,487,128,241	0
0	115212	Piutang Lainnya	361,669,666	0
0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	159,569,426	0
0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	443,849,691	0
0	115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	960,000	0
0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	0	960,000
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	353,085,696,803
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,441,305
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	1,493,257
0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,521,138
0	117111	Barang Konsumsi	72,575,470,281	0
0	117112	Amunisi	5,921,075,770	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2016 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,548,846,082	0
0	117114	Suku Cadang	744,407,414	0
0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	42,276,191	0
0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	18,203,212	0
0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,375,387,733	0
0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,588,053,494	0
0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2,993,145,626	0
0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	414,281,242,162	0
0	117131	Bahan Baku	647,718,368	0
0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	9,777,975,664	0
0	117199	Persediaan Lainnya	5,846,271,591	0
0	131111	Tanah	12,511,223,438,259	0
0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0	132111	Peralatan dan Mesin	3,696,443,831,458	0
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0	133111	Gedung dan Bangunan	8,335,166,890,978	0
0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0	134111	Jalan dan Jembatan	84,030,045,820	0
0	134112	Irigasi	62,168,267,707	0
0	134113	Jaringan	73,504,464,419	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2016 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	157,491,000	0
0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	157,491,000
0	135111	Aset Tetap Renovasi	67,696,022,381	0
0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,771,867,712	0
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	440,414,987,596	0
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,463,545,852,843
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,464,680,949,804
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	38,779,957,166
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	15,232,695,303
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	30,892,387,449
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,842,743,395
0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1,040,822,031	0
0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	14,370,800,000	0
0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	87,928,721
0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	71,854,000
0	162151	Software	323,558,278,449	0
0	162161	Lisensi	40,708,261,517	0
0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000	0
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	82,504,997,737	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2016 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	166111	Aset Lain-lain	0	73,976,236
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	248,610,427,857	0
0	166122	Aset yang Diserahkelolakan pada PT Perusahaan Pengelola Aset	0	524,253,255
0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	60,710,691	0
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	215,152,744,842
0	169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan	31,274,000	0
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	4,211,394,291
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	55,793,004,788
0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	11,814,772,340
0	212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	97,059,050
0	212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	4,692,970
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	15,169,433,431
0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	762,237,850
0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	541,669,648
0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	74,421,426,063
0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	3,954,305,055
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	36,973,247
0	391111	Ekuitas	0	22,206,545,171,185
JUMLAH			26,971,197,999,835	26,971,197,999,835



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	1,003,044,571,846	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	283,778,588,709
0.0	219721	Utang kepada Kas BLU	0	2,009,490,000
2.0	423111	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Yang Dialokasikan	1,200,000	0
2.0	423114	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Yang	100,000,000	0
2.0	423119	Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya Yang Dialokasikan	63,451,000	0
2.0	423121	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	14,900,000	0
2.0	423129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	20,900,000	0
2.0	423141	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	4,189,410,184	0
2.0	423142	Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan	403,969,000	0
2.0	423149	Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	905,720,000	0
2.0	423213	Estimasi Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor Yang Dialokasikan	2,571,427,611,000	0
2.0	423214	Estimasi Pendapatan Hak dan Perijinan Yang Dialokasikan	1,070,164,439,000	0
2.0	423216	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai	8,601,300,000	0
2.0	423221	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang Dialokasikan	19,421,000	0
2.0	423291	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	3,513,349,234	0
2.0	423922	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Yang Dialokasikan	5,179,500	0
2.0	423952	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	10,000,000	0
2.0	423958	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	89,000	0
2.0	424119	Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	2,009,490,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,843,597,815,606

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	52,468,800
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	127,659,803,606
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	37,216,101,501
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	65,899,405,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	93,806,358,732
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	20,140,616,888
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	106,946,296,443
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	349,806,292,424
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	438,675,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	5,658,600,000
2.0	511145	Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	0	147,432,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	177,176,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	28,835,343,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	0	26,570,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	28,186,190,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,911,533,108,000
2.0	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito	0	559,330,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	212,746,181,757
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	913,026,552,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	41,727,657,492
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	9,241,512,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	65,474,980,020
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	49,231,308,666
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	223,301,716,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	48,090,184,000
2.0	521214	Allotment Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	0	73,043,000
2.0	521218	Allotment Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	0	6,000,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	279,385,735,656
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	122,900,143,362
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	379,658,000
2.0	521821	Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	4,898,570,000
2.0	521822	Allotment Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	10,899,674,000
2.0	521831	Allotment Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	373,964,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	279,039,903,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	143,791,744,808
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	11,947,896,928
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	17,526,114,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	18,079,882,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	6,292,479,694
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	138,678,100,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	194,394,043,550
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	74,807,397,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	76,367,279,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	230,084,443,450
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	4,615,042,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2,162,566,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	212,090,700,273
2.0	523122	Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non	0	1,225,076,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,708,387,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	8,683,026,000
2.0	523132	Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	30,000,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	469,086,000
2.0	523136	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	11,982,000
2.0	523191	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	40,088,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,097,044,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	314,903,631,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	56,978,712,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	61,026,602,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	96,957,645,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	74,460,502,000
2.0	524212	Allotment Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	45,000,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	27,792,897,344
2.0	526114	Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	42,200,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	531114	Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	7,000,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	3,356,603,000
2.0	531116	Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	12,500,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,532,614,807,000
2.0	532112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	532113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	97,660,000
2.0	532114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	532115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	54,160,000
2.0	532118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	17,450,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	236,815,374,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	932,934,091,000
2.0	533112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	45,977,000
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	488,629,000
2.0	533114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	0	1,342,115,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	55,337,476,000
2.0	533116	Allotment Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	30,000,000
2.0	533118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	51,500,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	182,681,945,000
2.0	534121	Allotment Belanja Modal Irigasi	0	45,000,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	5,107,093,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	564,500,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	19,948,812,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	295,249,000
3.0	423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0	185,422,600
3.0	423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	0	2,528,717,281
3.0	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	307,077,507
3.1	423119	Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya	9,472,561	0
3.0	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	69,921,150
3.0	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	149,758,000
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,064,116,886
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,949,385,124
3.1	423141	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,529,893	0
3.0	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	21,274,300
3.0	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,590,872,944
3.0	423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	21,106,400
3.0	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	0	1,952,356,539,019
3.0	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	0	1,368,009,612,152
3.1	423214	Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan	188,850,000	0
3.0	423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0	400,000
3.0	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas	0	2,694,495,291
3.0	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,227,779,170
3.0	423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	0	2,789,550,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	0	323,986,012
3.0	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,046,971,077
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,107,506,677
3.0	423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0	7,700,280
3.0	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	151,450,656
3.0	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	503,746,034
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,355,188,163
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,764,272,676
3.0	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,547,752,819
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	25,584,566
3.0	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	13,062,015,879
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,830,682,578,343	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	210,173,498
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,494,158	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	942,840
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124,421,328,858	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	36,860,519
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,897,810,221	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	6,017,826
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,637,805,278	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	68,396,605

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	91,026,607,158	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	101,286,172
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,100,636,941	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	610,640
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	103,607,087,460	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	4,517,252
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	330,726,416,809	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	70,565,486
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	381,575,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	5,579,910,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,430,000
3.0	511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	139,319,488	0
3.0	511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	15,657,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,011,955,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	272,164,239
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	24,971,126,060	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	5,802,550
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,911,247,972,460	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	201,405,298,727	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	13,949,000
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	897,209,493,128	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	403,863,795
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	38,440,351,723	0
3.1	521113	Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	3,682,445
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,217,044,085	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,003,470,488	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	95,518,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	44,044,932,837	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	3,010,600
3.0	521211	Belanja Bahan	179,793,485,517	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	91,868,863
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	39,198,533,049	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	104,191,375
3.0	521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	24,851,226	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	223,718,704,517	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	353,169,275
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,458,547,065	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	330,000
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	337,948,720	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	3,895,613,710	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	10,775,377,630	0
3.0	521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	355,558,150	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	270,732,297,461	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	127,747,874,889	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	58,991,834
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	7,273,286,695	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	13,941,689,880	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,653,855,692	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	4,767,268,328	0
3.1	522121	Pengembalian Belanja Jasa Pos dan Giro	0	279,120
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	128,515,061,246	0
3.0	522141	Belanja Sewa	160,039,413,803	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	84,269,097
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	57,927,242,393	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	570,173,750
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	55,044,253,884	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	13,883,400
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223,989,917,698	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	19,625,966
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,265,334,805	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,093,039,249	0
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	10,925,000
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,310,600,745	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,567,000
3.0	523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	732,979,819	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,293,225,630	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,909,109,892	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	29,689,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	402,460,607	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	9,565,000	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	40,045,200	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	587,010,110	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	261,024,298,700	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	7,208,431,972
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,232,223,879	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	55,779,700
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49,336,232,778	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	836,602,958
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76,737,481,242	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,886,832,505
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	44,348,029,768	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	7,827,544,270
3.0	524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	45,000,000	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15,997,891,029	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	747,687,680
3.0	526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	42,155,850	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	3,500,000	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	3,221,313,000	0
3.0	531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	10,865,600	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,150,531,534,872	0
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	87,220,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	236,009,373,328	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	882,571,315,990	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,541,482,091
3.0	533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	8,714,000	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	198,557,487	0
3.0	533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	960,500,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	48,438,681,763	0
3.1	533115	Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	24,219,000
3.0	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	39,960,750	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	162,013,887,311	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,709,235
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	43,680,000	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	4,594,141,905	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	550,585,795	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017 10:20 AM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	18,384,915,833	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	288,884,000	0
JUMLAH			15,318,079,510,930	15,318,079,510,930



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,442,583,763	0
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	2,074,872,442
0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	3,760,180,498	0
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	79,214,312	0
0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	1,043,374,517	0
0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	6,759,003,889	0
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	8,072,548,940	0
0	114213	Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	148,130,443,000	0
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	60,336,607	0
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	402,752,534,778	0
0	115212	Piutang Lainnya	320,385,535	0
0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	143,557,359	0
0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	434,443,679	0
0	115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	960,000	0
0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	0	960,000
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	370,941,320,392
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,322,111
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	1,237,183
0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,711,294

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117111	Barang Konsumsi	87,524,914,647	0
0	117112	Amunisi	5,905,686,301	0
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,473,931,580	0
0	117114	Suku Cadang	1,061,451,657	0
0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	91,361,281	0
0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8,404,586,892	0
0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,928,857,463	0
0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,109,007,789	0
0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,303,637,399	0
0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	343,312,704,008	0
0	117131	Bahan Baku	1,025,115,810	0
0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	36,685,360,606	0
0	117199	Persediaan Lainnya	7,631,335,165	0
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0	131111	Tanah	12,573,351,222,603	0
0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0	132111	Peralatan dan Mesin	4,851,425,471,800	0
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0	133111	Gedung dan Bangunan	9,529,676,487,148	0
0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	134111	Jalan dan Jembatan	45,307,242,285	0
0	134112	Irigasi	13,895,649,002	0
0	134113	Jaringan	35,178,665,707	0
0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	157,491,000	0
0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	157,491,000
0	135111	Aset Tetap Renovasi	46,167,000,002	0
0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,099,156,397	0
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	423,520,044,331	0
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,945,007,677,653
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,949,360,207,557
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	22,374,292,567
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,677,253,085
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	25,093,075,766
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	6,833,315,302
0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	838,633,567	0
0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	12,792,500,000	0
0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	15,762,511
0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	63,962,500
0	162151	Software	335,931,358,539	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	162161	Lisensi	39,171,349,562	0
0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000	0
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	86,486,016,807	0
0	166111	Aset Lain-lain	0	73,976,236
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	232,621,725,168	0
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	250,622,266	0
0	166122	Aset yang Diserahkelolakan pada PT Perusahaan Pengelola Aset	0	524,253,255
0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	72,811,841	0
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	210,292,748,377
0	169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan	31,274,000	0
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	294,394,489,004
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	9,825,435,431
0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	243,687,614
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	7,430,388,204
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	136,952,267,169
0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	11,248,776,226
0	212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	0
0	212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	0
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	13,017,655,628

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	6,759,003,889
0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	176,160,000
0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	761,209,451
0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	222,333,300,541
0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	3,358,841,527
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	9,157,661
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,627,299,182,154
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,375,662,350,209	0
0	313211	Transfer Keluar	1,079,280,716,133	0
0	313221	Transfer Masuk	0	1,050,420,549,168
0	391111	Ekuitas	0	22,206,545,171,185
0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	22,991,058,641
0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	57,174,605,085
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	275,052,345,809	0
0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	308,253,376,389	0
0	391119	Koreksi Lainnya	1,738,323,270	0
0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	17,919,281,978
0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	5,953,500	0
3	423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0	185,422,600
3	423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	0	2,528,717,281

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	307,077,507
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	69,921,150
3	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	149,758,000
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,064,116,886
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,928,758,989
3	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	20,464,300
3	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,809,541,405
3	423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	21,106,400
3	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	0	1,949,807,256,319
3	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	0	1,179,692,566,228
3	423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0	400,000
3	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas	0	2,694,495,291
3	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,227,864,352
3	423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	0	2,789,550,000
3	423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	0	323,986,012
3	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,041,007,071
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,108,959,110
3	423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0	7,700,280
3	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	232,762,946
3	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	210,127,814

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,323,903,384
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,501,153,635
3	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,561,141,176
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	23,372,930
3	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	12,955,450,496
3	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	102,064,359
3	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0	12,138,895
3	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	45,235,558,397
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	343,072,073,279
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,830,655,838,188	0
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31,470,133	0
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	124,418,650,883	0
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,896,445,250	0
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,634,299,072	0
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	91,028,776,558	0
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,097,722,528	0
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	103,602,234,740	0
3	511129	Beban Uang Makan PNS	333,844,866,909	0
3	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	381,575,000	0
3	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	5,579,685,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	139,319,488	0
3	511147	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	15,657,000	0
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,012,140,000	0
3	511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1,800,000	0
3	511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	0	0
3	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	26,724,000	0
3	512211	Beban Uang Lembur	24,971,126,060	0
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,911,247,972,460	0
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	199,940,348,277	0
3	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	975,276,586,237	0
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	38,320,039,003	0
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,220,674,975	0
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,999,720,488	0
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	43,212,322,154	0
3	521211	Beban Bahan	178,804,380,405	0
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	39,198,533,049	0
3	521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	24,851,226	0
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	220,940,021,622	0
3	522111	Beban Langganan Listrik	131,539,064,751	0
3	522112	Beban Langganan Telepon	7,272,405,977	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522113	Beban Langganan Air	14,359,197,399	0
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,804,987,414	0
3	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	4,770,586,407	0
3	522131	Beban Jasa Konsultan	128,515,061,246	0
3	522141	Beban Sewa	160,094,356,003	0
3	522151	Beban Jasa Profesi	57,927,242,393	0
3	522191	Beban Jasa Lainnya	54,798,841,269	0
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	221,659,506,504	0
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,093,039,249	0
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,200,643,058	0
3	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	732,979,819	0
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,909,109,892	0
3	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	29,689,000	0
3	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	402,460,607	0
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	579,640,110	0
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	259,193,764,318	0
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,232,523,879	0
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49,336,232,778	0
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76,684,681,242	0
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	44,348,029,768	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	45,000,000	0
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15,997,891,029	0
3	525114	Beban Pemeliharaan	2,575,000	0
3	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	70,990,054	0
3	526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	42,155,850	0
3	526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	413,036,212	0
3	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	298,253,508,067	0
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	531,061,775,845	0
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	252,202,364,824	0
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,983,132,254	0
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,172,047,828	0
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,550,732,452	0
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,080,518,636	0
3	592115	Beban Amortisasi Software	32,183,691,439	0
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	3,973,961,689	0
3	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9,926,129	0
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,946,252,369	0
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	119,950,434,553	0
3	593112	Beban Persediaan amunisi	95,638,471	0
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	25,989,532,206	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,328,821,539	0
3	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	404,294,386	0
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	6,338,151,914	0
3	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	20,522,664,171	0
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	10,612,233,048	0
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	279,783,810,953	0
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	17,855,499,545	0
3	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	1,504,705	0
3	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	0	72,895,509
3	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	7,891,500
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	181,559,450	0
3	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	10,775,000	0
3	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	123,201,000	0
3	595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	8,658,000	0
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	16,120,088,342	0
3	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1,486,435,393	0
3	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	93,194,565	0
3	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	42,490,550	0
3	423119	Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya	9,472,561	0
3	423141	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,529,893	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423214	Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan	188,850,000	0
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	210,173,498
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	942,840
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	36,860,519
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	6,017,826
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	68,396,605
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	101,286,172
3	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	610,640
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	4,517,252
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	70,565,486
3	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,430,000
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	272,164,239
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	5,802,550
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	13,949,000
3	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	403,863,795
3	521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	3,682,445
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	95,518,000
3	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	3,010,600
3	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	91,868,863
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	104,191,375

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 28/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	353,169,275
3	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	58,991,834
3	522121	Pengembalian Beban Jasa Pos dan Giro	0	279,120
3	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	84,269,097
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	570,173,750
3	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	13,883,400
3	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	19,625,966
3	523119	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	10,925,000
3	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,567,000
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	7,208,431,972
3	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	55,779,700
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	836,602,958
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,886,832,505
3	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	7,827,544,270
3	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	747,687,680
JUMLAH			43,821,664,478,520	43,821,664,478,520



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,165,273,844,117	4,264,580,144,852	(1,099,306,300,735)	(25.778)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,165,273,844,117	4,264,580,144,852	(1,099,306,300,735)	(25.778)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,165,273,844,117	4,264,580,144,852	(1,099,306,300,735)	(25.778)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,567,804,535,642	4,434,070,015,484	133,734,520,158	3.016
Beban Persediaan	157,923,416,543	255,316,182,398	(97,392,765,855)	(38.146)
Beban Barang dan Jasa	2,339,521,711,965	2,023,941,933,253	315,579,778,712	15.592
Beban Pemeliharaan	441,849,879,018	420,917,650,883	20,932,228,135	4.973
Beban Perjalanan Dinas	468,275,243,929	327,740,781,725	140,534,462,204	42.88
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	298,779,690,183	515,658,479,217	(216,878,789,034)	(42.059)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	122,603,050	(122,603,050)	(100)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	836,164,403,465	634,430,458,635	201,733,944,830	31.798
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	17,776,217,241	258,700,396,723	(240,924,179,482)	(93.129)
Beban Lain-Lain	0	4,692,970	(4,692,970)	(100)
JUMLAH BEBAN	9,128,095,097,986	8,870,903,194,338	257,191,903,648	2.899
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,962,821,253,869)	(4,606,323,049,486)	(1,356,498,204,383)	29.449
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(13,836,292,306)	(7,307,875,263)	(6,528,417,043)	89.334
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,283,796,036	3,837,794,885	(1,553,998,849)	(40.492)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	16,120,088,342	11,145,670,148	4,974,418,194	44.631
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	122,820,141,198	7,411,549,140	115,408,592,058	1,557.1
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	404,250,923,885	12,424,508,122	391,826,415,763	3,153.6
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	281,430,782,687	5,012,958,982	276,417,823,705	5,514.0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	108,983,848,892	103,673,877	108,880,175,015	105,021
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,853,837,404,977)	(4,606,219,375,609)	(1,247,618,029,368)	27.086
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,853,837,404,977)	(4,606,219,375,609)	(1,247,618,029,368)	27.086



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 28/04/17 10:20 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,206,545,171,185	21,341,605,273,417	864,939,897,768	4.053
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,853,837,404,977)	(4,606,219,375,609)	(1,247,618,029,368)	27.086
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(504,878,381,742)	63,156,228,532	(568,034,610,274)	(899.41
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	7,785,578,129	(7,785,578,129)	(100)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	22,991,058,641	2,658,772,361	20,332,286,280	764.725
SELISIH REVALUASI ASET	57,174,605,085	0	57,174,605,085	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(583,305,722,198)	37,141,471,862	(620,447,194,060)	(1,670.4
LAIN-LAIN	(1,738,323,270)	15,570,406,180	(17,308,729,450)	(111.16
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,240,689,993,458	5,408,003,044,845	1,832,686,948,613	33.888
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	881,974,206,739	864,939,897,768	17,034,308,971	1.969
EKUITAS AKHIR	23,088,519,377,924	22,206,545,171,185	881,974,206,739	3.972



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 28/04/17 10:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl

NO	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,661,450,428,918	3,375,662,350,209	285,788,078,709	92	4,252,574,469,616	4,225,609,990,797	26,964,478,819	99
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3,661,450,428,918	3,375,662,350,209	285,788,078,709	92	4,252,574,469,616	4,225,609,990,797	26,964,478,819	99
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	4,620,687,583,000	4,564,697,512,607	55,990,070,393	99	4,508,697,227,600	4,430,817,899,824	77,879,327,776	98
	BELANJA BARANG	4,039,106,350,000	3,557,509,568,239	481,596,781,761	88	4,668,629,650,400	3,379,462,945,512	1,289,166,704,888	72
	BELANJA MODAL	2,971,847,941,000	2,506,390,221,308	465,457,719,692	84	2,006,852,082,000	1,448,155,827,680	558,696,254,320	72
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	11,631,641,874,000	10,628,597,302,154	1,003,044,571,846	91	11,184,178,960,000	9,258,436,673,016	1,925,742,286,984	83
C	PEMBIAYAAN				0				0



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 28/04/17 10:21
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,790,067,303,113	1,843,597,815,606	1,830,682,578,343	210,173,498	1,830,472,404,845	99.3	13,125,410,761
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,901,556	52,468,800	31,494,158	942,840	30,551,318	60.02	21,917,482
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	130,303,768,100	127,659,803,606	124,421,328,858	36,860,519	124,384,468,339	97.46	3,275,335,267
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,915,011,969	37,216,101,501	35,897,810,221	6,017,826	35,891,792,395	96.46	1,324,309,106
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	68,903,054,000	65,899,405,000	63,637,805,278	68,396,605	63,569,408,673	96.57	2,329,996,327
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	95,460,550,732	93,806,358,732	91,026,607,158	101,286,172	90,925,320,986	97.04	2,881,037,746
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,073,687,627	20,140,616,888	18,100,636,941	610,640	18,100,026,301	89.87	2,040,590,587
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,392,969,003	106,946,296,443	103,607,087,460	4,517,252	103,602,570,208	96.88	3,343,726,235
511129	Belanja Uang Makan PNS	370,121,282,900	349,806,292,424	330,726,416,809	70,565,486	330,655,851,323	94.55	19,150,441,101
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	461,825,000	438,675,000	381,575,000	0	381,575,000	86.98	57,100,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	5,644,085,000	5,658,600,000	5,579,910,000	4,430,000	5,575,480,000	98.61	83,120,000
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	0	147,432,000	139,319,488	0	139,319,488	94.5	8,112,512
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	455,224,000	177,176,000	15,657,000	0	15,657,000	8.84	161,519,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	42,522,904,000	28,835,343,000	25,011,955,000	272,164,239	24,739,790,761	86.74	4,095,552,239
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	28,316,000	26,570,000	0	0	0	0	26,570,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,670,383,883,000	2,680,408,955,000	2,629,260,181,714	775,965,077	2,628,484,216,637	98.09	51,924,738,363
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	32,552,393,000	28,186,190,000	24,971,126,060	5,802,550	24,965,323,510	88.59	3,220,866,490
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	32,552,393,000	28,186,190,000	24,971,126,060	5,802,550	24,965,323,510	88.59	3,220,866,490
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,602,547,256,000	1,911,533,108,000	1,911,247,972,460	0	1,911,247,972,460	99.99	285,135,540
512412	Belanja Pegawai Transito	33,332,696,000	559,330,000	0	0	0	0	559,330,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,635,879,952,000	1,912,092,438,000	1,911,247,972,460	0	1,911,247,972,460	99.96	844,465,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,338,816,228,000	4,620,687,583,000	4,565,479,280,234	781,767,627	4,564,697,512,607	98.81	55,990,070,393
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	217,223,239,638	212,746,181,757	201,405,298,727	13,949,000	201,391,349,727	94.67	11,354,832,030
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	863,536,462,000	913,026,552,000	897,209,493,128	403,863,795	896,805,629,333	98.27	16,220,922,667
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,820,704,000	41,727,657,492	38,440,351,723	3,682,445	38,436,669,278	92.12	3,290,988,214
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,248,123,000	9,241,512,000	8,217,044,085	0	8,217,044,085	88.91	1,024,467,915
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66,315,165,020	65,474,980,020	62,003,470,488	95,518,000	61,907,952,488	94.7	3,567,027,532
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,145,485,066	49,231,308,666	44,044,932,837	3,010,600	44,041,922,237	89.47	5,189,386,429
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,255,289,178,724	1,291,448,191,935	1,251,320,590,988	520,023,840	1,250,800,567,148	96.89	40,647,624,787

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 28/04/17 10:21
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	236,496,435,000	223,301,716,000	179,793,485,517	91,868,863	179,701,616,654	80.52	43,600,099,346
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	49,888,774,000	48,090,184,000	39,198,533,049	104,191,375	39,094,341,674	81.51	8,995,842,326
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	73,043,000	73,043,000	24,851,226	0	24,851,226	34.02	48,191,774
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	530,227,141,656	279,385,735,656	223,718,704,517	353,169,275	223,365,535,242	80.08	56,020,200,414
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	816,685,393,656	550,856,678,656	442,735,574,309	549,229,513	442,186,344,796	80.37	108,670,333,860
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	92,797,748,362	122,900,143,362	115,458,547,065	330,000	115,458,217,065	93.95	7,441,926,297
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	319,924,000	379,658,000	337,948,720	0	337,948,720	89.01	41,709,280
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	5,320,090,000	4,898,570,000	3,895,613,710	0	3,895,613,710	79.53	1,002,956,290
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	48,000,000	10,899,674,000	10,775,377,630	0	10,775,377,630	98.86	124,296,370
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	425,306,000	373,964,000	355,558,150	0	355,558,150	95.08	18,405,850
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,423,135,000	279,039,903,000	270,732,297,461	0	270,732,297,461	97.02	8,307,605,539
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	101,334,203,362	418,491,912,362	401,555,342,736	330,000	401,555,012,736	95.95	16,936,899,626
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	155,218,813,000	143,791,744,808	127,747,874,889	58,991,834	127,688,883,055	88.84	16,102,861,753
522112	Belanja Langganan Telepon	16,343,381,785	11,947,896,928	7,273,286,695	0	7,273,286,695	60.88	4,674,610,233
522113	Belanja Langganan Air	19,302,302,000	17,526,114,000	13,941,689,880	0	13,941,689,880	79.55	3,584,424,120
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19,097,966,000	18,079,882,000	15,653,855,692	0	15,653,855,692	86.58	2,426,026,308
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	7,189,678,914	6,292,479,694	4,767,268,328	279,120	4,766,989,208	75.76	1,525,490,486
522131	Belanja Jasa Konsultan	45,793,046,000	138,678,100,000	128,515,061,246	0	128,515,061,246	92.67	10,163,038,754
522141	Belanja Sewa	214,991,237,550	194,394,043,550	160,039,413,803	84,269,097	159,955,144,706	82.33	34,438,898,844
522151	Belanja Jasa Profesi	73,691,541,000	74,807,397,000	57,927,242,393	570,173,750	57,357,068,643	77.44	17,450,328,357
522191	Belanja Jasa Lainnya	78,133,620,000	76,367,279,000	55,044,253,884	13,883,400	55,030,370,484	72.08	21,336,908,516
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	629,761,586,249	681,884,936,980	570,909,946,810	727,597,201	570,182,349,609	83.73	111,702,587,371
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,797,094,450	230,084,443,450	223,989,917,698	19,625,966	223,970,291,732	97.35	6,114,151,718
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,102,316,000	4,615,042,000	4,265,334,805	0	4,265,334,805	92.42	349,707,195
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,562,340,000	2,162,566,000	2,093,039,249	10,925,000	2,082,114,249	96.78	80,451,751
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187,311,519,215	212,090,700,273	179,310,600,745	47,567,000	179,263,033,745	84.54	32,827,666,528
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	1,507,028,000	1,225,076,000	732,979,819	0	732,979,819	59.83	492,096,181
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,239,220,000	3,708,387,000	3,293,225,630	0	3,293,225,630	88.8	415,161,370
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,276,185,000	8,683,026,000	7,909,109,892	0	7,909,109,892	91.09	773,916,108
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	30,000,000	30,000,000	29,689,000	0	29,689,000	98.96	311,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	601,166,000	469,086,000	402,460,607	0	402,460,607	85.8	66,625,393

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 28/04/17 10:21
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	191,970,000	11,982,000	9,565,000	0	9,565,000	79.83	2,417,000
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	42,746,000	40,088,000	40,045,200	0	40,045,200	99.89	42,800
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	297,874,000	1,097,044,000	587,010,110	0	587,010,110	53.51	510,033,890
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	447,959,458,665	464,217,440,723	422,662,977,755	78,117,966	422,584,859,789	91.05	41,632,580,934
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	331,650,225,000	314,903,631,000	261,024,298,700	7,208,431,972	253,815,866,728	82.89	61,087,764,272
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,208,513,000	56,978,712,000	43,232,223,879	55,779,700	43,176,444,179	75.87	13,802,267,821
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58,743,245,000	61,026,602,000	49,336,232,778	836,602,958	48,499,629,820	80.84	12,526,972,180
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	95,099,409,000	96,957,645,000	76,737,481,242	3,886,832,505	72,850,648,737	79.15	24,106,996,263
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	546,701,392,000	529,866,590,000	430,330,236,599	11,987,647,135	418,342,589,464	81.21	111,524,000,536
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	82,118,917,000	74,460,502,000	44,348,029,768	7,827,544,270	36,520,485,498	59.56	37,940,016,502
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	1,326,800,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100	0
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	23,693,570,344	27,792,897,344	15,997,891,029	747,687,680	15,250,203,349	57.56	12,542,693,995
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	107,139,287,344	102,298,399,344	60,390,920,797	8,575,231,950	51,815,688,847	59.03	50,482,710,497
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	0	42,200,000	42,155,850	0	42,155,850	99.9	44,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	0	42,200,000	42,155,850	0	42,155,850	99.9	44,150
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,904,870,500,000	4,039,106,350,000	3,579,947,745,844	22,438,177,605	3,557,509,568,239	88.63	481,596,781,761
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	7,000,000	7,000,000	3,500,000	0	3,500,000	50	3,500,000
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	2,229,220,000	3,356,603,000	3,221,313,000	0	3,221,313,000	95.97	135,290,000
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	12,500,000	12,500,000	10,865,600	0	10,865,600	86.92	1,634,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	2,248,720,000	3,376,103,000	3,235,678,600	0	3,235,678,600	95.84	140,424,400
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415,398,618,000	1,532,614,807,000	1,150,531,534,872	0	1,150,531,534,872	75.07	382,083,272,128
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	35,000,000	0	0	0	0	0	0
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	219,902,000	97,660,000	87,220,000	0	87,220,000	89.31	10,440,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	237,840,000	54,160,000	0	0	0	0	54,160,000
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	17,450,000	0	0	0	0	17,450,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	213,074,017,000	236,815,374,000	236,009,373,328	0	236,009,373,328	99.66	806,000,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	628,965,377,000	1,769,599,451,000	1,386,628,128,200	0	1,386,628,128,200	78.36	382,971,322,800
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 28/04/17 10:21
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	544,461,274,000	932,934,091,000	882,571,315,990	1,541,482,091	881,029,833,899	94.6	51,904,257,101
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	45,977,000	8,714,000	0	8,714,000	18.95	37,263,000
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	1,075,304,000	488,629,000	198,557,487	0	198,557,487	40.64	290,071,513
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	0	1,342,115,000	960,500,000	0	960,500,000	71.57	381,615,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	10,209,410,000	55,337,476,000	48,438,681,763	24,219,000	48,414,462,763	87.53	6,923,013,237
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	90,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	14,460,000	51,500,000	39,960,750	0	39,960,750	77.59	11,539,250
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	176,401,551,000	182,681,945,000	162,013,887,311	1,709,235	162,012,178,076	88.69	20,669,766,924
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	732,251,999,000	1,172,911,733,000	1,094,231,617,301	1,567,410,326	1,092,664,206,975	93.29	80,247,526,025
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	45,000,000	43,680,000	0	43,680,000	97.07	1,320,000
534131	Belanja Modal Jaringan	0	5,107,093,000	4,594,141,905	0	4,594,141,905	89.96	512,951,095
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	151,500,000	564,500,000	550,585,795	0	550,585,795	97.54	13,914,205
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	151,500,000	5,716,593,000	5,188,407,700	0	5,188,407,700	90.76	528,185,300
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	21,365,579,000	19,948,812,000	18,384,915,833	0	18,384,915,833	92.16	1,563,896,167
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	295,249,000	288,884,000	0	288,884,000	97.84	6,365,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	21,365,579,000	20,244,061,000	18,673,799,833	0	18,673,799,833	92.24	1,570,261,167
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,384,983,175,000	2,971,847,941,000	2,507,957,631,634	1,567,410,326	2,506,390,221,308	84.39	465,457,719,692
	JUMLAH BELANJA	9,628,669,903,000	11,631,641,874,000	10,653,384,657,712	24,787,355,558	10,628,597,302,154	91.59	1,003,044,571,846



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
ESELON I/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	0	2,000,000	0	2,000,000	0
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	4,610,000	6,400,000	0	6,400,000	138.83
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,719,000	0	6,719,000	0
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	21,587,000	0	21,587,000	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20,400,000	192,445,304	0	192,445,304	943.36
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,640,403,000	950,428,912	0	950,428,912	26.11
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	403,969,000	0	0	0	0
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	903,220,000	914,760,000	0	914,760,000	101.28
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3,353,000	0	0	0	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	149,698,000	0	0	0	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,680,933	0	14,680,933	0
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0	7,700,280	0	7,700,280	0
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	17,103,138	0	17,103,138	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	347,298,450	0	347,298,450	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	541,413,154	0	541,413,154	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	333,599,831	0	333,599,831	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,509,968,316	0	2,509,968,316	0
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	5,658,360	0	5,658,360	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,259,941	0	4,259,941	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	5,125,653,000	5,876,022,619	0	5,876,022,619	63.66
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	11,000,000	0	11,000,000	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,000,000	3,637,608	0	3,637,608	90.94
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	187,490	0	187,490	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	4,000,000	14,825,098	0	14,825,098	30.31
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM					
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	100,000,000	2,526,717,281	0	2,526,717,281	2526.72
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	5,468,552	0	5,468,552	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	214,188,641	0	214,188,641	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,885,200	20,474,708	0	20,474,708	347.9
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	741,094,439,000	815,787,008,626	188,850,000	815,598,158,626	110.05
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	8,166,750,000	1,401,933,192	0	1,401,933,192	17.17
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7,650,000	1,208,287,840	0	1,208,287,840	15794.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	0	2,789,550,000	0	2,789,550,000	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	771,305,733	759,015,809	0	759,015,809	98.41
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,937,456	0	9,937,456	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	5,179,500	12,949,996	0	12,949,996	250.02
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	61,219,981	0	61,219,981	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	71,894,814	0	71,894,814	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	53,299,764	0	53,299,764	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	750,151,209,433	824,921,946,660	188,850,000	824,733,096,660	1,367.49
05	DITJEN PEMASYARAKATAN					
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1,200,000	185,422,600	0	185,422,600	15451.88
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	58,841,000	295,208,955	9,472,561	285,736,394	485.61
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,900,000	61,071,000	0	61,071,000	409.87
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	126,871,000	0	126,871,000	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	500,000	616,122,512	0	616,122,512	123224.5
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	481,025,916	4,317,801,646	1,529,893	4,316,271,753	897.31
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	21,274,300	0	21,274,300	0
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2,500,000	630,148,744	0	630,148,744	25205.95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	21,106,400	0	21,106,400	0
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0	400,000	0	400,000	0
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	434,550,000	305,062,099	0	305,062,099	70.2
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8,418,000	589,429	0	589,429	7
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	0	323,986,012	0	323,986,012	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	1,604,845,501	270,845,468	0	270,845,468	16.88
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,032,672,503	0	1,032,672,503	0
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	36,342,772	0	36,342,772	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	28,427,814	0	28,427,814	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	530,469,714	0	530,469,714	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10,000,000	1,740,289,057	0	1,740,289,057	17402.89
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,003,062,245	0	2,003,062,245	0
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	89,000	0	0	0	0
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	18,768,365	0	18,768,365	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	110,074,298	0	110,074,298	0
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2,009,490,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PEMASYARAKATAN	4,626,359,417	12,676,016,933	11,002,454	12,665,014,479	7,632.17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
06	DITJEN IMIGRASI					
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,131,150	0	2,131,150	0
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,300,000	0	1,300,000	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	840,933,925	0	840,933,925	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,196,068	1,196,713,934	0	1,196,713,934	28519.89
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	33,964,200	0	33,964,200	0
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	2,571,427,611,000	1,952,356,539,019	0	1,952,356,539,019	75.93
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	0	5,970,000	0	5,970,000	0
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	18,596,753	0	18,596,753	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	17,109,800	0	17,109,800	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,878,809,827	0	1,878,809,827	0
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	42,464,746	0	42,464,746	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	103,765,835	0	103,765,835	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	166,786,685	0	166,786,685	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,342,818,083	0	2,342,818,083	0
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,034,722,258	0	6,034,722,258	0
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,157,841	0	1,157,841	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	12,617,773,876	0	12,617,773,876	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN IMIGRASI	2,571,431,807,068	1,977,661,557,932	0	1,977,661,557,932	1,682.11
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,509,504	0	58,509,504	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	313,543,320	0	313,543,320	0
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	329,070,000,000	552,216,633,526	0	552,216,633,526	167.81
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	10,864	0	10,864	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	169,872,154	0	169,872,154	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	6,350,004	0	6,350,004	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,530,135	0	11,530,135	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	220,559,282	0	220,559,282	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	273,544,500	0	273,544,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN	329,070,000,000	553,270,553,289	0	553,270,553,289	18.65
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	86,167,000	0	86,167,000	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,000,000	10,370,928	0	10,370,928	172.85
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	24,156	0	24,156	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 7

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	55,540,000	0	55,540,000	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,860,369	0	42,860,369	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	14,400	0	14,400	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-	6,000,000	194,976,853	0	194,976,853	28.81
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA					
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,000,000	4,197,564	0	4,197,564	104.94
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	12,000,000	0	12,000,000	0
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	9,035	0	9,035	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	720,204	0	720,204	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA	4,000,000	16,926,803	0	16,926,803	26.24
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	44,750,000	0	44,750,000	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,000,000	26,129,166	0	26,129,166	290.32
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	113,730	0	113,730	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,533,804	0	1,533,804	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	4,953,935	0	4,953,935	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32,512,500	0	32,512,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 28/04/17 10:21 AM

Halaman : 8

Prg ID : lap_lra_pen_es1_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	9,000,000	109,993,135	0	109,993,135	48.39
11 423141	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,900,000	4,211,792	0	4,211,792	85.95
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENELITIAN DAN	4,900,000	4,211,792	0	4,211,792	85.95
12 423141	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	101,875,546	0	101,875,546	339.59
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	987,500,000	0	987,500,000	0
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	147,363	0	147,363	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	987,500,000	0	0	0	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	431	0	431	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,599,109	0	22,599,109	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,049,100	0	3,049,100	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	1,017,500,000	1,115,171,549	0	1,115,171,549	48.51
	JUMLAH PENDAPATAN	3,661,450,428,918	3,375,862,202,663	199,852,454	3,375,662,350,209	2,121.59

LAPORAN KEUANGAN

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan

Telp. (021) 5253004 ext. 336-337 Fax (021) 5253158